

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG

MEI 2026





LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Lampung

MEI
2026

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku “Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Periode Mei 2026” akhirnya dapat diselesaikan. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2023 bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia secara periodik melakukan asesmen terhadap perkembangan ekonomi di daerah, sumber-sumber tekanan inflasi, risiko dan prospeknya serta rekomendasi kebijakan yang perlu ditempuh Pemerintah.

Seiring dengan penerapan otonomi daerah sejak 1999, asesmen ekonomi regional semakin berperan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional dan upaya untuk menstabilkan harga. Perhatian terhadap perkembangan ekonomi daerah semakin kuat di era pemerintahan saat ini yang menghendaki aktivitas ekonomi tidak lagi terpusat pada daerah tertentu, melainkan tersebar di berbagai daerah, sehingga disparitas ekonomi antar daerah berkurang. Terkait dengan hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung melakukan kajian serta memberikan asesmen terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan regional Lampung secara menyeluruh dan dituangkan dalam publikasi “Laporan Perekonomian Provinsi Lampung”. Analisis dalam buku ini mencakup pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan inflasi, perbankan dan sistem pembayaran.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, PLN Wilayah Lampung, Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Ditjen Bea Cukai, Bapenda Provinsi Lampung, dan semua penyedia data yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Kami menyadari bahwa hasil kajian ekonomi yang disajikan dalam buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran serta masukan dari semua pihak yang berkepentingan dengan buku ini. Kami juga mengharapkan kiranya kerjasama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridho-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, Mei 2026
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Lampung

Bimo Epyanto
Direktur



Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Tabel	x
Ringkasan Eksekutif	xii
Tabel Indikator Makro	xvi

01

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

1.1. Analisis PDRB Sisi Pengeluaran	2
1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga	2
1.1.2. Konsumsi Pemerintah	4
1.1.3. Investasi	4
1.1.4. Ekspor dan Impor	5
1.2. Analisis PDRB Sisi Lapangan Usaha	8
1.2.1. LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9
1.2.2. LU Industri Pengolahan	10
1.2.3. LU Perdagangan Besar dan Eceran	11
1.2.4. LU Konstruksi	11
1.2.5. LU Transportasi dan Pergudangan	12
Boks 1	14
Analisis Komoditas Ekspor Utama Lampung	
Boks 2	16
Hilirisasi, Petani Kecil, dan Jalan Keluar dari Jebakan Komoditas	

02

Perkembangan Inflasi

2.1. Inflasi Umum Gabungan Dua Kota dan Dua Kabupaten di Provinsi Lampung	20
2.1.1. Inflasi Bulanan	20
2.1.2. Inflasi Tahunan	22
2.2. Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	28
2.2.1. Inflasi Kota Bandar Lampung	28
2.2.2. Inflasi Kota Metro	29
2.2.3. Inflasi Kabupaten Mesuji	29
2.2.4. Inflasi Kabupaten Lampung Timur	30
2.3. Inflasi Sumatera	31
2.4. Arah Perkembangan Inflasi Triwulan I 2026	31
2.5. Pengendalian Inflasi Boks 3	32
Sinergi TPID Lampung Menjaga Stabilitas Harga Pangan Selama Ramadan dan Idulfitri 1447 H	35

03

Stabilitas Keuangan Daerah, dan Pengembangan Akses Keuangan serta UMKM

3.1. Pembiayaan Daerah	40
3.1.1. Asesmen Sektor Rumah Tangga	41
3.1.2. Asesmen Sektor Korporasi	43
3.2. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	43

04

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

4.1. Perkembangan Transaksi Sistem	48
Pembayaran Tunai	
4.1.1 . Perkembangan Aliran	48
Uang Kartal	
4.1.2 . Penyediaan Uang Layak	48
Edar	
4.1.3 . Perkembangan Temuan	49
Uang Palsu	
4.2 . Perkembangan Sistem	50
Pembayaran Bank Indonesia	
4.3. Perkembangan Transaksi Alat	50
Pembayaran Menggunakan Kartu	
4.3.1 . Perkembangan Transaksi	51
APMK	
4.3.2 . Perkembangan Transaksi	51
Uang Elektronik	
4.4. Perkembangan <i>Merchant</i> &	52
Pengguna QRIS (<i>Quick Response</i>	
<i>Code Indonesian Standard</i>)	

05

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

5.1. Ketenagakerjaan	56
5.2 . Nilai Tukar Petani	59
5.3 . Kemiskinan	60

06

Prospek Perekonomian

6.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi	70
6.2. Prospek Inflasi	73

Daftar Grafik

01

Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumatera dan Provinsi Lampung	2	Grafik 1.21	Perkembangan Volume Ekspor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung	7
Grafik 1.2	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung	2	Grafik 1.22	Pangsa PDRB Lapangan Usaha	9
Grafik 1.3	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung	2	Grafik 1.23	Produksi Gabah Kering Giling	9
Grafik 1.4	Indeks Keyakinan Konsumen	3	Grafik 1.24	Produksi Jagung dan Ubi Kayu	9
Grafik 1.5	Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung	3	Grafik 1.25	Produksi Tanaman Hortikultura	9
Grafik 1.6	Pertkembangan Kedatangan	3	Grafik 1.26	Nilai Tukar Usaha Pertanian	10
Grafik 1.7	Penumpang di Bandara Radin Inten II	3	Grafik 1.27	<i>Southern Oscillation Index</i>	10
	Pertumbuhan Penyaluran Kredit Konsumsi		Grafik 1.28	Kredit LU Pertanian	10
Grafik 1.8	DPK Pemerintah Daerah	4	Grafik 1.29	Pertumbuhan Volume Impor Bahan Baku Industri	10
Grafik 1.9	Penanaman Modal Asing di Provinsi Lampung	4	Grafik 1.30	Pertumbuhan Konsumsi Listrik Industri	10
Grafik 1.10	Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Lampung	5	Grafik 1.31	Pertumbuhan Penyaluran Kredit Industri	10
Grafik 1.11	Perkembangan <i>Likert Scale</i> Investasi Kredit Investasi	5	Grafik 1.32	Perkembangan Indeks Penjualan Riil Lampung	11
Grafik 1.12	Perkembangan Ekspor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung	5	Grafik 1.33	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Lampung	11
Grafik 1.13	Perkembangan Nominal dan Volume Ekspor Kopi, Teh, dan Rempah-rempah	6	Grafik 1.34	Perkembangan Penjualan Kendaraan Kredit LU PBE	11
Grafik 1.14	Perkembangan Nominal dan Volume Ekspor Bahan Bakar Mineral	6	Grafik 1.35	Perkembangan Pengadaan Semen Provinsi Lampung	11
Grafik 1.15	Perkembangan Ekspor Komoditas Kopi, Teh dan Rempah	6	Grafik 1.36	Kredit Konstruksi	12
Grafik 1.16	Volume Angkutan Kargo Batubara Sumatera Selatan - Lampung	6	Grafik 1.37	Perkembangan Penumpang Angkutan Udara, Laut dan Kereta Api	12
Grafik 1.17	Perkembangan Ekspor Lemak Dan Minyak Hewan/Nabati	6	Grafik 1.38	Perkembangan Barang Angkutan Udara, Laut dan Kereta Api	12
Grafik 1.18	Perkembangan Harga CPO Dunia	7	Grafik 1.39	Kredit LU Transportasi, Pergudangan dan Infokom	13
Grafik 1.19	Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung	7			
Grafik 1.20		7			

02

Grafik 2.1	Inflasi Lampung dan Nasional	20
Grafik 2.2	Sumbangan Inflasi Bulanan Januari, Februari dan Maret 2026	20
Grafik 2.3	Sumbangan Inflasi Bulanan Januari 2026 Menurut Kelompok Pengeluaran	20
Grafik 2.4	Sumbangan Inflasi Bulanan Februari 2026 Menurut Kelompok Pengeluaran	21
Grafik 2.5	Sumbangan Inflasi Bulanan Maret 2026 Menurut Kelompok Pengeluaran	21
Grafik 2.6	Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional	23
Grafik 2.7	Perkembangan Harga Daging Sapi, Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras	24
Grafik 2.8	Perkembangan Harga Sayur Sayuran	24
Grafik 2.9	Perkembangan Harga Beras	24
Grafik 2.10	Perkembangan Harga Bumbu-bumbuan	24
Grafik 2.11	Perkembangan Harga Rokok	24
Grafik 2.12	Perkembangan Harga Kopi Dunia	25
Grafik 2.13	Perkembangan Harga Emas Perhiasan	25
Grafik 2.14	Perkembangan Tarif Angkutan Antar Kota	27
Grafik 2.15	Perkembangan Harga Bensin	27
Grafik 2.16	Inflasi Bulanan Kota Bandar Lampung	28
Grafik 2.17	Inflasi Tahunan Kota Bandar Lampung	28
Grafik 2.18	Inflasi Bulanan Kota Metro	29
Grafik 2.19	Inflasi Tahunan Kota Metro	29
Grafik 2.20	Inflasi Bulanan Kabupaten Mesuji	29
Grafik 2.21	Inflasi Tahunan Kabupaten Mesuji	30
Grafik 2.22	Inflasi Bulanan Kabupaten Lampung Timur	30
Grafik 2.23	Inflasi Tahunan Kabupaten Lampung Timur	30
Grafik 2.24	Inflasi Tahunan Kabupaten Kota di Wilayah Sumatera	31

03

Grafik 3.1	Perkembangan Kredit dan NPL Prov. Lampung	40
Grafik 3.2	Kredit Konsumsi Prov. Lampung	40
Grafik 3.3	Kredit Prov. Lampung berdasarkan Jenis Penggunaan	40
Grafik 3.4	Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Usaha (Konvensional dan Syariah)	41
Grafik 3.5	Perkembangan Kredit UMKM Provinsi Lampung	41
Grafik 3.6	Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga	41
Grafik 3.7	Indeks Keyakinan Konsumen	41
Grafik 3.8	Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga	42
Grafik 3.9	NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga	42
Grafik 3.10	DPK Berdasarkan Jenis Nasabah	42
Grafik 3.11	Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Berdasarkan Jenis Penggunaan	42
Grafik 3.12	Pertumbuhan Kredit Korporasi	43
Grafik 3.13	SBT Perkembangan Kegiatan Usaha	43
Grafik 3.14	DPK Kredit Korporasi	43
Grafik 3.15	Pertumbuhan Kredit UMKM	44
Grafik 3.16	Pangsa Kredit UMKM	44
Grafik 3.17	Kredit UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan	44
Grafik 3.18	Kredit UMKM berdasarkan Penggunaan	44

04

Grafik 4.1	Perkembangan Aliran Uang Kartal Triwulanan	48
Grafik 4.2	Aliran Uang Kartal <i>Inflow</i>	48
Grafik 4.3	Aliran Uang Kartal <i>Outflow</i>	48

Grafik 4.4	Penukaran Uang Melalui BI	48
Grafik 4.5	Kas Keliling	48
Grafik 4.6	Kas Titipan	49
Grafik 4.7	Perkembangan Pemusnahan UTLE	49
Grafik 4.8	Temuan Uang Palsu	49
Grafik 4.9	Pecahan Uang Palsu Tw I 2026	49
Grafik 4.10	Perkembangan Transaksi Kliring	50
Grafik 4.11	Perkembangan Transaksi RTGS	50
Grafik 4.12	Perkembangan Transaksi Kartu ATM/D	51
Grafik 4.13	Indeks Pengeluaran Konsumsi Barang Tahan Lama	51
Grafik 4.14	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	51
Grafik 4.15	Pertumbuhan Kartu Kredit Per Jenis Transaksi (% yoy)	51
Grafik 4.16	Pangsa Penghasilan untuk Pembayaran Cicilan	51
Grafik 4.17	Perkembangan Dana <i>Float</i> UE	52
Grafik 4.18	Perkembangan Transaksi UE Per Jenis Transaksi	52
Grafik 4.19	Pangsa Transaksi UE Triwulanan	52
Grafik 4.20	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi & Komunikasi	52
Grafik 4.21	Perkembangan Jumlah <i>Merchant</i> QRIS	52
Grafik 4.22	Pertumbuhan <i>Merchant</i> QRIS Triwulanan	53
Grafik 4.23	Pangsa <i>Merchant</i> QRIS di Sumatera	53
Grafik 4.24	Perkembangan Pengguna QRIS	53

Grafik 5.1	Jumlah Penduduk Bekerja di Provinsi Lampung	51
Grafik 5.2	Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung	51
Grafik 5.3	TPAK Provinsi Lampung	57

Grafik 5.4	<i>Share</i> Tenaga Kerja Provinsi Lampung	57
Grafik 5.5	TPAK Provinsi Lampung Berdasarkan <i>Gender</i>	57
Grafik 5.6	IKG Provinsi Lampung	57
Grafik 5.7	TPT Sumatera	57
Grafik 5.8	TPT Provinsi Lampung berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal	58
Grafik 5.9	Penggunaan Tenaga Kerja dan Perkembangan Investasi pada Dunia Usaha di Provinsi Lampung	58
Grafik 5.10	Perkembangan Upah Minimum Provinsi Lampung	58
Grafik 5.11	Proporsi Pekerja Formal dan Informal di Provinsi Lampung	58
Grafik 5.12	Pekerja di Provinsi Lampung berdasarkan Jam Kerja	59
Grafik 5.13	TPAK Menurut Tingkat Pendidikan (ribu orang)	59
Grafik 5.14	TPAK Menurut Tingkat Pendidikan (%)	59
Grafik 5.15	NTP Provinsi Lampung dan Komponen Penyusunnya	59
Grafik 5.16	NTP Per Sub Sektor	60
Grafik 5.17	Indeks yang Diterima per Sub Sektor	60
Grafik 5.18	Indeks yang Dibayar per Sub Sektor	60
Grafik 5.19	Pertumbuhan Nilai Tukar Usaha	60
Grafik 5.20	Petani (NTUP) per Subsektor	60
Grafik 5.21	NTP Provinsi-Provinsi di Sumatera	61
Grafik 5.22	Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Lampung	61
Grafik 5.23	Persentase Penduduk Miskin di Sumatera dibandingkan Nasional	61
Grafik 5.24	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	61
Grafik 5.25	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Koefisien Gini Provinsi Lampung	62

Grafik 6.1	Perkembangan Upah Minimum Provinsi Lampung 2020 s.d. 2026	71
Grafik 6.2	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Provinsi Lampung	71
Grafik 7.3	Perkembangan Hasil <i>Liaison</i> BI Lampung	72

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Pengeluaran	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Lapangan Usaha	8
Tabel 2.1	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi & Deflasi Bulanan Januari 2026	20
Tabel 2.2	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi & Deflasi Bulanan Februari 2026	21
Tabel 2.3	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi & Deflasi Bulanan Maret 2026	21
Tabel 2.4	Inflasi Bulanan Menurut Kelompok (Pangsa %MtM)	21
Tabel 2.5	Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok (Pangsa %MtM)	22
Tabel 2.6	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau (% yoy)	23
Tabel 2.7	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar Lainnya (% yoy)	25
Tabel 2.8	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (% yoy)	26
Tabel 2.9	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Transportasi (% yoy)	26
Tabel 2.10	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran (% yoy)	27
Tabel 2.11	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Pendidikan (% yoy)	28
Tabel 5.1	Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung	56
Tabel 5.2	Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Lampung	58
Tabel 5.3	Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya	62
Tabel 5.4	Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I 2026	63
Tabel 5.5	Penyaluran Program Sembako Posisi Triwulan I 2026	64
Tabel 6.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia	70
Tabel 6.2	Proyeksi Indikator Makroekonomi Provinsi Lampung	71
Tabel 6.3	Harga Komoditas Ekspor dan Impor Utama Provinsi Lampung	71

Ringkasan Eksekutif

Mei 2026



Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tumbuh 5,58% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,54% (yoy).

Secara umum, perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tumbuh 5,58% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,54% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang sebesar 5,13% (yoy), meskipun sedikit lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,61% (yoy). Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan I 2026 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing tercatat sebesar Rp132,36 triliun dan Rp73,44 triliun.

Dari sisi permintaan domestik, pertumbuhan ekonomi Lampung yang meningkat pada triwulan laporan utamanya didukung oleh peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT), Investasi, dan Konsumsi Pemerintah. Konsumsi RT dengan sumbangan sebesar 3,45% terhadap total PDRB Lampung pada triwulan I 2026 mencatatkan pertumbuhan 5,54% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,10% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan dan mobilitas masyarakat pada periode HBKN Tahun Baru 2026, Imlek, serta Ramadan dan Idulfitri 2026. Investasi dan Konsumsi Pemerintah masing-masing tumbuh 4,29% (yoy) dan 13,84% (yoy), didukung oleh berlanjutnya proyek pembangunan strategis nasional maupun daerah, serta akselerasi penyaluran MBG di Provinsi Lampung.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 terutama ditopang oleh pertumbuhan sektor primer dan tersier, di tengah sektor sekunder yang tumbuh terbatas. Pertumbuhan sektor primer didukung oleh LU Pertanian sebagai LU utama Provinsi Lampung yang tumbuh 9,89% (yoy), meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,09% (yoy), didorong oleh puncak panen raya komoditas tanaman pangan, utamanya padi dan jagung. Selanjutnya, sektor tersier juga tumbuh didorong oleh pertumbuhan LU Perdagangan dan LU Akmamin yang masing-masing tumbuh 6,91% (yoy) dan 12,43% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (3,90%; yoy dan 8,58%; yoy) didukung oleh tingginya permintaan dan mobilitas masyarakat pada momentum Tahun Baru, Imlek, serta Ramadan dan Idulfitri 2026 yang seluruhnya berlangsung pada triwulan I 2026.

Inflasi

Inflasi Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 0,19% (mtm), melambat dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,58% (mtm).

Inflasi Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 0,19% (mtm), melambat dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,58% (mtm). Secara bulanan, rata-rata IHK selama Triwulan I 2026 mengalami inflasi sebesar 0,16% (mtm), lebih rendah dari rata-rata Triwulan IV 2025 yang mencatat inflasi sebesar 0,39% (mtm). Meskipun demikian, capaian inflasi bulanan tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,41% (mtm). Peningkatan tekanan inflasi pada Triwulan I 2026 terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Secara tahunan, inflasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 1,16% (yoy), melambat dibandingkan Triwulan IV 2025 yang sebesar 1,25% (yoy), serta berada di bawah inflasi nasional yang sebesar 3,48% (yoy). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh tekanan inflasi dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, sementara deflasi pada kelompok Pendidikan menahan inflasi yang lebih tinggi pada periode laporan.

Secara spasial, kinerja inflasi kabupaten/kota di Provinsi Lampung menunjukkan tekanan harga yang relatif lebih terkendali dibandingkan wilayah lain di Sumatera. Seluruh kabupaten/kota sampel IHK di Lampung mencatat inflasi tahunan di bawah tingkat inflasi nasional dan berada dalam kelompok 10 inflasi terendah di Sumatera. Di tengah disparitas inflasi di wilayah Sumatera, posisi kabupaten/kota di Lampung mencerminkan stabilitas harga yang relatif terjaga selama triwulan laporan.

Inflasi Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy) dengan kecenderungan meningkat seiring normalisasi pasokan pasca panen raya, risiko gangguan produksi akibat faktor cuaca, peningkatan permintaan pada periode libur sekolah, serta tekanan imported inflation. Namun demikian, inflasi diperkirakan tetap terkendali didukung oleh normalisasi permintaan pasca-HBKN Idulfitri, meningkatnya pasokan sejumlah komoditas strategis, serta berlanjutnya penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui TPID.

Pembiayaan Daerah

Kredit konsumsi rumah tangga tumbuh 4,82% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (4,57%; yoy).

Pada triwulan I 2025, kredit konsumsi rumah tangga tumbuh dengan realisasi sebesar Rp30,18 triliun atau tumbuh sebesar 10,43% (yoy). Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 9,83% (yoy). Konsumsi rumah tangga memiliki peran besar dalam perekonomian Lampung. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Lampung menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 4,94 % (yoy).

Kredit perbankan untuk sektor korporasi tumbuh 2,55% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp69,46 triliun.

Pertumbuhan kredit rumah tangga didukung baik oleh peningkatan pada Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan kinerja positif Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang masing-masing tumbuh sebesar 34,25% (yoy), 10,73% (yoy) dan 10,56% (yoy).

Kinerja kredit rumah tangga yang baik sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga pada triwulan I 2026 di Provinsi Lampung yang mencapai Rp49,06 Triliun atau 79,30% dari total DPK. Pertumbuhan DPK rumah tangga pada triwulan laporan tercatat sebesar 4,32% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,95% (yoy). Komposisi DPK rumah tangga pada triwulan I 2026 didominasi oleh tabungan (pangsa 79,30%), deposito (pangsa 19,10%), dan giro (pangsa 1,60%).

Kredit UMKM tumbuh positif pada triwulan I 2026. Kredit yang disalurkan pada periode laporan tercatat sebesar Rp32,748 Triliun atau tumbuh 1,87% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,43% (yoy).

Sistem Pembayaran

Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tercatat mengalami *net inflow* sebesar Rp1,11 triliun. Kondisi ini sejalan dengan kinerja ekonomi yang membaik. Sementara itu, kondisi aliran uang kartal *outflow* mengalami kenaikan sebesar negatif 4,29% (yoy) yang tumbuh dari triwulan sebelumnya dengan *outflow* sebesar negatif 22,31% (yoy).

Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (RTGS) tumbuh negatif jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp31,37 miliar menjadi sebesar Rp29,20 miliar. Transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) juga mengalami kontraksi sebesar 18,86% (yoy). Secara nominal, transaksi kartu ATM/Debit mengalami penurunan sebesar 4,46% (yoy), kontras dengan triwulan sebelumnya yang mengalami peningkatan sebesar 25,85% (yoy).

Sampai dengan Maret 2026, *merchant* QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 857.433 *merchant*. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan *merchant* QRIS di wilayah Sumatra. Sementara, jumlah pengguna QRIS di Provinsi Lampung adalah sebesar 1.475.273. Jumlah ini mengalami pertumbuhan 3,33% (qoq) dari triwulan sebelumnya.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 tercatat membaik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut tecermin dari peningkatan jumlah penduduk yang bekerja menjadi 4,91 juta jiwa, atau bertambah 34,53 ribu jiwa (tumbuh 0,71%) dibandingkan Triwulan I 2025.

Berdasarkan status pekerjaan utama pada Triwulan I 2026, penduduk yang bekerja di sektor informal tercatat sebanyak 3.385,8 ribu orang (68,91%), sedangkan di sektor formal sebanyak 1.527,8 ribu orang (31,09%). Persentase pekerja formal meningkat 1,69% jika dibandingkan dengan periode Triwulan I 2025.

Berdasarkan hasil Sakernas Triwulan I 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 3,95%. Hal tersebut berarti sekitar empat orang dari setiap seratus angkatan kerja berada dalam kondisi menganggur. Dibandingkan Triwulan I 2025, TPT menurun sebesar 2,95% (yoy).

Rata-rata NTP Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 126,63, meningkat secara tahunan meski tertahan secara triwulanan. Rata-rata NTP triwulanan pada triwulan I 2025 sebesar 133,28 sementara pada triwulan IV 2025 sebesar 129,07.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 terpantau mengalami penurunan sebesar 8,43% (yoy). Jumlah penduduk miskin pada Triwulan I 2026 sebanyak 860,13 ribu jiwa dari sebelumnya mencapai 939,31 ribu jiwa pada Triwulan I 2025. Dari sisi komposisinya, penduduk miskin di Provinsi Lampung utamanya berada di daerah pedesaan di mana sebagian besar berprofesi sebagai petani.

Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tercatat mengalami net inflow sebesar Rp1,11 triliun.

Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS) tumbuh negatif jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp31,37 miliar menjadi sebesar Rp29,20 miliar.

Merchant QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 857.433 merchant.

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 tercatat membaik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rata-rata NTP Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 126,63 meningkat secara tahunan.

Secara keseluruhan tahun 2026, perekonomian Lampung diperkirakan tumbuh dalam kisaran 5,0%–5,6% dengan inflasi yang terkendali dalam kisaran 2,5+1%.

Prospek Ekonomi

Prospek perekonomian dunia pada tahun 2026–2027 kini diprakirakan menghadapi tantangan yang lebih berat di tengah ketidakpastian global yang semakin tinggi. Berdasarkan perkembangan terkini, kondisi dan prospek ekonomi dunia diprakirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan prospek awal tahun, dipicu oleh tingginya gejolak geopolitik akibat perang di Timur Tengah. Gejolak ini tidak hanya memengaruhi rantai pasok global tetapi juga memicu volatilitas harga komoditas energi, terutama minyak mentah, serta menunda normalisasi kebijakan moneter global.

Kinerja perekonomian Provinsi Lampung diprakirakan tumbuh dalam kisaran 5,0–5,6% pada tahun 2026, cenderung lebih moderat dari prakiraan sebelumnya seiring eskalasi risiko geopolitik global, namun tetap didukung prospek penguatan permintaan domestik serta kinerja lapangan usaha utama. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan investasi diprakirakan tetap menjadi penopang pertumbuhan seiring terjaganya daya beli masyarakat, kenaikan upah minimum, serta berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan proyek strategis daerah. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU), sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diprakirakan tetap menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, didukung keberlanjutan program swasembada pangan dan penguatan produktivitas.

Inflasi gabungan empat kabupaten kota di Provinsi Lampung pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam sasaran 2,5+1%. Laju inflasi gabungan di Provinsi Lampung yang semakin terkendali tersebut sejalan dengan penguatan program TPIP-TPID dan implemementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) dalam kerangka 4K.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya sebesar 5,54% (yoy).



PERTUMBUHAN EKONOMI

Tw IV 2025	Tw I 2026
5,54 (% yoy)	5,61 (% yoy)

KONSUMSI RUMAH TANGGA

Tw IV 2025	Tw I 2026
5,10 (% yoy)	5,52 (% yoy)

PERKEMBANGAN INFLASI

Tingkat Inflasi Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 1,16% (yoy), lebih rendah dibandingkan 1,25% (yoy) pada triwulan sebelumnya.



PERKEMBANGAN INFLASI

Tw III 2025	Tw I 2026
1,17 (% yoy)	1,16 (% yoy)

INFLASI TAHUNAN KELOMPOK BAHAN MAKANAN

Tw III 2025	Tw I 2026
5,02 (% yoy)	1,12 (% yoy)

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN



TUNAI	Inflow	Outflow	Nett Flow
Tw IV 2025	1,26	2,19	-0,93
Tw I 2026	4,76	3,64	1,11

Satuan dalam Triliun Rupiah

NON TUNAI	Nominal Kliring (Debit + Kredit)	Volume Kliring (Debit + Kredit)	Nominal RTGS	Volume RTGS
Tw IV 2025	4,00 Rp Triliun	72,25 Ribu Lembar	31,37 Rp Triliun	17,28 Ribu Lembar
Tw I 2024	3,03 Rp Triliun	56,92 Ribu Lembar	29,20 Rp Triliun	13,73 Ribu Lembar

KEUANGAN PEMERINTAH



% REALISASI PENDAPATAN

APBD SEMUA PEMDA DI PROVINSI LAMPUNG

Tw IV 2025	Tw I 2026*
87,74%	14,28%

*Data per 25 Mei 2026



% REALISASI BELANJA

APBD SEMUA PEMDA DI PROVINSI LAMPUNG

Tw IV 2025	Tw I 2026*
83,42%	18,89%

*Data per 25 Mei 2026

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

4,19% Agustus 2024	4,07% Februari 2025	4,21% Agustus 2025
-----------------------	------------------------	-----------------------

ANGKATAN KERJA (Juta Orang)

5,00% Februari 2023	5,04% Februari 2024	5,08% Februari 2025
------------------------	------------------------	------------------------

KEMISKINAN

10,62% September 2024	10% Maret 2025	9,66% September 2025
--------------------------	-------------------	-------------------------

STABILITAS KEUANGAN DAERAH

Pertumbuhan Kredit Perseorangan

Tw IV 2025	Tw I 2026
4,80 (% yoy)	5,13 (% yoy)

Tw IV 2025	Tw I 2026
2,51 (% yoy)	2,55 (% yoy)

Pertumbuhan Kredit

Tw IV 2025	Tw I 2026
1,43 (% yoy)	1,87 (% yoy)

Berdasarkan Lokasi Bank

Pertumbuhan Kredit Konsumsi	Tw IV 2025 5,01 (% yoy)	Tw I 2026 6,12 (% yoy)
Pertumbuhan Kredit	Tw IV 2025 -0,81 (% yoy)	Tw I 2026 0,08 (% yoy)
Pertumbuhan Kredit Modal Kerja	Tw IV 2025 19,20 (% yoy)	Tw I 2026 21 (% yoy)
Pertumbuhan Kredit Investasi	Tw IV 2025 9,13 (% yoy)	Tw I 2026 10,08 (% yoy)

Pertumbuhan DPK	Tw III 2025 4,58 (% yoy)	Tw IV 2025 5,73 (% yoy)
Pertumbuhan Aset (Aset Bersih)	Tw III 2025 3,71 (% yoy)	Tw IV 2025 5,42 (% yoy)
NPL (Gross)	Tw III 2025 2,74 (% yoy)	Tw IV 2025 2,63 (% yoy)
LDR	Tw IV 2025 119,14 (% yoy)	Tw I 2026 115,11 (% yoy)

Berdasarkan Lokasi Proyek

Pertumbuhan Kredit	Tw IV 2025 4,57 (% yoy)	Tw I 2026 4,82 (% yoy)
Pertumbuhan Kredit Modal Kerja	Tw IV 2025 2,56 (% yoy)	Tw I 2026 1,13 (% yoy)
Pertumbuhan Kredit Investasi	Tw IV 2025 2,32 (% yoy)	Tw I 2026 6,98 (% yoy)
Pertumbuhan Kredit Konsumsi	Tw IV 2025 9,83 (% yoy)	Tw I 2026 10,43 (% yoy)



Indikator Ekonomi dan Perbankan

Inflasi dan PDRB

Indikator	2025				2025	2026
	I	II	III	IV		I
Indeks Harga Konsumen (IHK)						
Bandar Lampung	107,54	108,45	106,97	107,87		108,76
Metro	107,25	107,43	107,48	108,65		108,99
Mesuji	113,13	113,54	112,75	114,13		114,83
Lampung Timur	111,86	112,29	111,18	113,26		113,03
Gabungan	109,05	109,75	108,51	109,79		110,32
Laju Inflasi (yoy)						
Bandar Lampung	1,45	2,21	0,37	0,44		1,13
Metro	1,39	1,81	1,99	2,09		1,62
Mesuji	2,54	2,52	2,35	2,69		1,50
Lampung Timur	1,71	2,48	2,44	2,45		1,05
Gabungan	1,58	2,27	1,17	1,25		1,16
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)						
Pertumbuhan PDRB (% YoY)	5,47	5,09	5,04	5,54	5,54	5,58
PDRB ADHK (Miliar Rp)	69.560,58	76.047,84	76.575,42	74.236,81	296.420,65	74.439,55
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	15.379,25	19.882,59	19.856,80	17.262,81	72.381,45	16.990,72
Pertambangan & Penggalian	3.263,58	3.311,13	3.293,64	3.276,48	13.144,83	3.201,29
Industri Pengolahan	13.105,82	13.686,58	14.384,66	13.573,23	54.750,29	13.454,05
Pengadaan Listrik, Gas	96,29	96,21	99,79	101,99	394,28	98,09
Pengadaan Air	72,14	73,13	71,82	73,71	290,80	69,36
Konstruksi	7.110,00	7.634,94	7.707,13	8.070,09	30.522,16	7.460,72
Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi Mobil & Sepeda	10.669,37	11.047,24	10.967,59	11.093,06	43.777,26	11.405,45
Transportasi & Pergudangan	4.990,67	5.339,96	5.046,08	5.230,00	20.606,71	5.293,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.167,93	1.240,63	1.269,19	1.300,51	4.978,26	1.313,15
Informasi & Komunikasi	4.236,59	4.153,13	4.268,47	4.287,49	16.945,68	4.373,49
Jasa Keuangan	1.381,29	1.402,27	1.435,20	1.535,14	5.753,90	1.525,82
Real Estate	2.147,09	2.092,96	2.115,14	2.241,54	8.596,73	2.169,12
Jasa Perusahaan	113,44	118,42	116,65	122,14	470,65	118,22
Administrasi Pemerintahan,Pertahanan, dan Jaminan Sosial	2.185,96	2.245,68	2.169,44	2.237,13	8.838,21	2.229,97
Jasa Pendidikan	2.021,05	2.016,79	2.043,00	2.032,28	8.113,12	2.025,72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	768,46	768,76	816,04	798,29	3.151,55	787,69
Jasa Lainnya	851,65	936,40	914,76	1.001,96	3.704,77	923,12
Nilai Ekspor Non Migas (Juta USD)	1.573,74	1.474,10	1.777,99	1.810,77	6.636,59	1.380,08
Volume Ekspor Non MIGas (Ribu Ton)	4.307,22	3.862,00	4.178,00	4.888,49	17.235,71	4.092,58
Nilai Impor Non Migas (Juta USD)	228,00	285,71	328,51	393,31	1.235,53	386,92
Volume Impor Non Migas (Ribu Ton)	460,53	559,65	409,31	506,63	1.936,12	444,89

Sistem Pembayaran

Indikator Mikro	2024			2025				2026
	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Inflow (Triliun Rp)	4,73	2,92	2,31	3,72	3,75	2,13	1,26	4,76
Outflow (Triliun Rp)	4,77	3,05	2,81	3,8	3,14	2,97	2,19	3,64
Pemusnahan Uang (Triliun Rp)	-							
Nominal Transaksi RTGS (Triliun Rp)	42,98	43,95	32,73	28,31	28,81	39,66	31,37	29,2
Volume Transaksi RTGS (Transaksi)	16.962,00	22.683,00	18.125,00	14.142,00	15.402,00	19.120,00	17.280	13.730
Rata-Rata Harian Nominal Transaksi RTGS (Triliun Rp)	704,58	720,44	536,58	464,10	472,30	650,16	514,26	478,69
Rata-Rata Harian Volume Transaksi RTGS (Transaksi)	278,07	371,85	297,13	231,84	252,49	313,44	283,28	225,08
Volume Kliring Kredit (Transaksi)	43.423,00	46.930,00	51.483,00	39.455	40.455	47.314	53.807	36.039
Nominal Kliring Kredit (Triliun Rp)	2,36	2,70	2,77	2,38	2,54	3,004	3,116	1,983
Rata-Rata Harian Volume Kliring Kredit (Transaksi)	711,85	769,34	843,98	646,80	663,20	775,64	882,08	590,80
Rata-Rata Harian Nominal Kliring Kredit (Miliar Rp)	38,69	44,30	45,36	39,02	41,64	49,25	51,08	32,51
Volume Kliring Debet (Transaksi)	34.143,00	35.166,00	33.680,00	28.201	27.719	29.775	18.450	20.882
Nominal Kliring Debet (Triliun Rp)	1,67	1,69	1,64	1,35	1,42	1,41	0,884	1,05
Rata-Rata Harian Volume Kliring Debet (Transaksi)	559,72	576,49	552,13	462,31	454,41	488,11	302,46	342,33
Rata-Rata Harian Nominal Kliring Debet (Miliar Rp)	27,38	27,70	26,94	22,13	23,28	23,11	14,49	17,21

Perbankan

Indikator Perbankan	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Bank Umum									
Total Aset (Triliun Rp)	80,22	83,11	84,06	83,52	82,90	85,38	87,18	88,30	88,63
Pertumbuhan Total Aset (%yoy)		7,16	6,34	6,47	3,34	2,73	3,72	5,72	6,91
DPK (Triliun Rp)	55,88	58,29	60,13	58,86	61,07	62,50	62,13	61,90	64,27
Giro	10,76	11,40	11,78	9,22	10,75	10,99	10,82	9,05	11,11
Tabungan	32,47	34,59	36,03	37,54	38,05	38,94	38,44	40,08	41,17
Deposito	12,63	12,29	12,32	12,11	12,27	12,57	12,87	12,76	11,99
Pertumbuhan DPK (%yoy)	3,41	9,08	9,19	6,92	9,29	7,23	3,33	5,16	5,24
Kredit (Triliun Rp)	65,94	68,26	69,84	70,23	69,71	71,05	72,47	73,75	73,94
Modal Kerja (Triliun Rp)	37,24	38,78	39,11	38,54	37,62	37,56	38,27	38,22	37,65
Investasi (Triliun Rp)	8,07	8,52	8,91	9,28	9,30	10,38	10,48	11,06	11,26
Konsumsi (Triliun Rp)	20,62	20,96	21,81	22,41	22,77	23,10	23,71	24,45	25,07
Pertumbuhan Kredit (%yoy)	3,38	1,19	9,64	8,04	5,72	4,08	3,77	5,01	6,07
LDR	119,96	118,99	118,81	120,61	115,28	114,74	116,70	119,14	115,11
Kredit UMKM (Triliun Rp)	29,91	30,98	31,51	31,06	30,91	31,01	31,17	31,09	31,40
Pertumbuhan Kredit UMKM (%yoy)	14,28	14,95	13,96	6,05	-14,88	0,10	-1,06	0,10	1,62
NPL (%) gross	2,52	2,39	2,43	2,57	2,67	2,58	2,74	2,63	3,02



Perkembangan Ekonomi Makro Daerah



Secara umum, perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tumbuh 5,58% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,54% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang sebesar 5,13% (yoy), meskipun sedikit lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,61% (yoy). Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan I 2026 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing tercatat sebesar Rp132,36 triliun dan Rp73,44 triliun.

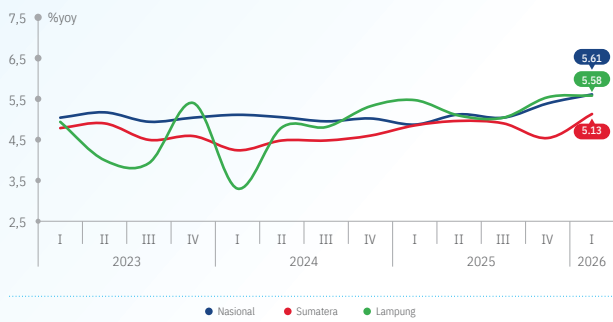


Dari sisi permintaan domestik, pertumbuhan ekonomi Lampung yang meningkat pada triwulan laporan utamanya didukung oleh peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT), Investasi, dan Konsumsi Pemerintah. Konsumsi RT dengan sumbangan sebesar 3,45% terhadap total PDRB Lampung pada triwulan I 2026 mencatatkan pertumbuhan 5,54% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,10% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan dan mobilitas masyarakat pada periode HBKN Tahun Baru 2026, Imlek, serta Ramadan dan Idulfitri 2026. Investasi dan Konsumsi Pemerintah masing-masing tumbuh 4,29% (yoy) dan 13,84% (yoy), didukung oleh berlanjutnya proyek pembangunan strategis nasional maupun daerah, serta akselerasi penyaluran MBG di Provinsi Lampung.



Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 terutama ditopang oleh pertumbuhan sektor primer dan tersier, di tengah sektor sekunder yang tumbuh terbatas. Pertumbuhan sektor primer didukung oleh LU Pertanian sebagai LU utama Provinsi Lampung yang tumbuh 9,89% (yoy), meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,09% (yoy), didorong oleh puncak panen raya komoditas tanaman pangan, utamanya padi dan jagung. Selanjutnya, sektor tersier juga tumbuh didorong oleh pertumbuhan LU Perdagangan dan LU Akmamin yang masing-masing tumbuh 6,91% (yoy) dan 12,43% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (3,90%; yoy dan 8,58%; yoy) didukung oleh tingginya permintaan dan mobilitas masyarakat pada momentum Tahun Baru, Imlek, serta Ramadan dan Idulfitri 2026 yang seluruhnya berlangsung pada triwulan I 2026.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumatera dan Provinsi Lampung



Sumber: BPS, diolah

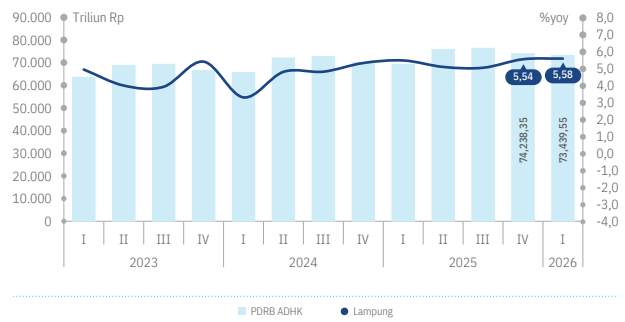
Secara umum, perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tumbuh 5,58% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,54% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang sebesar 5,13% (yoy), meskipun sedikit lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,61% (yoy) (Grafik 1.1). Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan I 2026 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing tercatat sebesar Rp132,36 triliun dan Rp73,44 triliun (Grafik 1.2).

1.1 Analisis PDRB Sisi Pengeluaran

Dari sisi permintaan domestik, pertumbuhan ekonomi Lampung yang meningkat pada triwulan laporan utamanya didukung oleh peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT), Investasi, dan Konsumsi Pemerintah. Konsumsi RT dengan sumbangan sebesar 3,45% terhadap total PDRB Lampung pada triwulan I 2026 mencatatkan pertumbuhan 5,54% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,10% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan dan mobilitas masyarakat pada periode HBKN Tahun Baru 2026, Imlek, serta Ramadan dan Idulfitri 2026. Investasi dan Konsumsi Pemerintah masing-masing tumbuh 4,29% (yoy) dan 13,84% (yoy), didukung oleh berlanjutnya proyek pembangunan strategis nasional maupun daerah, serta akselerasi penyaluran MBG di Provinsi Lampung.

Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh kinerja Net Ekspor. Pada triwulan I 2026, Net Ekspor Lampung tumbuh 16,87% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 4,28% (yoy). Kinerja volume Impor Lampung meski masih berkontraksi 3,39% (yoy) pada triwulan I 2026 namun membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 11,89% (yoy). Di sisi lain, kinerja ekspor mengalami perlambatan, dengan volume ekspor yang tercatat berkontraksi 4,98% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh positif 5,42% (yoy). Kendati demikian, skala penurunan impor yang lebih dalam

Grafik 1.2. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung



Sumber: BPS, diolah

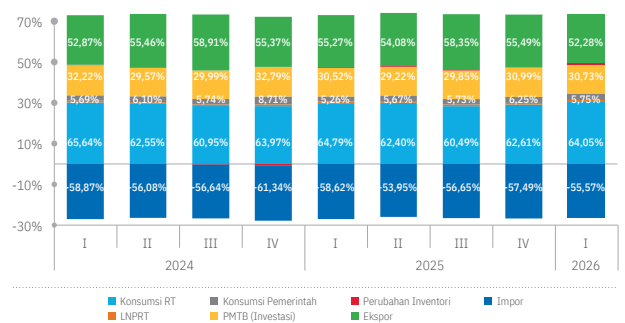
sejak triwulan sebelumnya masih mampu menjaga surplus net ekspor Lampung, sehingga tetap memberikan kontribusi positif terhadap total PDRB Lampung pada triwulan I 2026.

Struktur PDRB Provinsi Lampung dari sisi permintaan pada triwulan I 2026 tetap bertumpu pada Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi sebagai penopang utama. Konsumsi Rumah Tangga memberikan kontribusi terbesar sebesar 64,05%, diikuti oleh Investasi dengan pangsa 30,73% (Grafik 1.3). Di sisi lain, andil komponen domestik lainnya cenderung terbatas, dengan Konsumsi Pemerintah sebesar 5,75% dan Konsumsi LNPR sebesar 1,91%. Sementara itu, komponen eksternal mencatatkan dinamika tersendiri di mana Ekspor berkontribusi sebesar 52,28% terhadap PDRB. Angka ini relatif berimbang dengan pangsa Impor yang mencapai 55,57%. Tingginya porsi impor yang bersifat mengurangi total PDRB mencerminkan masih tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan strategis dalam mengoptimalkan kontribusi net ekspor secara berkelanjutan bagi perekonomian daerah.

1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga (RT)

Kinerja Konsumsi RT Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 menunjukkan peningkatan, didorong oleh meningkatnya permintaan dan mobilitas masyarakat pada periode HBKN Tahun Baru 2026, Imlek, serta Ramadan dan Idulfitri 2026.

Grafik 1.3. Kontribusi PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Lampung



Sumber: BPS, diolah

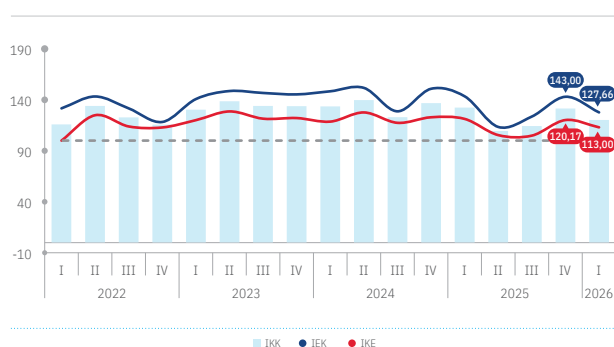
Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Pengeluaran

Komponen Pengeluaran (%year on year)	2024				2025				2026	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Tw I 2026 (%)
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,67	4,69	4,95	5,05	5,06	4,67	4,94	5,10	▲ 5,54	3,45
Pengeluaran Konsumsi LNPR	19,13	13,55	9,32	6,58	2,30	4,67	5,59	6,31	▲ 9,11	0,16
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,67	2,39	2,81	2,16	-1,58	-2,13	4,00	-0,62	▲ 13,84	0,73
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,31	3,33	1,30	0,34	1,26	5,31	6,05	5,41	▼ 4,55	1,38
Ekspor	6,10	14,16	15,48	12,31	12,96	7,50	5,33	3,28	▼ 0,75	0,40
Impor	8,75	13,43	13,28	5,96	9,26	6,73	7,52	2,80	▼ 1,15	0,58
PDRB	3,30	4,80	4,81	5,32	5,47	5,09	5,04	5,54	▲ 5,58	5,58

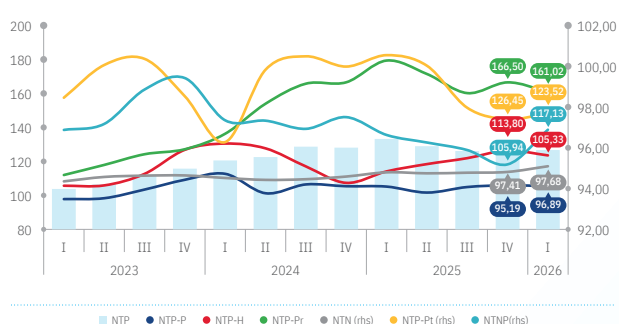
Sumber: BPS, diolah

Pada triwulan I 2026, kinerja Konsumsi RT mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,54% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (5,10%; yoy). Peningkatan tersebut salah satunya tercermin dari sentimen positif masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang kemudian tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan I 2026 yang berada pada zona optimis yakni sebesar 120,33. Optimisme konsumen ini terlihat pada seluruh komponen baik pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), maupun Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang masing-masing tercatat sebesar 113,00 dan 127,66 (Grafik 1.4).

Lebih lanjut, daya beli pekerja di sektor utama Provinsi Lampung, yakni LU pertanian, kehutanan, dan perikanan juga tetap berada pada level tinggi. Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan I 2026 berada pada level 126,63 (Grafik 1.5).

Grafik 1.4. Indeks Keyakinan Konsumen

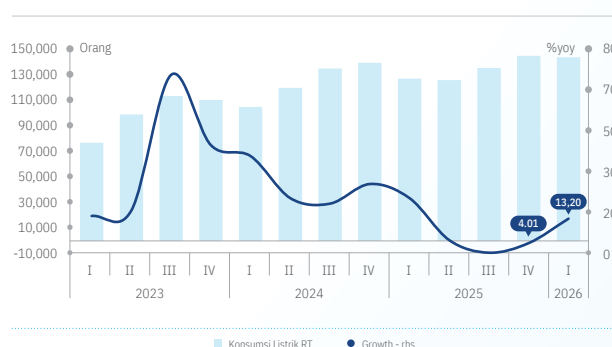
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.5. Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung

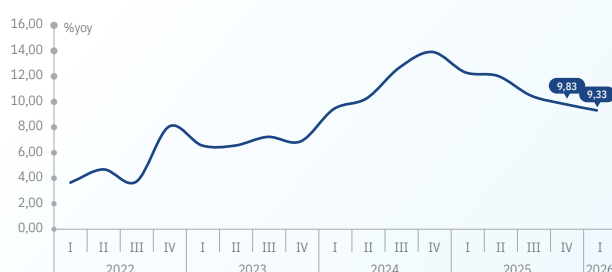
Sumber: BPS, diolah

Perkembangan ini didukung oleh kinerja yang kuat pada subsektor nelayan, di mana nilai tukar nelayan (NTN) pada triwulan I 2026 meningkat menjadi 117,13, dari triwulan sebelumnya yang sebesar 113,80. Peningkatan NTN tersebut utamanya didorong oleh kenaikan Indeks yang Diterima Petani (It), seiring menguatnya harga jual komoditas tangkap utama seperti udang laut. Kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya hasil tangkapan nelayan akibat faktor cuaca musiman di awal tahun, di tengah eskalasi permintaan masyarakat selama periode HBKN.

Peningkatan kinerja konsumsi RT juga tercermin dari *traffic* kedatangan penumpang di Bandara Radin Inten II Lampung. Pada triwulan I 2026, kedatangan penumpang di bandara TKG mencatatkan pertumbuhan 13,20% (yoy), meningkat dari

Grafik 1.6. Perkembangan Kedatangan Penumpang di Bandara Radin Inten II

Sumber: AP II, diolah

Grafik 1.7. Pertumbuhan Penyaluran Kredit Konsumsi

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,01% (yoy), peningkatan seiring berlangsungnya *long festive season* pada momen Tahun Baru, Imlek, serta Ramadan dan Idulfitri 2026 (Grafik 1.6). Penyaluran kredit konsumsi pada triwulan I 2026 juga tetap stabil dengan pertumbuhan sebesar 9,33% (yoy), meski sedikit di bawah angka pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 9,83% (yoy) (Grafik 1.7).

1.1.2 Konsumsi Pemerintah

Kinerja konsumsi pemerintah di Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tumbuh meningkat didorong akselerasi operasional program strategis Pemerintah Pusat di daerah yang semakin *massive*. Pada Triwulan I 2026, Konsumsi Pemerintah mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,84% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 0,62% (yoy). Dari sisi APBN, realisasi pendapatan meski masih berkontraksi 8,14% (yoy), namun membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 17,90% (yoy). Perbaikan kinerja pendapatan didorong oleh perbaikan penerimaan perpajakan yang meski masih berkontraksi 8,71% (yoy), namun membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 17,90% (yoy). Lebih lanjut, kinerja Belanja APBN juga tumbuh 2,60% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 2,47% (yoy). Peningkatan kinerja belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Lampung didorong oleh komponen Transfer ke Daerah (TKD) yang tumbuh 0,73% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 10,54% (yoy), seiring percepatan pembangunan proyek strategis Pemerintah di Provinsi Lampung.

Di sisi lain, kinerja APBD Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tumbuh melambat. Pada periode laporan, kinerja Pendapatan Daerah berkontraksi 62,68% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,37% (yoy), serta triwulan sama tahun sebelumnya yang tumbuh 16,92% (yoy). Perlambatan seiring kinerja PAD yang berkontraksi 71,49% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 16,20% (yoy), serta lebih rendah pula dari triwulan sama tahun sebelumnya yang tumbuh 13,29% (yoy). Lebih lanjut, dari sisi belanja, kinerja Belanja APBD juga berkontraksi 43,53% (yoy), melambat dari triwulan

sebelumnya yang tumbuh 0,77% (yoy), serta triwulan sama tahun sebelumnya yang tumbuh 29,92% (yoy). Perlambatan kinerja Belanja Daerah seiring kinerja Belanja Barang dan Jasa yang berkontraksi 51,34% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 22,53% (yoy), serta triwulan sama tahun sebelumnya yang tumbuh 15,70% (yoy).

Dana Pemerintah ke Daerah (DPK) di perbankan provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tetap tumbuh positif. DPK Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 tetap tumbuh tinggi sebesar 41,70% (yoy), meski sedikit melambat jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 59,98% (yoy) (Grafik 1.8).

1.1.3 Investasi

Kinerja investasi Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 melambat seiring pola musiman awal tahun. Pertumbuhan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 4,55% (yoy), tetap positif meski melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,41% (yoy). Perkembangan tersebut didukung oleh kinerja Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,60% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 43,32% (yoy) (Grafik 1.9).

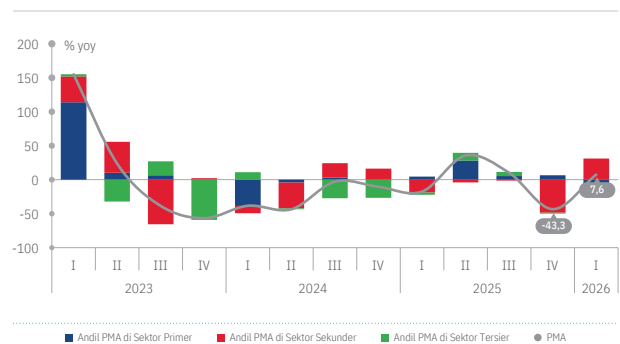
Secara sektoral, kinerja PMA didorong oleh pertumbuhan sektor sekunder sebesar 61,84% (yoy). Kinerja ini ditopang oleh pertumbuhan tinggi pada industri kayu (1748% yoy) serta industri makanan yang tumbuh 43,86% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 65,09% (yoy). Hal ini mencerminkan optimisme investor asing terhadap pengolahan hilir komoditas kayu di daerah Lampung. Di sisi lain, sektor primer berkontraksi 36,27% (yoy), utamanya dipengaruhi oleh subsektor tanaman pangan yang berkontraksi 51,65% (yoy). Penurunan ini sebagai dampak dari transisi masa tanam serta sikap *wait-and-see* investor terhadap kebijakan ketahanan pangan di awal tahun. Namun, sektor primer tetap didukung oleh peningkatan PMA pertambangan sebesar 30,61% (yoy) pasca-nihilnya investasi pada triwulan lalu. Sementara itu, sektor

Grafik 1.8. DPK Pemerintah Daerah



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 1.9. Penanaman Modal Asing di Provinsi Lampung



Sumber: BKPM, diolah

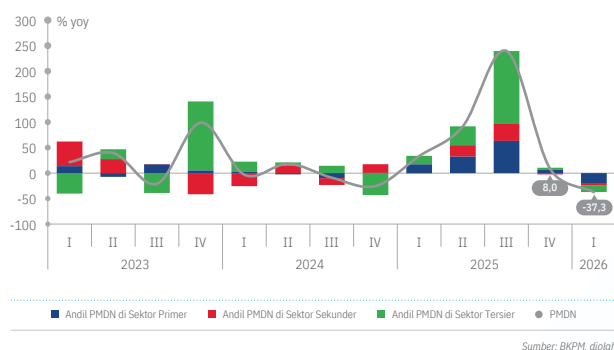
tersier berkontraksi 58,06% (yoy) seiring penurunan tajam pada sektor transportasi dan pergudangan (-80,22% yoy) akibat normalisasi aktivitas logistik pasca-puncak akhir tahun. Meski demikian, investasi jasa tetap tumbuh pada sektor perdagangan (378,62% yoy) serta sektor perumahan dan kawasan industri (391,01% yoy), mencerminkan ekspansi pada sektor properti dan jasa komersial.

Di sisi lain, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 berbalik arah menjadi berkontraksi 37,28% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 8,03% (yoy) (Grafik 1.11). Secara sektoral, sektor primer mencatatkan kontraksi 77,94% (yoy) akibat penurunan realisasi di hampir seluruh komponen, kecuali subsektor perikanan yang tumbuh sebesar 184,01% (yoy). Pada sektor sekunder, PMDN berkontraksi 17,04% (yoy), dipengaruhi oleh industri makanan yang berkontraksi 31,81% (yoy). Meskipun terdapat momentum tahun baru dan persiapan Ramadan - Idulfitri, penurunan ini diperkirakan terjadi karena pelaku usaha domestik telah melakukan penguatan kapasitas produksi secara masif pada triwulan sebelumnya (*front-loading*), sehingga pada awal tahun cenderung berfokus pada utilisasi kapasitas yang ada dibandingkan melakukan investasi modal baru. Selanjutnya, sektor tersier berkontraksi 26,84% (yoy) seiring koreksi dalam pada sektor konstruksi sebesar 48,25% (yoy) pasca-penyelesaian proyek-proyek infrastruktur besar di akhir tahun sebelumnya.

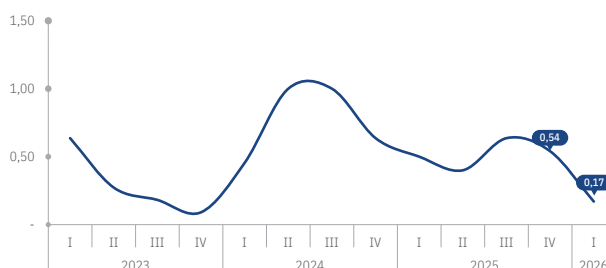
Melambatnya kinerja investasi pada triwulan I 2026 juga tercermin dari hasil *liaison* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung. *Likert scale* investasi mengalami penurunan menjadi sebesar 0,17 dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,54 (Grafik 1.11).

Kendati demikian, kredit investasi pada triwulan I 2026 mengalami peningkatan. Kredit investasi mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,64% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,34% (yoy). **Kinerja kredit konstruksi juga menunjukkan perbaikan.**

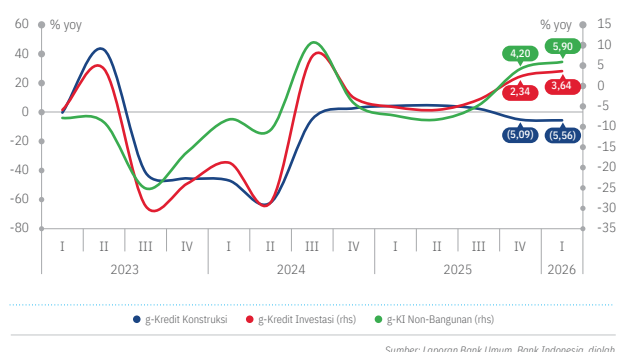
Grafik 1.10. Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Lampung



Grafik 1.11. Perkembangan Likert Scale Investasi



Grafik 1.12. Kredit Investasi



Meski masih berkontraksi 4,54% (yoy), namun kinerja penyaluran kredit konstruksi tersebut membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 5,09% (yoy) (Grafik 1.12).

1.1.4 Ekspor dan Impor

Kinerja ekspor Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 melambat, seiring dinamika harga komoditas global. Secara tahunan, kinerja ekspor tumbuh 0,75% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,01% (yoy). Berdasarkan data DJBC, harga komoditas CPO dan batubara menguat tipis, namun harga karet dan kakao terkoreksi tajam akibat pelemahan permintaan global. Penurunan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao sebesar 30,44% (mtm) menjadi 3.722 USD/MT turut menekan Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung, khususnya subsektor perkebunan rakyat dan hortikultura.

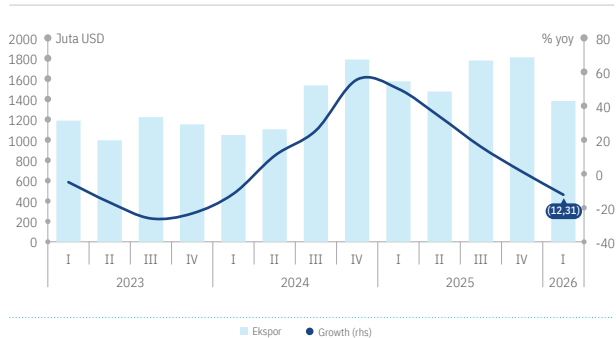
Dari sisi harga, harga kopi robusta sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan Provinsi Lampung tercatat sebesar USD4,03/kg atau berkontraksi 28,44% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 9,37% (yoy). Kontraksi lebih lanjut dari harga kopi robusta tersebut utamanya dipengaruhi oleh berlanjutnya normalisasi pasokan di pasar global seiring membaiknya proyeksi produksi dari negara produsen utama dunia, di tengah fase awal panen domestik (*early harvest*). Selain itu, tingginya curah hujan di wilayah sentra pada awal tahun juga turut menurunkan kualitas pengeringan biji kopi di tingkat

petani, yang berimplikasi pada pelemahan harga beli eksportir. Harga CPO juga masih berkontraksi 0,79% (yoy), meski membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 9,05% (yoy). Kondisi ini kemudian tercermin dari nilai ekspor Provinsi Lampung yang pada triwulan I 2026 berkontraksi 12,31% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,24% (yoy) (Grafik 1.13).

Koreksi kinerja ekspor kopi Lampung berlanjut pada triwulan I 2026 akibat tekanan dari sisi harga global dan volume produksi domestik. Nilai ekspor luar negeri komoditas kopi, teh, dan rempah berkontraksi 50,94% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 1,85% (yoy) (Grafik 1.14). Berdasarkan laporan terkini dari International Coffee Organization (ICO), berlanjutnya penurunan ini sejalan dengan akselerasi pemulihan pasokan kopi robusta di pasar internasional, terutama didorong oleh realisasi panen raya di Vietnam dan Brasil. Melimpahnya stok global tersebut memicu penurunan harga internasional signifikan. Di sisi hulu domestik, tekanan juga disebabkan oleh tingginya curah hujan di sentra perkebunan Lampung pada awal tahun yang menghambat proses pascapanen, sehingga menurunkan kualitas biji kopi dan membatasi volume pasokan layak ekspor.

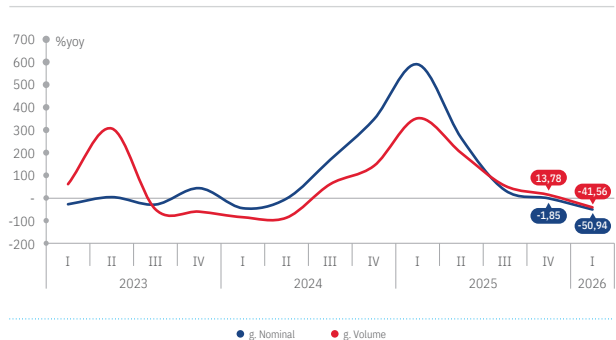
Sejalan dengan nilai ekspor kopi robusta yang melambat, kinerja nilai ekspor batubara Lampung pada triwulan I 2026 juga kembali menunjukkan perlambatan. Pada triwulan I

Grafik 1.13. Perkembangan Ekspor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung



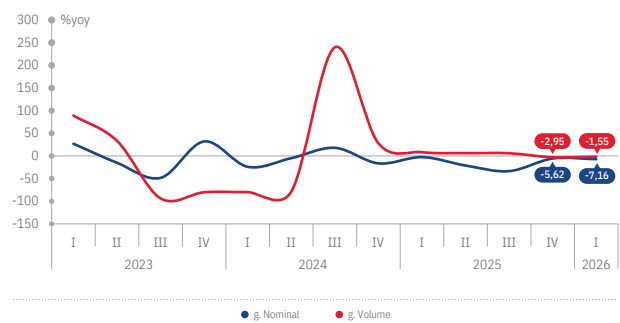
Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.14. Perkembangan Nominal dan Volume Ekspor Kopi, Teh, dan Rempah-rempah



Sumber: DJBC, diolah

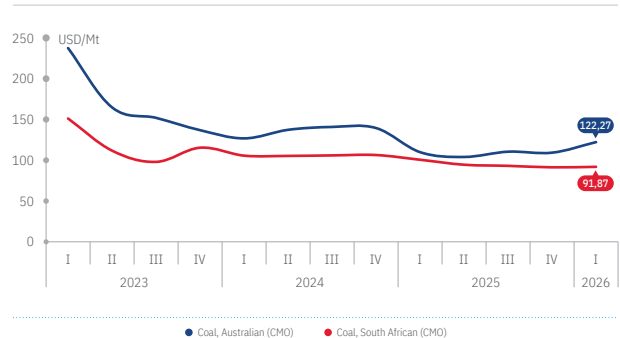
Grafik 1.15. Perkembangan Nominal dan Volume Ekspor Bahan Bakar Mineral



Sumber: DJBC, diolah

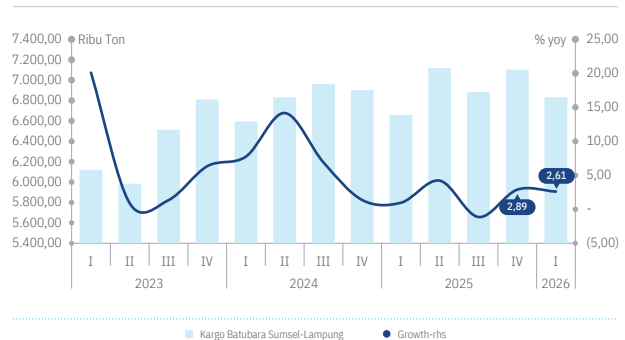
2026, nilai ekspor batubara berkontraksi 7,16% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 5,62% (yoy) (Grafik 1.15). Kendati demikian, penurunan nilai ekspor komoditas ini terjadi di tengah kenaikan harga acuan global yang pada triwulan I 2026 rata-rata sebesar USD107,07/mt, dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD100,30/mt (Grafik 1.16), yang diikuti pula oleh perbaikan volume ekspor yang meski masih berkontraksi 1,55% (yoy), namun membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 2,95% (yoy). Divergensi ini mengindikasikan adanya efek jeda waktu (*lagging effect*) dalam realisasi harga kontrak dagang, di mana pengiriman batubara pada triwulan berjalan masih menggunakan harga kesepakatan lama yang relatif lebih rendah. Akibatnya, meskipun volume pengiriman mulai pulih untuk

Grafik 1.16. Perkembangan Ekspor Komoditas Kopi, Teh dan Rempah



Sumber: World Bank, diolah

Grafik 1.17. Volume Angkutan Kargo Batubara Sumatera Selatan - Lampung



Sumber: World Bank, diolah

memenuhi komitmen ekspor, nilai nominal yang dibukukan daerah masih mengalami kontraksi yang lebih dalam. Lebih lanjut, **arus pasokan batubara yang melalui Lampung juga tercatat mengalami perlambatan**, hal ini tercermin dari volume pengiriman batubara Sumatera Selatan-Lampung yang tumbuh 2,61% (yoy), sedikit melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,89% (yoy) (Grafik 1.17).

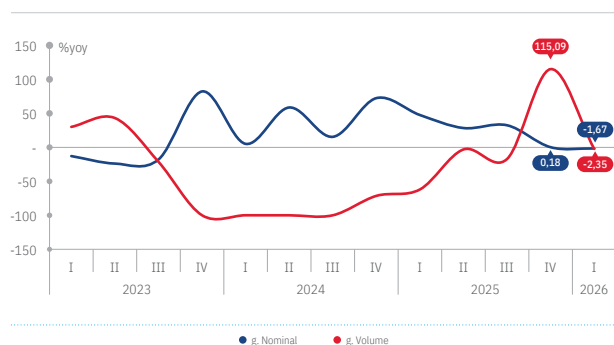
Lebih lanjut, **kinerja ekspor minyak kelapa sawit Lampung pada triwulan I 2026 juga mengalami perlambatan di tengah perbaikan harga**. Nilai ekspor minyak hewan/nabati terkontraksi 1,67% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,68% (yoy). Pertumbuhan tersebut juga sejalan dengan volume ekspor minyak hewan/nabati yang terkontraksi 2,35% (yoy), setelah tumbuh tinggi pada triwulan sebelumnya (115,09%; yoy) (Grafik 1.18). Kontraksi pada volume dan nilai ekspor tersebut terjadi di tengah perbaikan harga CPO di pasar internasional, di mana kontraksi harga CPO dunia tercatat membaik dari sebelumnya terkontraksi 9,05% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi terkontraksi 0,79% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 1.19). Terhentinya akselerasi volume ekspor CPO Lampung utamanya disebabkan oleh keterbatasan pasokan hulu akibat siklus musiman produksi rendah (*low crop season*) serta dampak lanjutan anomali cuaca pada periode sebelumnya yang menahan produktivitas tanaman sawit daerah. Di sisi lain, penguatan harga CPO global yang belum mampu mengompensasi penurunan nilai ekspor ini juga dipengaruhi

oleh peningkatan kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik (*Domestic Market Obligation*) oleh Pemerintah guna menjamin pasokan minyak goreng dalam negeri selama periode HBKN, sehingga membatasi alokasi CPO untuk pasar ekspor.

Realisasi kinerja impor Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 juga tumbuh melambat. Total impor pada triwulan I 2026 mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,15% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,55% (yoy). Meskipun demikian, nilai nominal impor luar negeri Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 mencapai USD286,92 juta atau tumbuh akseleratif sebesar 25,84% (yoy), meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 18,56% (yoy) (Grafik 1.20). Dari sisi volume, total impor tercatat sebesar 444,89 ribu ton atau masih terkontraksi 3,39% (yoy), namun membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 11,89% (yoy) (Grafik 1.21). Perbaikan kinerja impor tersebut utamanya didorong oleh lonjakan pada komponen impor barang modal dan pemulihan volume impor barang konsumsi.

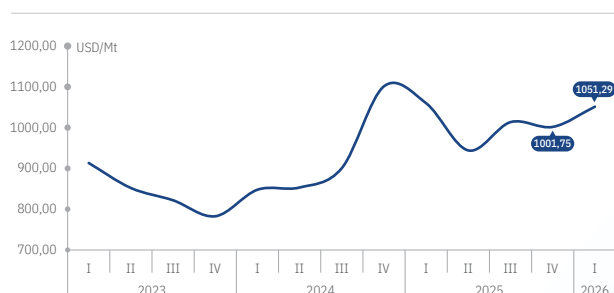
Realisasi impor barang konsumsi pada triwulan I 2026 mulai menunjukkan pemulihan aktivitas yang tercermin dari peningkatan volume impor. Kelompok ini mencatatkan pertumbuhan volume sebesar 55,09% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 66,49% (yoy). Perbaikan volume didorong oleh peningkatan pengadaan beberapa komoditas pangan olahan guna menjaga ketersediaan pasokan

Grafik 1.18. Perkembangan Ekspor Lemak Dan Minyak Hewan/Nabati



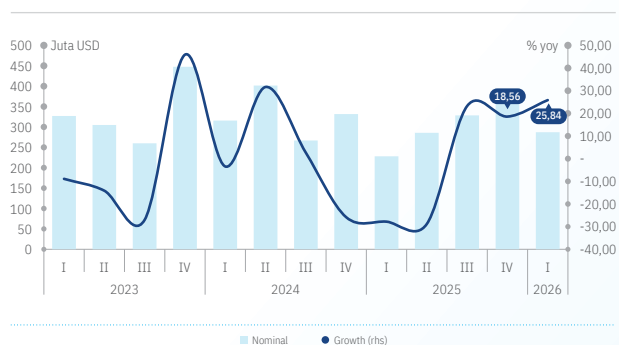
Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.19. Perkembangan Harga CPO Dunia



Sumber: Bank Dunia, diolah

Grafik 1.20. Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung



Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.21. Perkembangan Volume Ekspor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung



Sumber: DJBC, diolah

domestik serta memenuhi tren konsumsi masyarakat menjelang periode HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026. Di sisi lain, nilai nominal impor barang konsumsi masih tercatat terkontraksi 56,08% (yoy), mengindikasikan pergeseran pengadaan pada komoditas dengan harga yang relatif lebih rendah di pasar global.

Realisasi impor bahan baku dan penolong masih tertahan seiring penyesuaian kebutuhan input industri pengolahan di awal tahun. Pada triwulan I 2026, realisasi volume impor bahan baku dan penolong masih terkontraksi 5,31% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 7,08% (yoy). Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh masih terkontraksinya volume impor *sugars and sugar confectionery* (HS 17) sebesar 59,95% (yoy), seiring optimalnya utilisasi stok sisa produksi tahun lalu. Selanjutnya, volume impor *cereals* (HS 10) dan residu industri makanan (HS 23) masing-masing mencatatkan pertumbuhan 66,38% (yoy) dan 16,43% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya seiring pemenuhan bahan baku utama pakan ternak guna mendukung sektor peternakan dan perikanan berskala industri besar di Provinsi Lampung. Lebih lanjut, nilai impor bahan baku tercatat tumbuh positif pada beberapa komoditas strategis seperti pupuk (HS 31) yang tumbuh 28,18% (USD, yoy) dan besi baja (HS 72) sebesar 127,95% (USD, yoy), yang mencerminkan upaya penguatan *input* hulu pertanian dan konstruksi di Lampung.

Sejalan dengan arah penguatan investasi fisik korporasi, realisasi impor barang modal mencatatkan pertumbuhan yang signifikan pada triwulan I 2026. Setelah sempat terkontraksi pada triwulan sebelumnya, volume impor barang modal tumbuh tinggi sebesar 291,42% (yoy), yang diikuti oleh lonjakan nilai nominal hingga mencapai 826,10% (yoy). Secara komoditas, akselerasi ini terutama didorong oleh peningkatan masif impor mesin dan peralatan mekanik (HS 84) yang tumbuh 186,72% (Kg, yoy) serta kendaraan selain kereta api (HS 87) yang melonjak 146,13% (Kg, yoy). Perkembangan ini memberikan sinyal kuat atas optimisme pelaku usaha dalam melakukan ekspansi kapasitas produksi dan pengadaan alat modal, yang diperkirakan akan menjadi motor penggerak *output* perekonomian Provinsi Lampung pada periode mendatang.

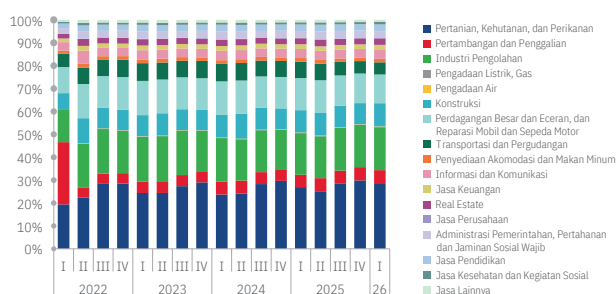
1.2 Analisis PDRB Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 terutama ditopang oleh pertumbuhan sektor primer dan tersier, di tengah sektor sekunder yang tumbuh terbatas. Pertumbuhan sektor primer didukung oleh LU Pertanian sebagai LU utama Provinsi Lampung yang tumbuh 9,89% (yoy), meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,09% (yoy), didorong oleh puncak panen raya komoditas tanaman pangan, utamanya padi dan jagung. Selanjutnya, sektor tersier juga tumbuh didorong oleh pertumbuhan LU Perdagangan dan LU Akmamin yang

Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Lapangan Usaha

Lapangan Usaha (%year on year)	2024				2025				2026	Sumber Pertumbuhan Tw I 26' (%)
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-11,19	0,21	-1,10	3,62	5,44	1,89	7,74	5,65	9,89	2,20
Pertambangan dan Penggalian	11,37	6,01	2,78	-0,04	-3,32	3,00	-1,71	-2,48	-1,91	-0,09
Industri Pengolahan	6,65	4,78	10,67	14,16	8,75	9,97	4,74	6,54	3,28	0,61
Pengadaan Listrik, Gas	-16,25	-9,98	-4,61	4,71	7,23	-4,71	-6,85	-5,58	1,83	0,00
Pengadaan Air	-3,27	0,28	0,15	1,59	4,93	2,50	-0,13	2,98	-3,85	0,00
Konstruksi	6,86	8,22	0,64	-3,38	0,96	6,14	6,96	8,32	4,96	0,51
Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor	8,58	5,36	7,87	7,02	6,46	7,33	3,98	3,97	6,91	1,06
Transportasi dan Pergudangan	11,44	14,87	10,29	4,06	8,20	7,52	4,62	8,41	6,11	0,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,67	3,77	5,57	6,22	7,29	8,06	7,35	8,58	12,43	0,21
Informasi dan Komunikasi	9,34	6,26	9,37	9,54	7,83	3,66	4,33	2,46	3,23	0,20
Jasa Keuangan	7,70	9,12	3,22	-0,35	3,43	1,14	3,23	16,46	10,46	0,21
Real Estate	9,84	6,29	7,19	4,01	6,76	2,83	0,38	5,95	1,03	0,03
Jasa Perusahaan	9,91	9,44	9,10	8,53	3,79	7,46	1,34	4,56	4,21	0,01
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	15,94	7,00	5,37	0,74	0,87	-1,18	3,23	6,39	2,01	0,06
Jasa Pendidikan	3,73	0,24	0,88	1,19	2,20	2,17	1,80	1,23	0,23	0,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,95	9,26	9,23	6,63	7,84	-0,03	2,51	-0,76	2,50	0,03
Jasa Lainnya	9,05	9,89	9,50	13,85	9,66	9,18	3,40	7,60	8,39	0,10
PDRB	3,30	4,80	4,81	5,32	5,47	5,09	5,04	5,54	5,58	5,58

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.22. Pangsa PDRB Lapangan Usaha


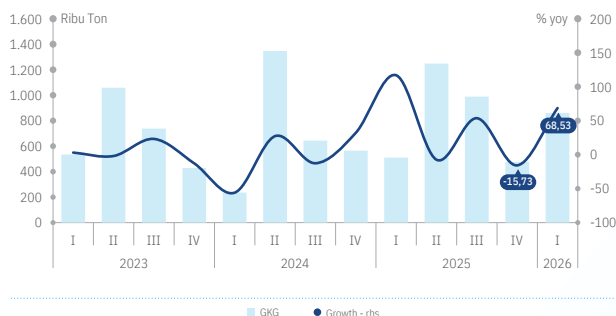
Sumber: BPS, diolah

masing-masing tumbuh 6,91% (yoy) dan 12,43% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (3,90%; yoy dan 8,58%; yoy) didukung oleh tingginya permintaan dan mobilitas masyarakat pada momentum Tahun Baru, Imlek, serta Ramadan dan Idulfitri 2026 yang seluruhnya berlangsung pada triwulan I 2026.

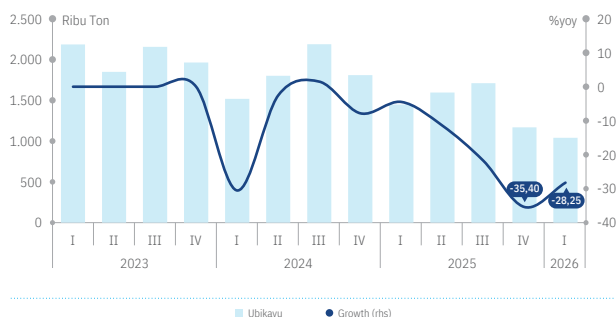
PDRB Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 masih didominasi oleh tiga LU utama, yaitu LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; LU Industri Pengolahan; dan LU Perdagangan Besar dan Eceran yang masing-masing berkontribusi sebesar 25,28%; 18,97% dan 15,03% terhadap PDRB (Grafik 1.22).

1.2.1 LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 menunjukkan peningkatan seiring musim panen raya komoditas tanaman pangan. Pada triwulan I 2026, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh tinggi sebesar 9,89% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (5,65%; yoy). Kinerja tersebut didukung oleh puncak panen raya komoditas tanaman pangan, utamanya padi yang merupakan komoditas utama Provinsi Lampung. Hal ini tercermin dari produksi Gabah Kering Giling (GKG) Provinsi Lampung berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) BPS pada triwulan I 2026 yang sebesar 859 ribu ton, atau mencatatkan pertumbuhan 68,52% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 15,73% (yoy) (Grafik 1.23). Selain

Grafik 1.23. Produksi Gabah Kering Giling


Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.24. Produksi Jagung dan Ubi Kayu


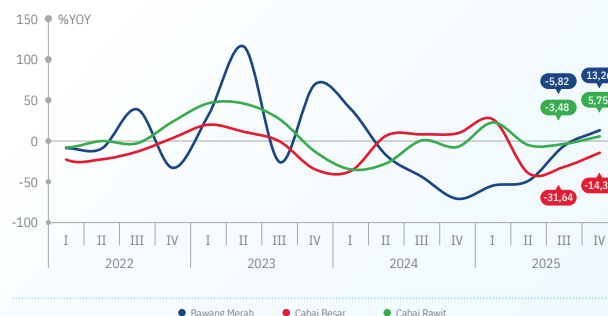
Sumber: DKPTPH Provinsi Lampung, diolah

itu, produksi ubi kayu pada periode laporan juga mencatatkan perbaikan kinerja, meski masih terkontraksi 28,25% (yoy), namun membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 35,40% (yoy). Produksi tanaman jagung juga tetap mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 24,82% (yoy) (Grafik 1.24).

Bawang merah dan cabai besar juga menunjukkan peningkatan produksi. Pada triwulan I 2026, produksi bawang merah dan cabai besar masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 45,62% (yoy) dan 8,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 13,26% (yoy) dan -14,34% (yoy) (Grafik 1.25).

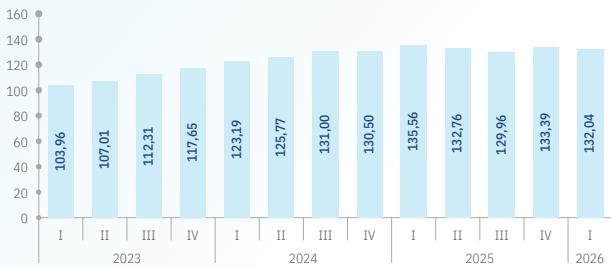
Dari sisi pendapatan usaha tani, margin petani masih relatif terjaga meskipun terdapat tekanan dari dinamika harga dan kondisi cuaca. Rata-rata Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 132,04, sedikit di bawah NTUP pada triwulan sebelumnya yang sebesar 133,39 (Grafik 1.26). Kendati demikian, *Southern Oscillation Index* (SOI) pada periode laporan kembali menunjukkan peningkatan, meski masih berada pada level *La Nina* rendah, kembali menunjukkan adanya peningkatan curah hujan di atas normal (Grafik 1.27).

Kinerja penyaluran kredit terhadap sektor pertanian meningkat. Pada triwulan I 2026, penyaluran kredit pada LU Pertanian tumbuh 0,15% (yoy), meningkat dan berbalik arah dari triwulan

Grafik 1.25. Produksi Tanaman Hortikultura


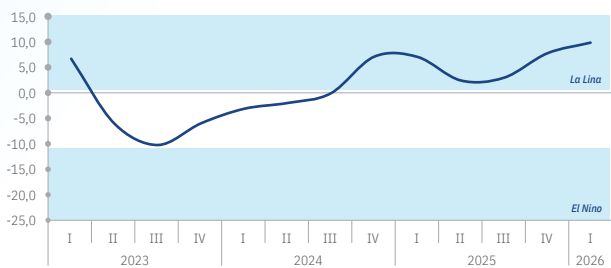
Sumber: DKPTPH Provinsi Lampung, diolah

Grafik 1.26. Nilai Tukar Usaha Pertanian



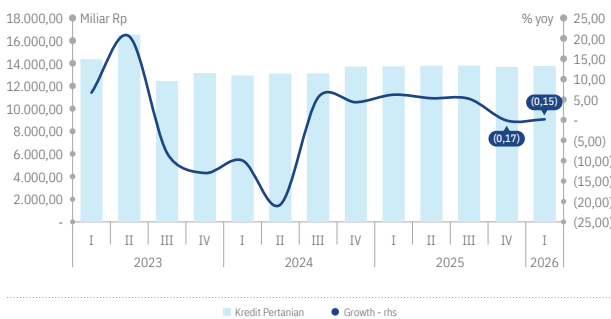
Sumber: SKDU Bank Indonesia

Grafik 1.27. Southern Oscillation Index



Sumber: BOM Australia

Grafik 1.28. Kredit LU Pertanian



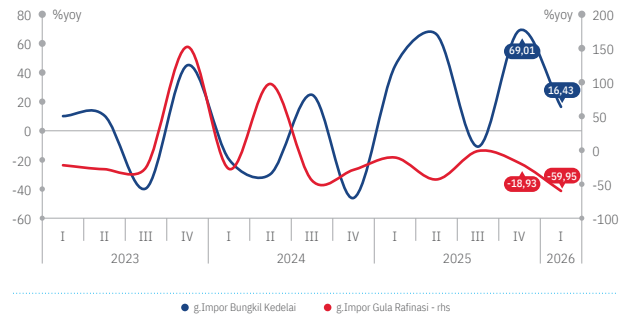
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

sebelumnya yang berkontraksi 0,17% (yoy) (Grafik 1.28). Di sisi lain, kinerja penyaluran kredit perikanan kembali menunjukkan perlambatan dan berkontraksi 14,61% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 5,62% (yoy).

1.2.2 LU Industri Pengolahan

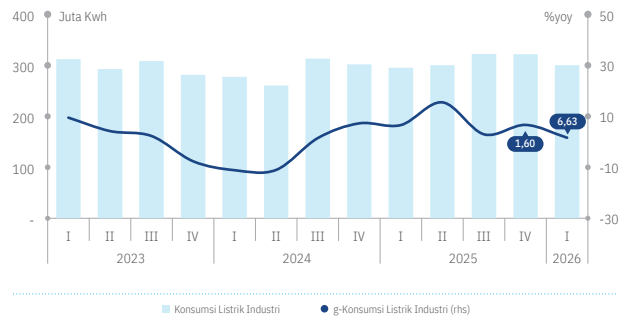
LU Industri Pengolahan Provinsi Lampung tetap mencatatkan kinerja positif pada triwulan pertama tahun 2026. Pada triwulan I 2026, LU Industri Pengolahan tumbuh 3,28% (yoy), tetap positif meski melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,54% (yoy) seiring front loading industri pada akhir tahun 2025 untuk memenuhi permintaan *long festive season* yang terus berlanjut hingga akhir triwulan I 2026. Hal ini tercermin dari volume impor beberapa bahan baku

Grafik 1.29. Pertumbuhan Volume Impor Bahan Baku Industri



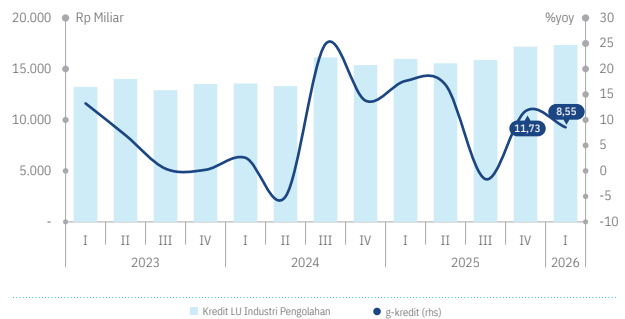
Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.30. Pertumbuhan Konsumsi Listrik Industri



Sumber: PT PLN, diolah

Grafik 1.31. Pertumbuhan Penyaluran Kredit Industri



Sumber: Bank Indonesia, diolah

industri yakni volume impor gula rafinasi yang berkontraksi 59,95% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 18,93% (yoy). Selanjutnya, impor bungkil kedelai juga tumbuh melambat menjadi 16,43% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 69,01% (yoy) (Grafik 1.29).

Perkembangan konsumsi energi juga turut mengonfirmasi perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan. Konsumsi listrik industri Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tumbuh 1,60% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,63% (yoy) (Grafik 1.30). Dari sisi pembiayaan, realisasi penyaluran kredit pada LU Industri Pengolahan juga melambat dengan pertumbuhan sebesar 8,55% (yoy) pada triwulan I 2026, setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 11,73% (yoy)

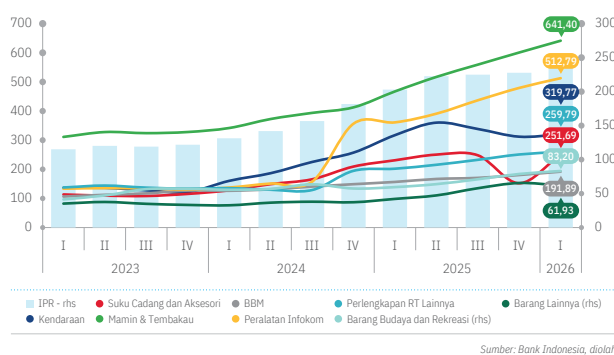
(Grafik 1.31). Lebih lanjut, *Prompt Manufacturing Index* (PMI) Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 64,17%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 68,89%.

1.2.3 LU Perdagangan Besar dan Eceran

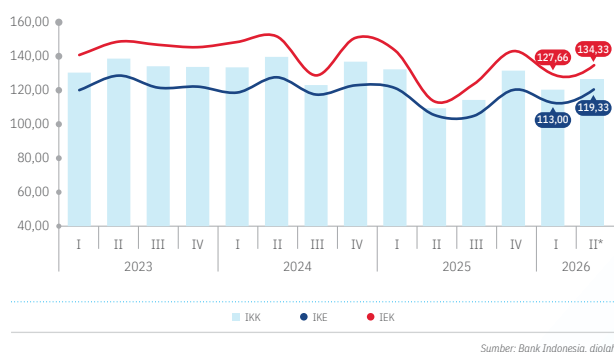
Tingginya permintaan dan aktivitas masyarakat pada *long festive season* mendorong peningkatan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026. LU PBE mencatatkan pertumbuhan 6,91% (yoy) pada triwulan I 2026, meningkat dari pertumbuhan kinerja pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,97% (yoy). Hal ini salah satunya tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Provinsi Lampung yang pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 240,84, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 227,74, peningkatan ini didukung oleh seluruh komponen, mulai dari IPR kendaraan, makanan dan minuman, hingga perlengkapan rumah tangga lainnya (Grafik 1.32). Perkembangan kinerja LU PBE juga turut didukung oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Provinsi Lampung yang pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 120,33 atau tetap berada pada level optimis (Grafik 1.33).

Lebih lanjut, kinerja positif juga turut tercermin dari total penjualan kendaraan bermotor di Provinsi Lampung yang pada triwulan I 2026 tumbuh 9,16% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 3,35% (yoy) (Grafik 1.34).

Grafik 1.32. Perkembangan Indeks Penjualan Riil Lampung



Grafik 1.33. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Lampung



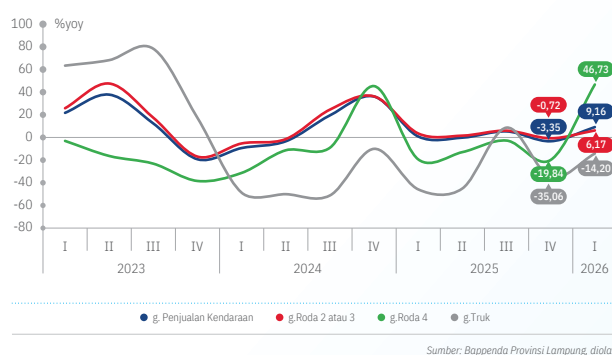
Peningkatan ini didukung oleh penjualan kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 atau 3 yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 46,73% (yoy) dan 6,17% (yoy), membaik dan berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang masing-masing terkontraksi 19,84% (yoy) dan 0,72% (yoy). Lebih lanjut, penjualan kendaraan jenis truk juga menunjukkan perbaikan kinerja, meski masih tercatat kontraksi sebesar 14,20% (yoy), namun membaik jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 35,06% (yoy).

Penyaluran kredit pada LU PBE Provinsi Lampung juga meningkat. Pada triwulan I 2026, meski masih terkontraksi 2,06% (yoy), namun kinerja penyaluran kredit LU PBE Provinsi Lampung membaik jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,98% (yoy) (Grafik 1.35).

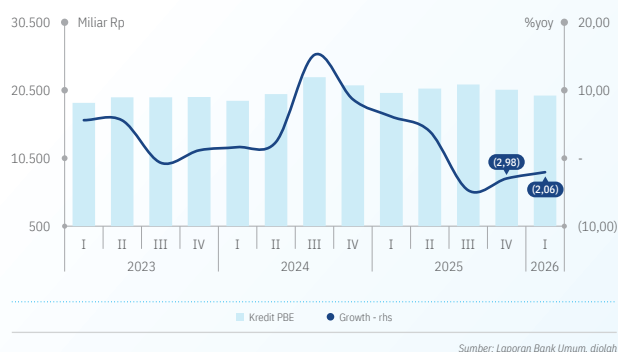
1.2.4 LU Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi melambat seiring pola musiman awal tahun. Pada triwulan I 2026, LU Konstruksi mencatatkan pertumbuhan 4,96% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,32% (yoy). Hal ini salah satunya tercermin dari pengadaan semen di Provinsi Lampung yang pada triwulan I 2026 tumbuh 12,56% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 14,39% (yoy) (Grafik 1.36).

Grafik 1.34. Perkembangan Penjualan Kendaraan



Grafik 1.35. Kredit LU PBE



Selanjutnya, penyaluran kredit pada LU Konstruksi terkontraksi 5,56% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 5,09% (yoy) (Grafik 1.37).

Kendati demikian, di tengah pertumbuhan PDRB sektor konstruksi yang mengalami perlambatan akibat pola musiman awal tahun, aktivitas pembangunan di lapangan dipastikan tetap berjalan berkesinambungan. Keberlanjutan ini utamanya ditopang oleh percepatan penyelesaian sejumlah proyek strategis, khususnya optimalisasi lahan dan infrastruktur irigasi di Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya ketahanan pangan. Berdasarkan data terkini hingga Maret 2026, program revitalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi di Lampung menunjukkan akselerasi fisik, di mana beberapa Daerah Irigasi (DI) utama, seperti DI Sekampung dan jaringan irigasi rawa Tulang Bawang, telah menyentuh kisaran 68% hingga 72% guna menekan angka kehilangan air (water loss) di bawah 25%. Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mengoptimalkan realisasi anggaran rehabilitasi pada 2026 melalui penguatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) berbasis padat karya serta modernisasi pengawasan via e-PAKSI, menunjukkan bahwa fokus pemeliharaan dan konektivitas infrastruktur eksisting tetap berjalan demi mendukung produktivitas pertanian lokal menjelang musim tanam gadu.

Sejalan dengan itu, aktivitas pembangunan swasta juga turut menopang kinerja LU Konstruksi agar tetap bergerak positif di tengah pola musiman awal tahun. Permintaan terhadap sektor

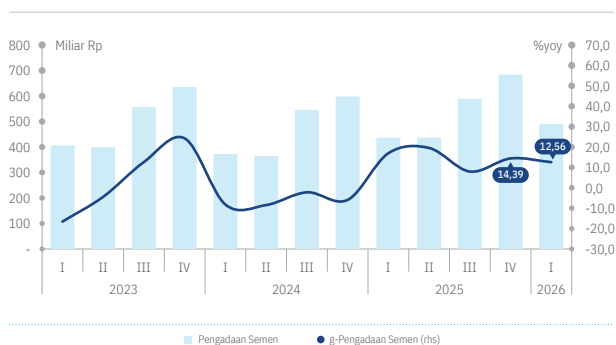
properti, perumahan, dan proyek infrastruktur penunjang usaha yang terjaga memberikan keyakinan bagi pelaku swasta untuk melanjutkan agenda ekspansi konstruksi. Hal ini juga terkonfirmasi oleh Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, di mana Saldo Bersih Tertimbang (SBT) realisasi LU Konstruksi pada triwulan I 2026 sebesar 1,80%, stabil dari triwulan sebelumnya.

1.2.5 LU Transportasi dan Pergudangan

Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan tetap tumbuh positif pada triwulan I 2026. Sejalan dengan tingginya mobilitas masyarakat pada periode *long festive season* yang berlangsung pada triwulan I 2026, LU Transportasi dan Pergudangan tetap tumbuh 6,11% (yoy), meski tidak setinggi pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (8,41%; yoy).

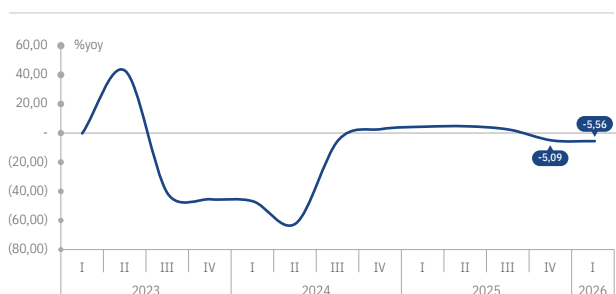
Tetap baiknya kinerja LU Transportasi dan Pergudangan tercermin dari pertumbuhan jumlah penumpang di seluruh moda angkutan, salah satunya seiring penyaluran insentif Pemerintah pada periode HBKN Ramadan Idulfitri 2026. Jumlah penumpang moda angkutan udara, kereta api, dan angkutan laut pada triwulan I 2026 masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 11,79% (yoy), 17,28% (yoy), dan 43,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 4,72% (yoy), 5,36% (yoy), dan 10,69% (yoy) (Grafik 1.38). Di sisi lain, seiring optimalisasi kelancaran perjalanan masyarakat pada periode HBKN Ramadan dan Idulfitri, pertumbuhan angkutan

Grafik 1.36. Perkembangan Pengadaan Semen Provinsi Lampung



Sumber: SKDU, diolah

Grafik 1.37. Kredit Konstruksi



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 1.38. Perkembangan Penumpang Angkutan Udara, Laut dan Kereta Api



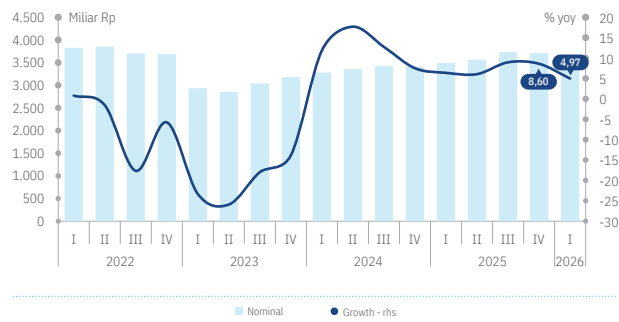
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.39. Perkembangan Barang Angkutan Udara, Laut dan Kereta Api



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.40. Kredit LU Transportasi, Pergudangan dan Infokom



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

barang melambat dengan tercatat tumbuh 15,59% (yoy) pada triwulan I 2026, setelah pada triwulan sebelumnya mencatatkan pertumbuhan sebesar 17,99% (yoy) (Grafik 1.39).

Dari sisi pembiayaan, dukungan intermediasi perbankan terhadap LU Transportasi dan Pergudangan juga tumbuh melambat. Hal ini tecermin dari pertumbuhan kredit LU Transportasi, Pergudangan, dan Infokom yang sebesar 4,97% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit pada triwulan sebelumnya yang sebesar 8,60% (yoy) (Grafik 1.40).

BOKS 1

Analisis Komoditas Ekspor Utama Lampung

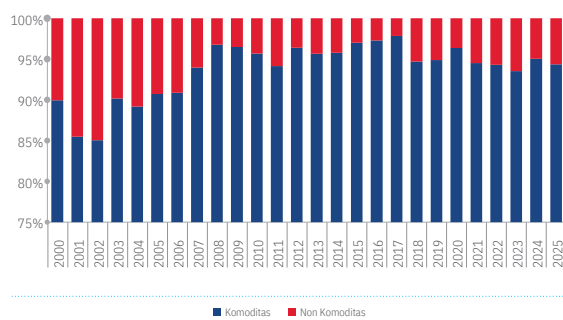
Provinsi Lampung merupakan salah satu komoditas SDA ekspor yang utama. Komoditas yang berasal dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Lampung mengingat hampir seluruhnya mendominasi perdagangan internasional melalui ekspor. Hal ini menjadikan Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah *strongly commodity-dependent* di Indonesia. UNCTAD (2021) menyatakan bahwa beberapa negara yang ekspornya memiliki ketergantungan yang tinggi pada komoditas akan cenderung terperangkap (trapped) pada kondisi tersebut dalam jangka waktu yang lama. Beberapa literatur (Sach & Werner 2001, Sala-i-Martin & Subramaniam 2003, Aresky & Ploegh 2007) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, suatu daerah commodity dependent akan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dan stagnan, struktur fundamental ekonomi yang tidak terdiversifikasi, tingkat human development yang rendah dan volatilitas pendapatan yang tinggi. Terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini yaitu (1) demand dan supply komoditas utama memiliki sifat price-inelastic yang berdampak pada tingginya fluktuasi harga komoditas dan ketidakstabilan pendapatan ekspor, yang pada akhirnya berpengaruh pada stabilitas perekonomian, (2) fenomena Dutch disease yaitu booming sektor komoditas berdampak pada terserapnya seluruh sumber daya pada sektor komoditas dan menurunkan aktifitas ekonomi pada sektor non komoditas (sektor industri) yang memiliki *backward* dan *forward* linkage yang tinggi serta tingkat produktifitas tenaga kerja yang tinggi pada perekonomian, serta (3) dominasi sektor komoditas mengurangi insentif investasi pada *human*

capital accumulation mengingat sektor komoditas hanya membutuhkan tenaga kerja yang tidak terampil (*unskilled labor*). Dengan demikian perekonomian Lampung memerlukan transformasi struktural yang bertujuan agar perekonomian lebih terdiversifikasi sehingga dapat keluar dari *commodity trap*.

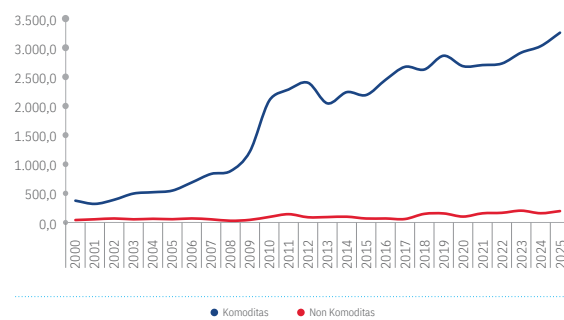
Boks ini menjelaskan bagaimana kinerja perdagangan ekspor komoditas utama SDA Provinsi Lampung sejak tahun 2000 – 2025. Tujuan analisis adalah untuk mengetahui jenis komoditas penghasil ekspor yang memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung. Pengolahan data menggunakan metode yang digunakan oleh Hausman et al (2005) melalui perhitungan PRODY yang bertujuan untuk mengetahui struktur komoditas utama ekspor Lampung yang memiliki tingkat produktifitas yang tinggi. PRODY dihitung dari perkalian antara pendapatan per kapita provinsi dan rasio antara komoditas ekspor tertentu dengan total ekspor. Dengan demikian PRODY merupakan indikator produktifitas yang dikaitkan dengan komoditas ekspor. Semakin tinggi PRODY pada suatu komoditas maka semakin tinggi kontribusi komoditas tersebut pada ekspor dan perekonomian Lampung.

Hasil pengolahan pada grafik 1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2000 dengan menggunakan penggolongan berdasarkan SITC, produk komoditas SDA hampir mendominasi ekspor Lampung. Ekspor komoditas terus mengalami peningkatan sejak tahun 2000 dimana pada tahun 2000 sektor komoditas menguasai 90% ekspor Lampung dan pada tahun 2025 meningkat hingga

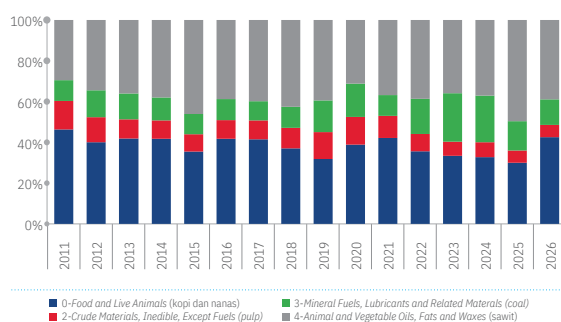
Grafik 1. Komposisi Ekspor Lampung 2000 – 2025



Grafik 2. PRODY (USD)



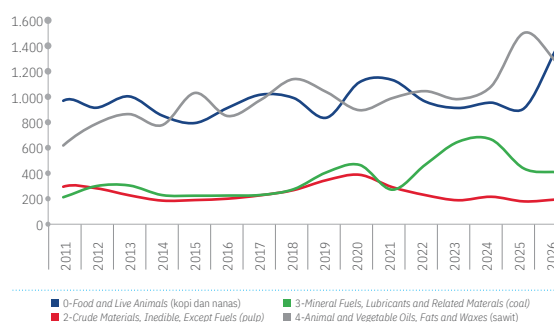
Grafik 3. Komposisi Jenis Komoditas Utama Ekspor



mencapai hampir 95% dari total ekspor. Tingginya dominasi tersebut menyebabkan ekspor komoditas memiliki tingkat PRODY yang sangat tinggi dibanding sektor non komoditas. Pada tahun 2025, produktifitas ekspor komoditas mencapai \$ 3.250, jauh di atas ekspor non komoditas yang hanya mencapai \$195. Dengan demikian sektor komoditas memiliki tingkat produktifitas yang paling tinggi dalam berkontribusi terhadap ekspor dan perekonomian Lampung.

Apabila dirinci dari jenisnya, produk komoditas utama penyumbang ekspor tersebut terdiri atas 4 jenis yaitu kopi, nanas, kelapa sawit, batu bara dan pulp kertas (Grafik 3). Kopi dan nanas yang termasuk dalam kategori Food and Live Animals di tahun 2025 memegang hampir 40% ekspor komoditas Lampung, sementara ekspor kelapa sawit (*animal and vegetable oils, fats and waxes*) tercatat sebesar 37%, diikuti oleh batu bara (*mineral fuels, lubricants, and related minerals*) sebesar 12% dan pulp (*crude materials, inedible, except fuels*) sebesar 6%. Apabila di tinjau dari segi produktifitasnya, kopi dan nanas memiliki tingkat produktifitas ekspor, yang diprosi dari

Grafik 4. PRODY Komoditas Utama (USD)



PRODY, yang paling tinggi yaitu \$ 1.386 di tahun 2025, sementara kelapa sawit sebesar \$1.269, diikuti batu bara sebesar \$ 407 dan pulp sebesar \$ 194. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas kopi, nanas dan kelapa sawit merupakan kontributor utama penyumbang ekspor dan pertumbuhan ekonomi Lampung.

Hasil pengolahan data ekspor tersebut menunjukkan bahwa ekspor Lampung masih sangat bergantung pada produk komoditas. Hal ini mengkonfirmasi bahwa Lampung termasuk daerah *strongly commodity-dependent* di Indonesia. Pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota perlu melakukan transformasi struktural agar perekonomian dapat keluar dari *commodity trap* sehingga dapat tercapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkualitas dan berkelanjutan. Program transformasi struktural tersebut bertujuan untuk lebih mendiversifikasi perekonomian dari sektor primer yang mengandalkan komoditas ke sektor industri dengan lebih melibatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi agar tercipta nilai tambah perekonomian.

BOKS 2

Hilirisasi, Petani Kecil, dan Jalan Keluar dari Jebakan Komoditas

Program hilirisasi sebagai salah satu upaya untuk keluar dari jebakan komoditas di Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang didorong oleh sektor komoditas perlu didukung kebijakan yang diarahkan agar inklusif dan berkelanjutan. Kita sering kali terpaku pada narasi pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB maupun surplus neraca perdagangan, namun belum sepenuhnya mendalami apakah kue pertumbuhan dinikmati masyarakat secara luas. Kita merayakan angka pertumbuhan PDRB atau surplus neraca perdagangan, namun kerap lupa mengajukan pertanyaan mendasarnya: *siapa yang sebenarnya menikmati pertumbuhan itu?* Bagi Provinsi Lampung, pertanyaan ini sangat relevan. Seperti yang telah diurai sebelumnya, Lampung masih bergulat dengan *commodity trap*. Sektor pertanian menjadi penyangga utama ekonomi, menyerap nyaris separuh tenaga kerja, namun produktivitas dan kesejahteraannya kerap tertinggal. Petani kita terbiasa menjual produk dalam bentuk mentah (kopi biji, singkong utuh, atau gabah kering panen), menempatkan mereka di ujung rantai pasok yang paling rentan terhadap volatilitas harga global.

Lantas, bagaimana kita memutus mata rantai ini? Salah satu upaya mengatasi permasalahan ini adalah dengan hilirisasi, namun tak dipungkiri hilirisasi kerap disalahpahami sebagai pembangunan pabrik-pabrik berskala raksasa atau *smelter* bernilai triliunan rupiah. Padahal, hilirisasi sejatinya bisa (dan harus) dimulai dari tingkat tapak. Ia adalah tentang "industrialisasi pedesaan".

Strategi yang pertama adalah memulai hilirisasi dari hulu melalui modernisasi dan korporatisasi pertanian. Data menunjukkan bahwa skala usaha tani di Lampung mayoritas masih gurem dan terfragmentasi. Di sini, intervensi kelembagaan menjadi kunci. Petani tidak bisa lagi dibiarkan bertarung sendirian melawan pasar. Melalui pendekatan korporasi petani (seperti konsolidasi lahan melalui koperasi atau BUMDes), adopsi *Good Agricultural Practices* (GAP) dan mekanisasi dapat dieksekusi dengan lebih efisien. Langkah ini krusial untuk menekan biaya produksi yang saat ini masih didominasi oleh inefisiensi *input* dan tenaga kerja manual.



MODEL PENDAMPINGAN PERTANIAN TERINTEGRASI DARI HULU SAMPAI HILIR

Closed Loop adalah model kemitraan agribisnis hulu sampai hilir yang melibatkan multistakeholder dan dikembangkan dalam ekosistem yang berbasis digital, teknik budidaya GAP, sistem distribusi yang baik serta jaminan pasar/harga yang bersaing oleh off-taker



Sumber: EPTILU, dalam Diseminasi LPP Lampung Semester I 2026

Kedua, penciptaan nilai tambah melalui integrasi rantai pasok dan ekonomi sirkular. Kita bisa belajar dari *success story* kelembagaan seperti model Eptilu. Mereka membuktikan bahwa petani kecil bisa melompat naik kelas jika tidak sekadar berfokus pada *on-farm*, tetapi merambah ke hilir. Alih-alih menjual komoditas mentah ke tengkulak, model ini mengintegrasikan produksi pertanian dengan pascapanen, pengemasan, hingga agrowisata (*farm-to-table*). Hasilnya, rantai pasok yang tadinya panjang dan merugikan petani berhasil dipangkas. Nilai tambah tidak lagi lari ke luar daerah, melainkan berputar di kantong para petani lokal.

Ketiga, hilirisasi komoditas unggulan yang berbasis *business case* dan kepastian pasar. Kita bisa memetik pelajaran berharga dari model kolaborasi BUMD Pangan seperti *Food Station*. Transformasi struktural Lampung tidak hanya menuntut pergeseran fisik, dari sekadar menjual gabah menjadi beras premium melalui Rice Milling Unit (RMU) berstandar tinggi, tetapi juga membutuhkan rekayasa ekosistem bisnis di tingkat tapak. Di sinilah skema *contract farming* (pertanian kontrak) mengambil peran sentral. Melalui kehadiran *standby buyer* (pembeli siaga)

dari pihak *offtaker* yang menjamin penyerapan hasil panen dengan harga yang wajar, petani tidak lagi berproduksi di tengah ketidakpastian. Lebih dari itu, kepastian pasar yang dipadukan dengan pendampingan teknis *on-farming* terbukti memberikan rasa aman bagi petani. Kepastian inilah yang pada gilirannya meningkatkan *engagement* dan loyalitas petani untuk terus menjaga kualitas dan kuantitas produksinya, karena mereka tahu bahwa jerih payahnya akan dihargai secara adil oleh pasar. Inisiatif hilirisasi hanya akan berkelanjutan jika ia digerakkan oleh kepastian permintaan (*market-driven*).

Pada akhirnya, jalan keluar dari ketergantungan komoditas bukanlah dengan meninggalkan sektor pertanian, melainkan berjalan bersama dengan sektor industri pengolahan dan jasa. Jika model bisnis hulu-hilir yang terintegrasi ini dapat direplikasi dan disesuaikan dengan karakteristik lokal Lampung, kita tidak hanya akan melihat perbaikan pada angka pertumbuhan makro, tetapi juga akan menikmati hasil dari pertumbuhan berkualitas dan inklusif, dengan hilirisasi pedesaan adalah kendaraan utamanya.



Sumber: FOOD STATION TJIPINANG JAYA, dalam Diseminasi LPP Lampung Semester I 2026



Perkembangan Inflasi



Inflasi Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 0,19% (mtm), melambat dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,58% (mtm). Secara bulanan, rata-rata IHK selama Triwulan I 2026 mengalami inflasi sebesar 0,16% (mtm), lebih rendah dari rata-rata Triwulan IV 2025 yang mencatat inflasi sebesar 0,39% (mtm). Meskipun demikian, capaian inflasi bulanan tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,41% (mtm). Peningkatan tekanan inflasi pada Triwulan I 2026 terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.



Secara tahunan, inflasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 1,16% (yoy), melambat dibandingkan Triwulan IV 2025 yang sebesar 1,25% (yoy), serta berada di bawah inflasi nasional yang sebesar 3,48% (yoy). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh tekanan inflasi dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, sementara deflasi pada kelompok Pendidikan menahan inflasi yang lebih tinggi pada periode laporan.



Secara spasial, kinerja inflasi kabupaten/kota di Provinsi Lampung menunjukkan tekanan harga yang relatif lebih terkendali dibandingkan wilayah lain di Sumatera. Seluruh kabupaten/kota sampel IHK di Lampung mencatat inflasi tahunan di bawah tingkat inflasi nasional dan berada dalam kelompok 10 inflasi terendah di Sumatera. Di tengah disparitas inflasi di wilayah Sumatera, posisi kabupaten/kota di Lampung mencerminkan stabilitas harga yang relatif terjaga selama triwulan laporan.



Inflasi Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy) dengan kecenderungan meningkat seiring normalisasi pasokan pasca panen raya, risiko gangguan produksi akibat faktor cuaca, peningkatan permintaan pada periode libur sekolah, serta tekanan imported inflation. Namun demikian, inflasi diperkirakan tetap terkendali didukung oleh normalisasi permintaan pasca-HBKN Idulfitri, meningkatnya pasokan sejumlah komoditas strategis, serta berlanjutnya penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui TPID.

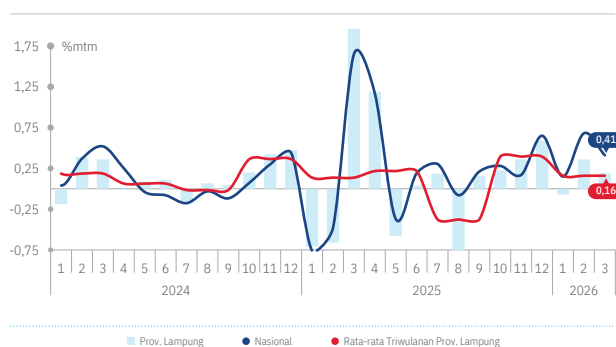
2.1. Inflasi Umum Gabungan Dua Kota dan Dua Kabupaten di Provinsi Lampung

2.1.1. Inflasi Bulanan

Inflasi Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 0,07% (mtm), melambat dibandingkan Triwulan IV 2025 yang mencatat inflasi sebesar 0,58% (mtm). Secara bulanan, rata-rata inflasi IHK selama Triwulan I 2026 tercatat sebesar 0,16% (mtm), lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Triwulan IV 2025 sebesar 0,39% (mtm) (Grafik 2.1). Capaian tersebut juga berada di bawah rata-rata inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,41% (mtm). Berdasarkan kelompok pengeluarannya, tekanan inflasi pada triwulan laporan terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (Grafik 2.2). Perkembangan tersebut sejalan dengan meningkatnya permintaan sejumlah komoditas pangan, khususnya pangan hewani, pada periode Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 Hijriah. Namun demikian, peningkatan tekanan permintaan tersebut diimbangi oleh terjaganya ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi berbagai komoditas pangan strategis lainnya, sehingga tekanan inflasi secara keseluruhan tetap terkendali pada level yang relatif rendah.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Januari 2026 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,07% (mtm), berbalik arah dibandingkan Desember 2025 yang mengalami inflasi sebesar 0,59% (mtm) (Grafik 2.1). Meskipun demikian, deflasi tersebut tidak sedalam deflasi nasional yang tercatat sebesar 0,15% (mtm) maupun rata-rata perkembangan IHK Provinsi Lampung pada bulan Januari dalam tiga tahun terakhir yang mengalami deflasi sebesar 0,32% (mtm). Secara tahunan, IHK Provinsi Lampung pada Januari 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,90% (yoy), meningkat dibandingkan inflasi Desember 2025 yang sebesar 1,25% (yoy). Meski mengalami peningkatan, capaian inflasi tahunan tersebut masih berada di bawah tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,55% (yoy).

Grafik 2.1. Inflasi Lampung dan Nasional



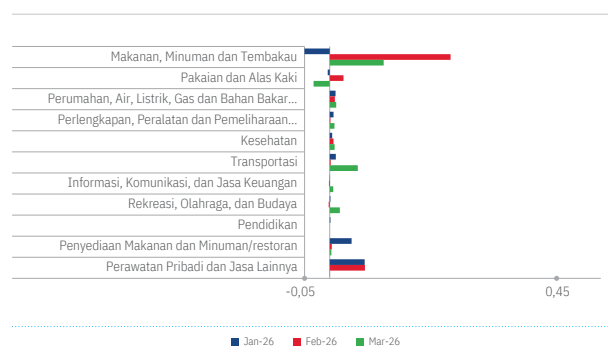
Sumber : BPS, diolah

Tabel 2.1. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi & Deflasi Bulanan Januari 2026

Komoditas Inflasi	Andil (%)	Komoditas Deflasi	Andil (%)
Emas Perhiasan	0,08	Cabai Merah	-0,25
Tomat	0,05	Bawang Merah	-0,12
Kangkung	0,04	Cabai Rawit	-0,06
Bayam	0,03	Bensin	-0,03
Nasi dengan Lauk	0,03	Jeruk	-0,03

Sumber : BPS, diolah

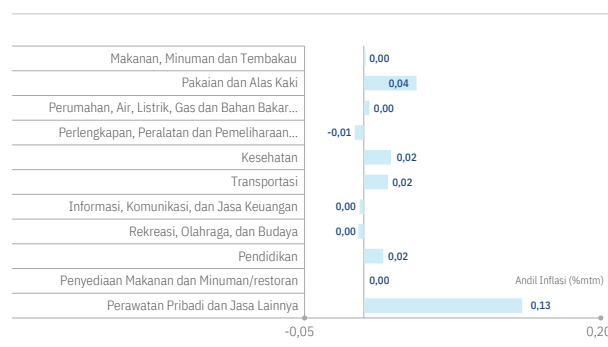
Grafik 2.2. Sumbangan Inflasi Bulanan Januari, Februari dan Maret 2026



Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan sumbernya, deflasi pada Januari 2026 terutama dipengaruhi oleh penurunan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok Transportasi (Grafik 2.3). Komoditas utama penyumbang deflasi meliputi cabai merah, bawang merah, cabai rawit, bensin, dan jeruk dengan andil masing-masing sebesar -0,25%; -0,12%; -0,06%; -0,03%; dan -0,03% (mtm) (Tabel 2.1). Penurunan harga cabai merah dan cabai rawit didorong oleh meningkatnya pasokan seiring berlangsungnya periode panen di sejumlah sentra produksi lokal, khususnya Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Timur. Sejalan dengan itu, penurunan harga bawang merah juga oleh terjaganya pasokan selama musim panen, baik dari sentra produksi lokal maupun dari luar daerah melalui realisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Dari kelompok

Grafik 2.3. Sumbangan Inflasi Bulanan Januari 2026 Menurut Kelompok Pengeluaran



Sumber : BPS, diolah

Tabel 2.2. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi & Deflasi Bulanan Februari 2026

Komoditas Inflasi	Andil (%)	Komoditas Deflasi	Andil (%)
Emas Perhiasan	0,09	Bensin	-0,05
Daging Ayam Ras	0,05	Susu Cair Kemasan	-0,01
Bawang Merah	0,04	Kangkung	-0,01
Cabai Rawit	0,04	Hand Body Lotion	-0,01
Tomat	0,04	Wortel	-0,01

Sumber : BPS, diolah

Grafik 2.4. Sumbangan Inflasi Bulanan Februari 2026 Menurut Kelompok Pengeluaran



Sumber : BPS, diolah

nonpangan, deflasi terutama bersumber dari komoditas bensin yang mengalami penurunan harga sejalan dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti tren penurunan harga minyak dunia.

Di sisi lain, deflasi pada Januari 2026 yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga beberapa komoditas, terutama emas perhiasan, tomat, kangkung, bayam, dan nasi dengan lauk yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,08%; 0,05%; 0,04%; 0,03%; dan 0,03% (mtm). Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan berlanjutnya penguatan harga emas global di tengah tingginya tensi geopolitik dan ketidakpastian perekonomian global. Sementara itu, kenaikan harga tomat, kangkung, dan bayam dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan akibat penurunan produksi akibat tingginya intensitas curah hujan. Adapun kenaikan harga nasi dengan lauk didorong oleh meningkatnya biaya bahan baku, termasuk aneka sayuran, yang mendorong penyesuaian harga pada kelompok makanan jadi.

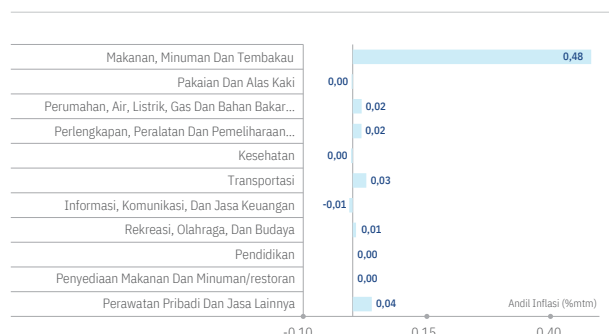
Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Februari 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,36% (mtm), meningkat dibandingkan Januari 2026 yang mengalami deflasi sebesar 0,07% (mtm) (Grafik 2.1). Meskipun demikian, capaian inflasi bulanan tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,68% (mtm). Dibandingkan pola historisnya, inflasi Februari 2026 juga berada di atas rata-rata perkembangan IHK Provinsi

Tabel 2.3. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi & Deflasi Bulanan Maret 2026

Komoditas Inflasi	Andil (%)	Komoditas Deflasi	Andil (%)
Daging Ayam Ras	0,05	Cabai Merah	-0,09
Bensin	0,04	Celana Panjang Jeans Pria	-0,04
Beras	0,03	Tomat	-0,02
Telur Ayam Ras	0,03	Obat Gosok	-0,02
Vitamin	0,03	Emas Perhiasan	-0,02

Sumber : BPS, diolah

Grafik 2.5. Sumbangan Inflasi Bulanan Maret 2026 Menurut Kelompok Pengeluaran



Sumber : BPS, diolah

Lampung pada bulan yang sama dalam tiga tahun terakhir yang tercatat sebesar 0,03% (mtm). Secara tahunan, IHK Provinsi Lampung pada Februari 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 2,95% (yoy), meningkat dibandingkan Januari 2026 yang sebesar 1,90% (yoy), namun masih berada di bawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,76% (yoy).

Berdasarkan sumbernya, inflasi pada Februari 2026 terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya serta kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (Grafik 2.4). Komoditas utama penyumbang

Tabel 2.4. Inflasi Bulanan Menurut Kelompok (Pangsa %MtM)

Kelompok Inflasi	Jan-26	Feb-25	Mar-25
Umum	-0,07	0,36	0,19
Makanan, Minuman dan Tembakau	-0,21	0,24	0,11
Pakaian dan Alas Kaki	0,00	0,03	-0,03
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,01	0,01	0,01
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan	0,01	0,00	0,01
Kesehatan	0,00	0,01	0,01
Transportasi	0,01	0,00	0,06
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,00	0,00	0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,00	0,00	0,02
Pendidikan	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	0,04	0,00	0,00
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,07	0,07	0,00

Sumber : BPS, diolah

inflasi meliputi emas perhiasan dan daging ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 0,09% dan 0,05% (mtm), serta cabai rawit, bawang merah, dan tomat yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,04% (mtm) (Tabel 2.2). Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan berlanjutnya tren penguatan harga emas global di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan tensi geopolitik dunia. Sementara itu, kenaikan harga daging ayam ras didorong oleh meningkatnya permintaan selama periode Ramadan dan Hari HBKN Idulfitri. Dari komoditas hortikultura, kenaikan harga bawang merah dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan menjelang HBKN, sementara pasokan masih terbatas akibat tertundanya masa panen akibat curah hujan tinggi di sentra produksi lokal. Di sisi lain, kenaikan harga cabai rawit didorong oleh berkurangnya pasokan pasca berakhirnya periode panen. Adapun kenaikan harga tomat dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan akibat penurunan produktivitas di tengah tingginya intensitas curah hujan.

Di sisi lain, tekanan inflasi pada Februari 2026 yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas, terutama bensin yang memberikan andil deflasi sebesar -0,05% (mtm) (Tabel 2.2). Perkembangan tersebut sejalan dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku pada periode laporan. Selain itu, beberapa komoditas lain turut memberikan andil deflasi, antara lain susu cair kemasan, kangkung, wortel, dan *hand body lotion* yang masing-masing mencatat andil sebesar -0,01% (mtm). Khusus pada komoditas sayur-sayuran, penurunan harga kangkung dan wortel didorong oleh meningkatnya ketersediaan pasokan di pasar seiring membaiknya produksi lokal.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Maret 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,19% (mtm), melambat dibandingkan Februari 2026 yang mencatat inflasi sebesar 0,36% (mtm) (Grafik 2.1). Capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 0,41% (mtm) maupun rata-rata perkembangan IHK Provinsi Lampung pada bulan Maret dalam tiga tahun terakhir yang tercatat sebesar 0,84% (mtm). Secara tahunan, IHK Provinsi Lampung pada Maret 2026 mengalami inflasi sebesar 1,16% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulans sebelumnya yang sebesar 2,95% (yoy), serta berada di bawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,48% (yoy).

Berdasarkan sumbernya, inflasi pada Maret 2026 terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok Transportasi (Grafik 2.5). Komoditas utama penyumbang inflasi meliputi daging ayam ras dan bensin dengan andil masing-masing sebesar 0,05% dan 0,04% (mtm), serta beras, telur ayam ras, dan vitamin yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,03% (mtm) (Tabel 2.3). Kenaikan harga daging ayam ras dan telur

ayam ras didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat selama periode Ramadan dan HBKN Idulfitri. Sementara itu, kenaikan harga bensin sejalan dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada 1 Maret 2026 mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Adapun kenaikan harga beras dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan pasca berakhirnya puncak panen raya serta tertahannya produktivitas padi akibat tingginya curah hujan pada awal tahun. Lebih lanjut, kenaikan harga vitamin dipengaruhi oleh normalisasi harga pasca berakhirnya periode pemberian diskon pada awal tahun.

Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi pada Maret 2026 tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas, terutama cabai merah yang mencatat andil deflasi sebesar -0,09% (mtm). Penurunan harga cabai merah didukung oleh terjaganya pasokan dari sentra produksi lokal, khususnya Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, deflasi juga terjadi pada komoditas celana panjang pria dengan andil sebesar -0,04% (mtm), serta tomat, obat gosok, dan emas perhiasan yang masing-masing mencatat andil sebesar -0,02% (mtm). Adapun penurunan harga emas perhiasan sejalan dengan koreksi harga emas global yang dipengaruhi oleh penguatan dolar Amerika Serikat (USD) dan ekspektasi suku bunga kebijakan Amerika Serikat yang tetap tinggi.

2.1.2. Inflasi Tahunan

Secara tahunan, inflasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 1,16% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,25% (yoy). Capaian tersebut juga tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 3,48% (yoy) (Grafik 2.6). Perkembangan inflasi tahunan pada periode laporan terutama dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik yang didorong oleh efek

Tabel 2.5. Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok (Pangsa %MtM)

Kelompok Inflasi	IV-25	I-26
Umum	1,25	1,16
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,35	0,38
Pakaian dan Alas Kaki	0,02	0,03
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,23	1,03
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan	0,01	0,03
Kesehatan	0,03	0,04
Transportasi	0,16	0,14
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,03	-0,02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,05	0,01
Pendidikan	-1,21	-1,19
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	0,11	0,11
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,53	0,60

Sumber : BPS, diolah

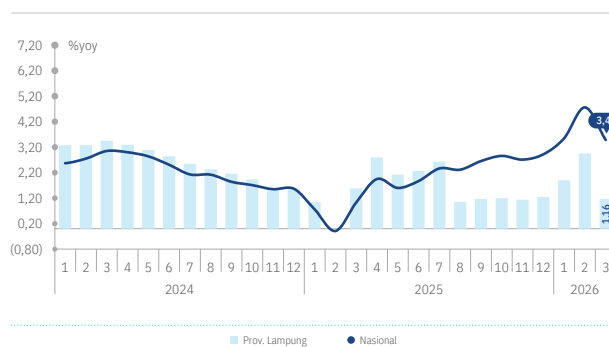
basis rendah (*low base effect*), seiring normalisasi kebijakan diskon tarif listrik PLN pada periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, kenaikan harga emas perhiasan turut memberikan tekanan inflasi sejalan dengan berlanjutnya akselerasi harga emas global di tengah meningkatnya ketidakpastian dan tensi geopolitik global. Di sisi lain, tekanan inflasi tahunan yang lebih tinggi tertahan oleh implementasi kebijakan penghapusan biaya komite pendidikan yang mulai berlaku mulai paruh kedua tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut mendorong terjadinya deflasi pada kelompok Pendidikan dan menjadi faktor utama yang menahan laju inflasi Provinsi Lampung. Berdasarkan kelompok pengeluaran, sumber tekanan inflasi terbesar pada Triwulan I 2026 berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,38% (yoy) dan tingkat inflasi sebesar 1,12% (yoy). Sementara itu, kelompok Pendidikan mencatat andil deflasi sebesar -1,19% (yoy) dengan tingkat deflasi mencapai 17,97% (yoy) (Tabel 2.5).

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Pada Triwulan I 2026, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi sebesar 1,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,06% (yoy). Meskipun mengalami moderasi, kelompok ini tetap menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan andil mencapai 0,38% (yoy) (Tabel 2.6).

Berdasarkan subkelompoknya, subkelompok makanan menjadi penyumbang utama inflasi kelompok ini dengan andil sebesar 0,20% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi pada subkelompok ini adalah daging ayam ras, beras, dan tomat dengan andil masing-masing sebesar 0,18%; 0,13%; dan 0,06% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya

Grafik 2.6. Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

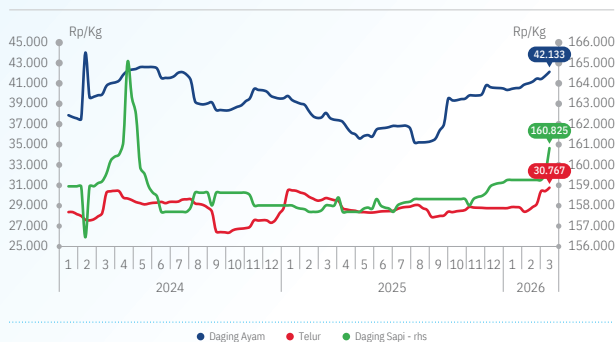
permintaan bahan pangan selama periode Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 Hijriah. Kondisi ini tercermin pada hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia yang menunjukkan kenaikan harga daging ayam ras dari Rp37.381 per kg pada Maret 2025 menjadi Rp42.133 per kg pada Maret 2026. Sementara itu, harga tomat meningkat dari Rp20.394 per kg menjadi Rp23.425 per kg pada periode yang sama (Grafik 2.7 dan Grafik 2.8). Selain dipengaruhi oleh faktor musiman HBKN, peningkatan harga kedua komoditas tersebut juga didukung oleh berlanjutnya permintaan dari program prioritas pemerintah yang mendorong konsumsi sumber protein hewani dan sayuran. Di samping itu, inflasi subkelompok makanan turut dipengaruhi oleh kenaikan harga beras, terutama beras kualitas bawah, yang berdasarkan SPH Bank Indonesia meningkat dari Rp14.194 per kg pada Maret 2025 menjadi Rp14.381 per kg pada Maret 2026 (Grafik 2.9). Meski demikian, tekanan inflasi dari komoditas beras relatif terbatas seiring terjaganya pasokan selama periode panen raya. Kondisi tersebut tercermin dari harga beras kualitas medium yang secara rata-rata masih berada pada level yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 2.9).

Tabel 2.6. Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau (% yoy)

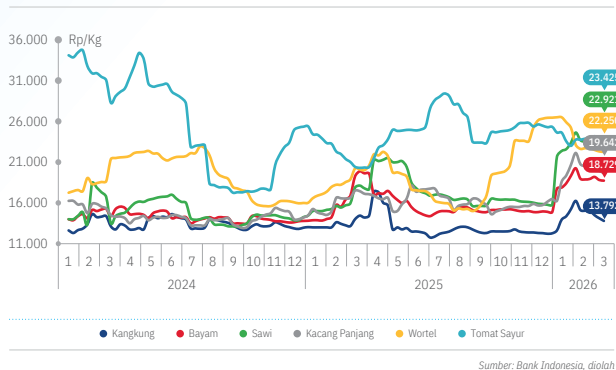
Komoditas Inflasi	Inflasi (% yoy)		Komoditas Deflasi	Deflasi (% yoy)	
	Perubahan	Andil		Perubahan	Andil
Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau (0,35%)					
Makanan (0,20%)					
Daging Ayam Ras	12,48	0,18	Bawang Putih	-16,55	-0,18
Beras	3,00	0,13	Cabai Merah	-25,02	-0,15
Tomat	30,73	0,06	Bawang Merah	-3,74	-0,06
Rokok dan Tembakau (0,14%)					
Sigaret Kretek Mesin (skm)	3,00	0,09			
Sigaret Kretek Tangan (skt)	2,92	0,04			
Sigaret Putih Mesin (spm)	2,86	0,01			
Minuman yang Tidak Beralkohol (0,04%)					
Kopi Bubuk	3,37	0,03	Minuman Kesegaran	-0,97	0,00
Air Kemasan	0,86	0,01	Air Teh Kemasan	-1,02	0,00

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.7. Perkembangan Harga Daging Sapi, Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras

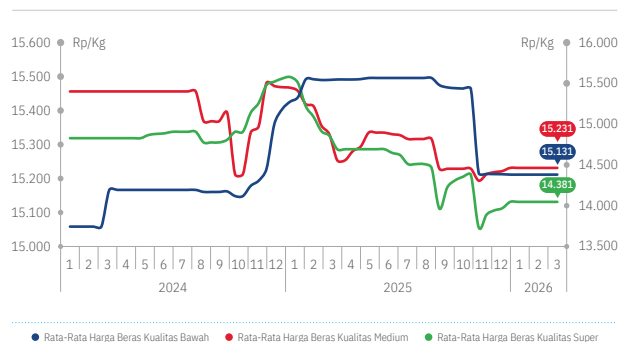


Grafik 2.8. Perkembangan Harga Sayur Sayuran

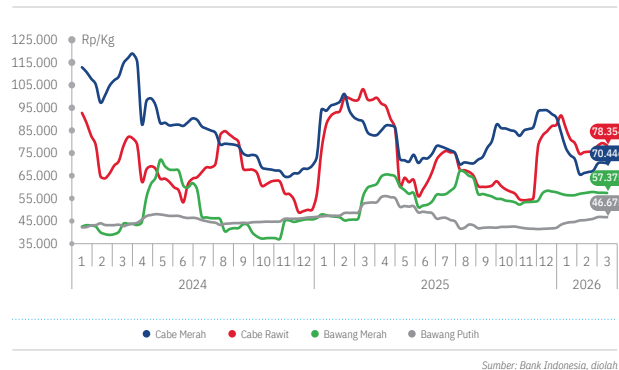


Selanjutnya, subkelompok rokok dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan andil sebesar 0,14% (yoy) terhadap inflasi triwulan laporan. Inflasi pada subkelompok ini terutama bersumber dari kenaikan harga sigaret kretek mesin (SKM), sigaret kretek tangan (SKT), dan sigaret putih mesin (SPM) dengan andil masing-masing sebesar 0,09%; 0,04%; dan 0,01% (yoy). Perkembangan tersebut merupakan dampak lanjutan dari penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) rokok yang berlaku sejak awal tahun. Sejalan dengan hal tersebut, hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia menunjukkan bahwa harga rokok kretek dan rokok filter meningkat dari masing-masing Rp17.813 dan Rp34.531 per bungkus pada Maret 2025 menjadi Rp18.917 dan Rp36.333 per bungkus pada Maret 2026 (Grafik 2.11). Lebih lanjut, subkelompok minuman tidak beralkohol turut memberikan andil inflasi sebesar 0,04% (yoy), terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga kopi bubuk dan air kemasan dengan andil masing-masing sebesar 0,03% dan 0,01% (yoy). Kenaikan harga kopi bubuk sejalan dengan terbatasnya pasokan kopi robusta menjelang periode panen utama yang umumnya berlangsung pada awal Triwulan II. Namun demikian, tekanan harga yang lebih tinggi tertahan oleh perkembangan harga kopi dunia yang cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya, seiring membaiknya prospek produksi di negara-negara produsen utama (Grafik 2.12).

Grafik 2.9. Perkembangan Harga Beras

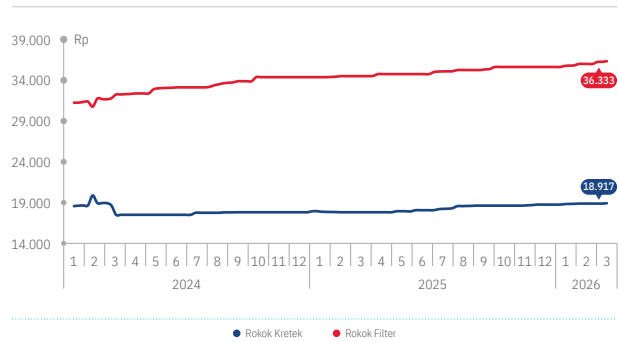


Grafik 2.10. Perkembangan Harga Bumbu-bumbuan

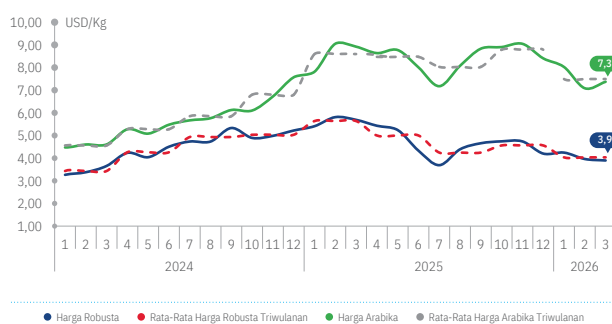


Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tertahan oleh deflasi pada sejumlah komoditas pangan strategis, terutama bawang putih, cabai merah, dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar -0,18%; -0,15%; dan -0,06% (yoy). Penurunan harga komoditas tersebut didukung oleh terjaganya ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi antarwilayah. Pada bawang putih, pasokan yang memadai pasca realisasi impor pada Maret 2026 turut berkontribusi terhadap penurunan harga. Sementara itu, harga cabai merah dan bawang merah menurun seiring meningkatnya produksi selama periode panen di sejumlah sentra produksi utama, khususnya cabai merah di Kabupaten Pringsewu

Grafik 2.11. Perkembangan Harga Rokok

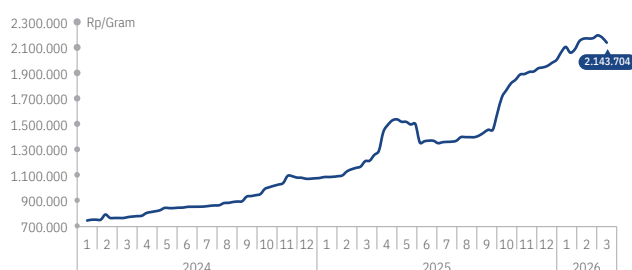


Grafik 2.12. Perkembangan Harga Kopi Dunia



Sumber : World Bank, diolah

Grafik 2.13. Perkembangan Harga Emas Perhiasan



Sumber : Bank Indonesia, diolah

dan Kabupaten Lampung Timur, serta bawang merah di Kota Metro. Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan harga cabai merah dari Rp82.958 per kg pada Maret 2025 menjadi Rp70.446 per kg pada Maret 2026. Pada periode yang sama, harga bawang putih dan bawang merah juga menurun dari masing-masing Rp53.294 dan Rp61.406 per kg menjadi Rp46.675 dan Rp57.375 per kg (Grafik 2.10).

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya pada Triwulan I 2026 mencatat inflasi sebesar 8,78% (yoy) dengan andil sebesar 1,03% (yoy), meningkat dibandingkan Triwulan IV 2025 yang mengalami inflasi sebesar 1,64% (yoy) dengan andil 0,21% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, kelompok ini menjadi salah satu sumber utama tekanan inflasi tahunan pada periode laporan. Berdasarkan subkelompoknya, tekanan inflasi terutama bersumber dari subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga yang memberikan andil sebesar 0,88% (yoy) terhadap inflasi Provinsi Lampung. Komoditas utama penyumbang inflasi.

adalah tarif listrik yang mencatat inflasi sebesar 25,61% (yoy) dengan andil 0,87% (yoy). Tingginya inflasi tarif listrik terutama dipengaruhi oleh efek basis rendah (*low-base effect*), seiring normalisasi kebijakan diskon tarif listrik yang berlaku pada awal tahun 2025. Selain itu, subkelompok sewa dan kontrak rumah turut memberikan tekanan inflasi dengan andil sebesar 0,08% (yoy). Tekanan tersebut terutama berasal dari komoditas kontrak rumah yang mencatat inflasi sebesar 1,92% (yoy) dengan andil 0,05% (yoy), sejalan dengan penyesuaian tarif sewa yang umumnya dilakukan pada awal tahun. Di sisi lain, beberapa komoditas bahan bangunan seperti baja ringan, pipa, dan besi *hollow* mengalami deflasi pada periode laporan. Namun demikian, besaran deflasi pada komoditas tersebut relatif terbatas sehingga belum mampu mengimbangi tekanan inflasi yang bersumber dari kenaikan tarif listrik dan biaya hunian (Tabel 2.7)

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Inflasi kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 9,55% (yoy) dengan andil sebesar 0,60%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang 8,45% (yoy) dengan andil sebesar 0,53%

Tabel 2.7. Sumbangan Inflasi dan Deflasi Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar Lainnya (% yoy)

Komoditas Inflasi	Inflasi (% yoy)		Komoditas Deflasi	Deflasi (% yoy)	
	Perubahan	Andil		Perubahan	Andil
Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga (1,03%)					
Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga (0,88%)					
Tarif Listrik	25,61	0,87			
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,77	0,01			
Sewa dan Kontrak Rumah (0,08%)					
Kontrak Rumah	1,96	0,05			
Sewa Rumah	2,03	0,03			
Pemeliharaan, Perbaikan, dan Keamanan Tempat Tinggal/perumahan (0,07%)					
Gypsum	23,99	0,02	Baja Ringan	-8,06	0,00
Pasir	4,78	0,01	Pipa	-1,41	0,00
Semen	2,73	0,01	Besi Hollow	-0,28	0,00

Sumber : BPS, diolah

Tabel 2.8. Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (% yoy)

Komoditas Inflasi	Inflasi (% yoy)		Komoditas Deflasi	Deflasi (% yoy)	
	Perubahan	Andil		Perubahan	Andil
Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (0,60%)					
Perawatan Pribadi Lainnya (0,61%)					
Emas Perhiasan	60,61	0,59	Jam Tangan	-0,27	0,00
Popok Bayi Sekali Pakai/ Diapers	2,57	0,01	Korek Api Gas	0,00	0,00
Perawatan Pribadi (-0,01%)					
Tarif Gunting Rambut Pria	5,41	0,01	Bedak	-6,45	-0,02
Shampo	2,28	0,01	Deodorant	-8,00	-0,01
Pasta Gigi	1,69	0,01	Sabun Mandi Cair	-3,02	-0,01

Sumber: BPS, diolah

(Tabel 2.8). Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari komoditas emas perhiasan yang mencatat inflasi sebesar 60,61% (yoy) dengan andil sebesar 0,59% (yoy). Perkembangan tersebut terkonfirmasi dari hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia yang menunjukkan harga emas perhiasan meningkat dari Rp1.293.891 per gram pada Maret 2025 menjadi Rp2.143.704 per gram pada Maret 2026 (Grafik 2.13). Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan penguatan harga emas global di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan dan tensi geopolitik dunia, yang mendorong peningkatan permintaan terhadap emas sebagai instrumen lindung nilai (*safe haven*). Di sisi lain, tekanan inflasi pada kelompok ini tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas perawatan pribadi, terutama bedak dengan andil sebesar -0,02% (yoy), serta deodoran dan sabun mandi cair yang masing-masing memberikan andil deflasi sebesar -0,01% (yoy). (Tabel 2.7).

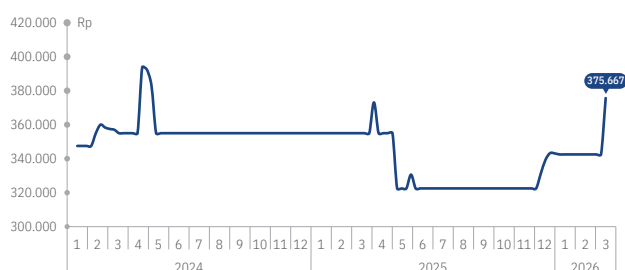
Kelompok Transportasi

Kelompok Transportasi pada Triwulan I 2026 mencatat inflasi sebesar 1,28% (yoy) dengan andil sebesar 0,14% (yoy), melambat dibandingkan Triwulan IV 2025 yang mencatat inflasi sebesar 1,47% (yoy) dengan andil 0,16% (yoy). Berdasarkan subkelompoknya, tekanan inflasi terutama bersumber dari subkelompok pembelian kendaraan yang memberikan andil sebesar 0,10% (yoy). Inflasi pada subkelompok ini terutama didorong oleh kenaikan harga mobil dan sepeda motor yang masing-masing mencatat inflasi sebesar 6,21% (yoy) dan 1,03% (yoy), dengan andil sebesar 0,08% (yoy) dan 0,01% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan meningkatnya permintaan kendaraan menjelang puncak periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 Hijriah. Tekanan inflasi juga berasal dari subkelompok jasa angkutan penumpang yang memberikan andil sebesar 0,02% (yoy). Kenaikan harga pada subkelompok ini terutama bersumber dari

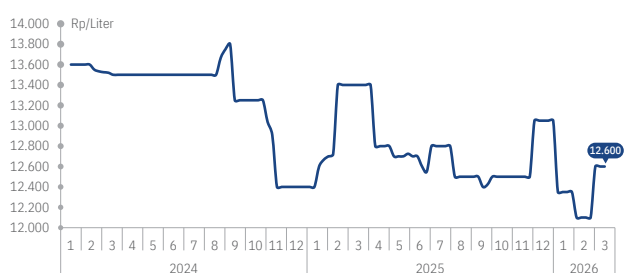
Tabel 2.9. Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Transportasi (% yoy)

Komoditas Inflasi	Inflasi (% yoy)		Komoditas Deflasi	Deflasi (% yoy)	
	Perubahan	Andil		Perubahan	Andil
Kelompok Transportasi (0,14%)					
Pembelian Kendaraan (0,10%)					
Mobil	6,21	0,08			
Sepeda Motor	1,03	0,01			
Jasa Angkutan Penumpang (0,02%)					
Tarif Kendaraan Travel	13,39	0,01	Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	-12,02	-0,01
Angkutan Udara	10,03	0,01			
Angkutan Antar Kota	1,75	0,00			
Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi (0,01%)					
Perbaikan Ringan Kendaraan	4,73	0,01	Bensin	-1,03	-0,05
Cuci Kendaraan	6,22	0,01			
Kendaraan Carter/Rental	33,23	0,01			
Jasa Pengiriman Barang (0,01%)					
Biaya Pengiriman Barang	7,34	0,01			

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.14. Perkembangan Tarif Angkutan Antar Kota

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.15. Perkembangan Harga Bensin

Sumber: Bank Indonesia,

tarif kendaraan travel dan angkutan udara yang masing-masing mencatat inflasi sebesar 13,39% (yoy) dan 10,03% (yoy), dengan andil masing-masing sebesar 0,01% (yoy). Selain itu, tarif angkutan antarkota turut mengalami inflasi sebesar 1,75% (yoy). Hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia mengonfirmasi perkembangan tersebut, dengan rata-rata tarif angkutan antarkota meningkat dari Rp373.125 pada Maret 2025 menjadi Rp375.667 pada Maret 2026 (Grafik 2.14).

Di sisi lain, tekanan inflasi pada kelompok Transportasi tertahan oleh deflasi pada komoditas bensin. Pada Triwulan I 2026, bensin mencatat deflasi sebesar 1,03% (yoy) dengan andil sebesar -0,05% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hasil SPH Bank Indonesia menunjukkan harga bensin turun dari Rp13.400 per liter pada Maret 2025 menjadi Rp12.600 per liter pada Maret 2026 (Grafik 2.15).

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Inflasi kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran pada Triwulan IV 2025 tercatat sebesar 1,31% (yoy) dengan andil sebesar 0,11% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat inflasi sebesar 1,40% (yoy) dengan andil sebesar 0,11% (yoy) (Tabel 2.10). Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari subkelompok jasa penyediaan makanan dan minuman, khususnya kenaikan harga pada komoditas nasi dengan lauk, martabak, dan syur olehan dengan andil masing-masing sebesar 0,04%; 0,02%; dan 0,01% (yoy). Melambatnya tekanan inflasi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran didukung oleh permintaan masyarakat yang relatif stabil serta terjaganya harga sebagian bahan baku utama, utamanya aneka cabai, bawang merah, dan bawang putih. Kondisi tersebut turut menahan dampak kenaikan harga beberapa komponen bahan baku lainnya, khususnya daging ayam ras, beras, dan sejumlah komoditas sayur-sayuran, sehingga penyesuaian harga pada makanan jadi dan minuman relatif terbatas.

Kelompok Pendidikan

Pada Triwulan I 2026, kelompok pendidikan mencatat deflasi sebesar 17,97% (yoy) dengan andil sebesar -1,19% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi 17,80% (yoy) dengan andil sebesar -1,20% (yoy) (Tabel 2.11). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan deflasi pada kelompok pendidikan masih berlanjut pada triwulan laporan. Secara struktural, deflasi terutama bersumber dari subkelompok pendidikan menengah dengan andil sebesar -1,23% (yoy), khususnya tarif sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang masing-masing menyumbang andil sebesar -0,84% dan -0,39% (yoy). Penurunan tarif tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung yang menghapuskan uang komite sekolah untuk tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan tersebut juga berdampak pada subkelompok pendidikan dasar dan anak usia dini, khususnya tarif sekolah dasar yang mencatat andil deflasi sebesar -0,02% (yoy) pada triwulan laporan. Di sisi lain, deflasi pada kelompok pendidikan tertahan oleh subkelompok pendidikan lainnya yang mencatat inflasi dengan andil sebesar 0,04% (yoy), terutama didorong oleh kenaikan biaya bimbingan belajar.

Tabel 2.10. Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran (% yoy)

Komoditas Inflasi	Inflasi (% yoy)		Komoditas Deflasi	Deflasi (% yoy)	
	Perubahan	Andil		Perubahan	Andil
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran (0,11%)					
Jasa Pelayanan Makanan dan Minuman (0,11%)					
Nasi Dengan Lauk	2,26	0,04			
Martabak	6,22	0,02			
Sayur Olahan	6,02	0,01			

Sumber : BPS, diolah

Tabel 2.11. Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Pendidikan (% yoy)

Komoditas Inflasi	Inflasi (% yoy)		Komoditas Deflasi	Deflasi (% yoy)	
	Perubahan	Andil		Perubahan	Andil
Pendidikan (-1,19%)					
Kelompok Pendidikan Menengah (-1,23%)					
			Sekolah Menengah Atas	-54,65	-0,84
			Sekolah Menengah Pertama	-45,14	-0,39
Kelompok Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini (-0,02%)					
			Sekolah Dasar	-2,79	-0,02
Kelompok Pendidikan Lainnya (0,04%)					
Bimbingan Belajar	17,13	0,04			
Kelompok Pendidikan Tinggi (0,01%)					
Akademi/Perguruan Tinggi	0,59	0,01			

Sumber : BPS, diolah

2.2 Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Inflasi Provinsi Lampung merupakan agregasi dari empat kabupaten/kota sampel penghitungan IHK oleh BPS, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Lampung Timur. Sejak 2024, cakupan penghitungan diperluas dengan penambahan Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Timur guna memperkuat representasi karakteristik wilayah urban dan rural dalam perhitungan inflasi, sehingga mencerminkan dinamika harga yang lebih komprehensif di tingkat provinsi. Dalam struktur pembobotannya, kontribusi masing-masing daerah terhadap pembentukan IHK Provinsi Lampung adalah sekitar 60% untuk Kota Bandar Lampung, sekitar 28% untuk Kota Metro, serta masing-masing sekitar 6% untuk Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Timur.

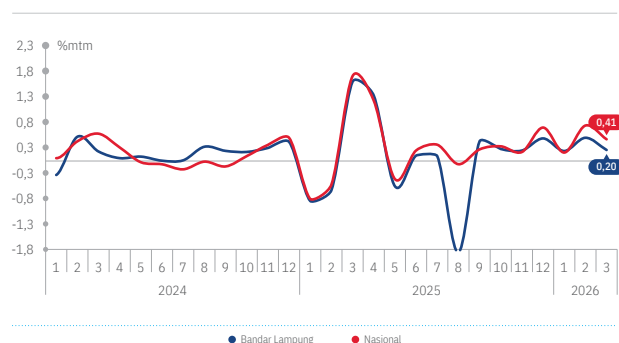
2.2.1. Inflasi Kota Bandar Lampung

IHK Kota Bandar Lampung pada Januari 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,18% (mtm), melandai dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,43% (mtm) (Grafik 2.16). Secara bulanan, tekanan inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan dengan andil sebesar 0,11% (mtm), serta kangkung, nasi dengan lauk, dan bayam dengan andil masing-masing sebesar 0,05% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kota Bandar Lampung pada Januari 2026

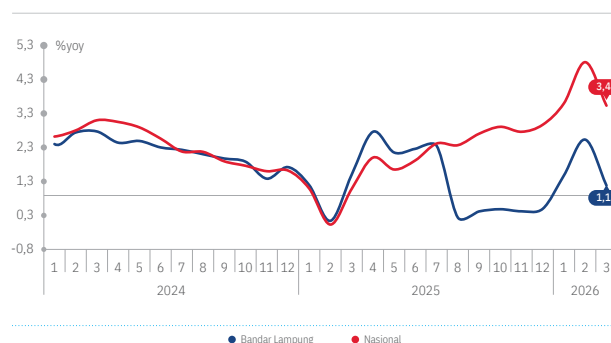
tercatat sebesar 1,43% (yoy), meningkat dibandingkan 0,44% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.17), terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga tarif listrik, emas perhiasan, dan beras dengan andil masing-masing sebesar 1,53%; 0,74% dan 0,10% (yoy).

Memasuki Februari 2026, Kota Bandar Lampung mencatat inflasi sebesar 0,44% (mtm), lebih tinggi dibandingkan Januari yang sebesar 0,18% (mtm) (Grafik 2.16). Secara bulanan, tekanan inflasi utamanya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, daging ayam ras, dan mobil dengan andil masing-masing sebesar 0,10%; 0,08%; dan 0,07% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kota Bandar Lampung pada Februari 2026 tercatat sebesar 2,48% (yoy), meningkat dibandingkan 1,43% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.17). Inflasi tahunan tersebut terutama disumbang oleh kenaikan tarif listrik, emas perhiasan, dan daging ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 2,16%; 0,77%; dan 0,15% (yoy).

Selanjutnya, pada Maret 2026, Kota Bandar Lampung mencatat inflasi sebesar 0,20% (mtm), lebih rendah dibandingkan Februari yang sebesar 0,44% (mtm) (Grafik 2.16). Tekanan inflasi bulanan terutama dipicu oleh kenaikan

Grafik 2.16. Inflasi Bulanan Kota Bandar Lampung

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.17. Inflasi Tahunan Kota Bandar Lampung

Sumber: BPS, diolah

harga daging ayam ras dengan andil sebesar 0,07% (mtm), serta vitamin dan telur ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 0,04% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kota Bandar Lampung pada Maret 2026 tercatat sebesar 1,13% (yoy), melambat dibandingkan 2,48% (yoy) pada bulan sebelumnya. Inflasi tahunan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga tarif listrik, emas perhiasan, dan daging ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 0,93%; 0,68%; dan 0,17% (yoy).

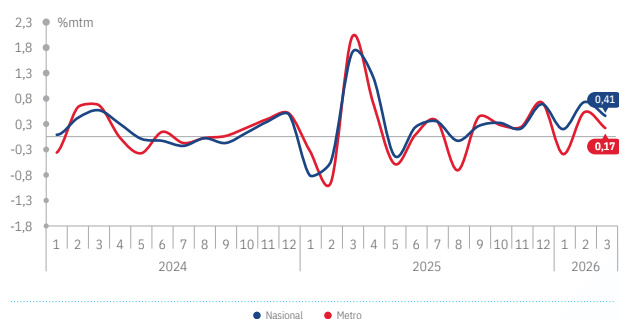
2.2.2. Inflasi Kota Metro

Pada Januari 2026, IHK Kota Metro mencatat deflasi sebesar 0,34% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat inflasi sebesar 0,67% (mtm) (Grafik 2.18). Secara bulanan, deflasi terutama disumbang oleh penurunan harga cabai merah, cabai rawit dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar -0,32%; -0,12%; dan -0,06% (mtm). Secara tahunan, Kota Metro mencatat inflasi sebesar 2,03% (yoy) pada Januari 2026, lebih rendah dibandingkan 2,09% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 3.19). Inflasi tahunan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga tarif listrik, emas perhiasan, dan beras dengan andil masing-masing sebesar 1,56%; 0,70%; dan 0,20% (yoy).

Memasuki Februari 2026, Kota Metro mencatat inflasi sebesar 0,48% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya mencatat deflasi sebesar 0,34% (mtm) (Grafik 2.18). Tekanan inflasi bulanan terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, cabai merah, dan kacang panjang dengan andil masing-masing sebesar 0,21%; 0,06%; dan 0,03% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kota Metro pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,43% (yoy), meningkat dibandingkan 2,03% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.19). Tekanan inflasi tahunan masih didominasi oleh tarif listrik, emas perhiasan, dan beras dengan andil masing-masing sebesar 2,12%; 0,90%; dan 0,18% (yoy).

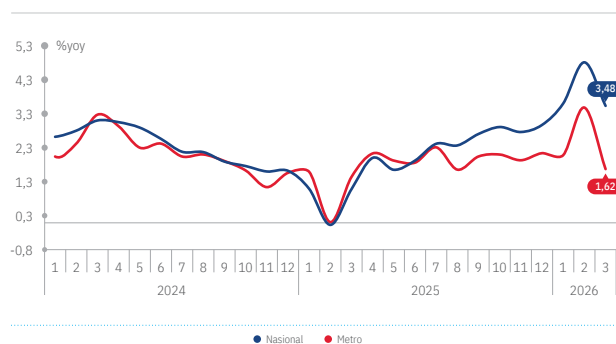
Pada Maret 2026, inflasi Kota Metro melambat menjadi 0,17% (mtm), dari bulan sebelumnya sebesar 0,48% (mtm) (Grafik 2.18). Secara bulanan, tekanan inflasi terutama disumbang oleh

Grafik 2.18. Inflasi Bulanan Kota Metro



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.19. Inflasi Tahunan Kota Metro



Sumber: BPS, diolah

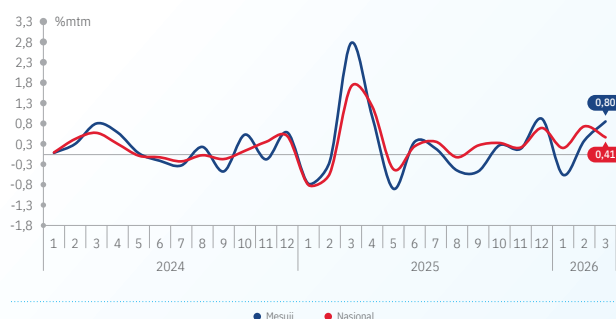
kenaikan tarif kendaraan travel dan bensin dengan andil masing-masing sebesar 0,05%, serta ikan mas dengan andil sebesar 0,03% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kota Metro pada Maret 2026 tercatat sebesar 1,62% (yoy), melandai dari 3,43% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.19). Inflasi tahunan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan, tarif listrik, dan beras dengan andil masing-masing sebesar 0,85%; 0,84%; dan 0,17% (yoy).

2.2.3. Inflasi Kabupaten Mesuji

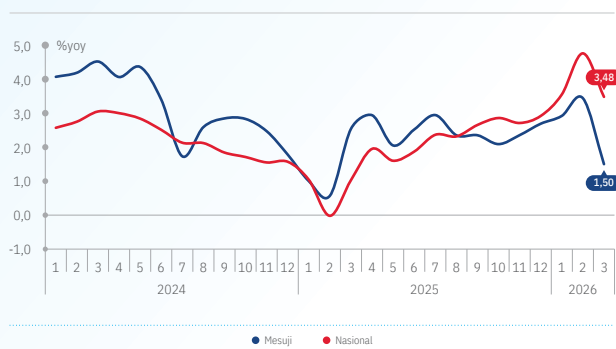
Pada Januari 2026, IHK Kabupaten Mesuji mencatat deflasi sebesar 0,51% (mtm), berbalik arah dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,87% (mtm) (Grafik 2.20). Deflasi tersebut terutama disumbang oleh penurunan harga cabai merah, bawang merah, dan bawang putih dengan andil masing-masing sebesar -0,18%; -0,12%; dan -0,06% (mtm). Secara tahunan, Kabupaten Mesuji tercatat mengalami inflasi sebesar 2,92% (yoy) pada Januari 2026, meningkat dibandingkan 2,69% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.21). Inflasi tahunan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik, emas perhatian, dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar 1,94%; 0,92%; dan 0,34% (yoy).

Memasuki Februari 2026, Kabupaten Mesuji mencatat inflasi sebesar 0,33% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat deflasi sebesar 0,51% (mtm)

Grafik 2.20. Inflasi Bulanan Kabupaten Mesuji



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.21. Inflasi Tahunan Kabupaten Mesuji

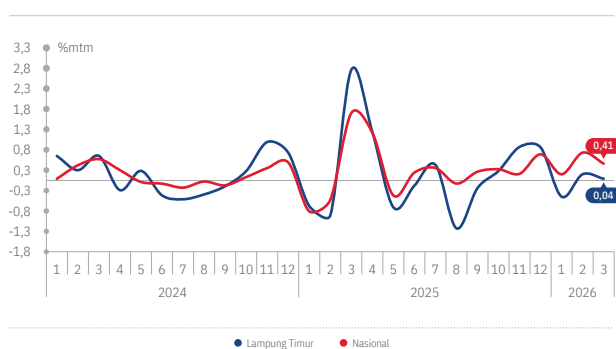
Sumber: BPS, diolah

(Grafik 2.20). Secara bulanan, tekanan inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, telur ayam ras, dan tomat dengan andil masing-masing sebesar 0,11%; 0,08%; dan 0,07% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kabupaten Mesuji meningkat menjadi 3,44% (yoy), dibandingkan 2,92% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.21). Tekanan inflasi tahunan didominasi oleh sumbangan kenaikan tarif listrik, emas perhiasan, dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar 2,03%; 0,96%; dan 0,45% (yoy).

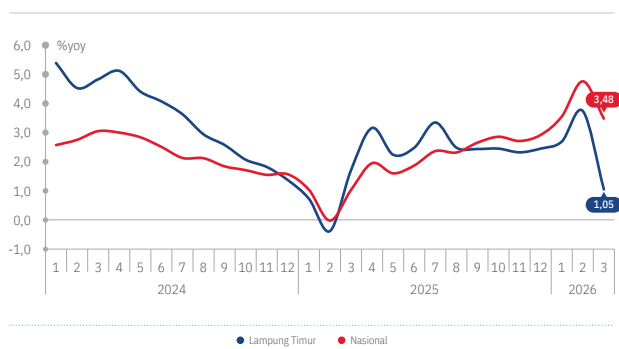
Pada Maret 2026, inflasi Kabupaten Mesuji meningkat menjadi 0,80% (mtm), dari 0,33% (mtm) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.20). Secara bulanan, inflasi tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga bensin dengan andil sebesar 0,07% (mtm), serta bawang putih dan ikan lele dengan andil masing-masing sebesar 0,06% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kabupaten Mesuji tercatat sebesar 1,50% (yoy), melambat dibandingkan 3,44% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.21). Inflasi tahunan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan, tarif listrik, dan sigaret kretek mesin (SKM) dengan andil masing-masing sebesar 0,71%; 0,15%; dan 0,10% (yoy).

2.2.4. Inflasi Kabupaten Lampung Timur

Pada Januari 2026, IHK Kabupaten Lampung Timur mencatat deflasi sebesar 0,40% (mtm), berbalik arah dibandingkan

Grafik 2.22. Inflasi Bulanan Kabupaten Lampung Timur

Sumber: BPS Kab Lampung Timur, diolah

Grafik 2.23. Inflasi Tahunan Kabupaten Lampung Timur

Sumber: BPS Kab Lampung Timur, diolah

bulan sebelumnya yang mencatat inflasi sebesar 0,81% (mtm) (Grafik 2.22). Deflasi tersebut terutama bersumber dari penurunan harga cabai merah, bawang merah, dan bawang putih dengan andil masing-masing sebesar -0,26%; -0,25%; -0,06% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kabupaten Lampung Timur pada Januari 2026 tercatat sebesar 2,69% (yoy), meningkat dibandingkan 2,45% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.23). Inflasi tahunan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik, bawang merah, dan emas perhiasan dengan andil masing-masing sebesar 1,49%; 0,72%; dan 0,27% (yoy).

Memasuki Februari 2026, Kabupaten Lampung Timur mencatat inflasi sebesar 0,15% (mtm), lebih tinggi dibandingkan Januari yang mencatat deflasi 0,40% (mtm) (Grafik 2.22). Secara bulanan, tekanan inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga bawang merah dengan andil sebesar 0,04% (mtm), serta cabai rawit dan emas perhiasan dengan andil masing-masing sebesar 0,03% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kabupaten Lampung Timur meningkat menjadi 3,74% (yoy) dibandingkan 2,69% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.23). Tekanan inflasi tahunan masih didominasi oleh tarif listrik, bawang merah, dan emas perhiasan dengan andil masing-masing sebesar 2,10%; 0,84%; dan 0,30% (yoy).

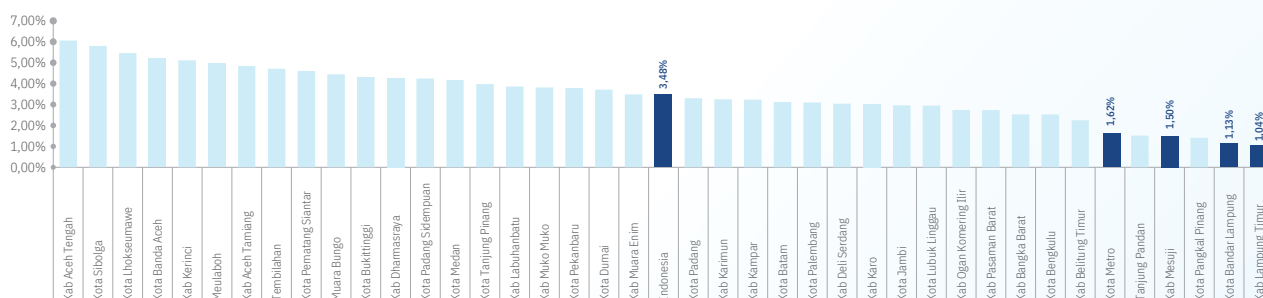
Pada Maret 2026, Kabupaten Lampung Timur mengalami inflasi sebesar 0,04% (mtm), lebih rendah dibandingkan februari yang sebesar 0,15% (mtm) (Grafik 2.22). Secara bulanan, kenaikan harga terutama dipicu oleh bensin, kangkung, dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar 0,06%; 0,02%; dan 0,01% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 1,05% (yoy), melambat dibandingkan 3,74% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.23). Inflasi tahunan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga tarif listrik, emas perhiasan, dan daging ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 0,91%; 0,25%; dan 0,23% (yoy).

2.3. Inflasi Sumatera

Secara spasial, perkembangan inflasi di wilayah Sumatera pada Triwulan I 2026 menunjukkan tekanan harga yang cenderung melandai di sebagian besar provinsi dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun masih terdapat variasi tingkat inflasi antarwilayah. Di Sumatera bagian utara, Provinsi Aceh dan Sumatera Utara masing-masing mencatat inflasi sebesar 5,31% dan 3,86% (yoy), salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan harga beras. Sementara itu, di Sumatera bagian tengah, inflasi di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi masing-masing tercatat sebesar 3,37%; 3,65%; 3,23%; dan 3,55% (yoy), terutama didorong oleh kenaikan harga daging ayam ras. Adapun di Sumatera bagian selatan, Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung masing-masing mencatat inflasi sebesar 2,85%; 3,09%; 1,87%; dan 1,16% (yoy), terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga daging ayam ras dan beras (Gambar 2.1.).

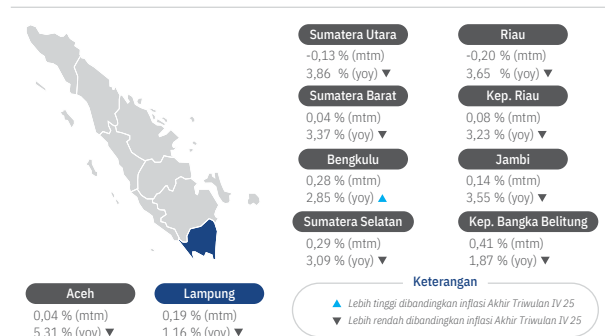
Secara umum, inflasi tahunan di wilayah Sumatera terutama bersumber dari kenaikan tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam ras, dan beras. Tekanan inflasi tarif listrik dipengaruhi oleh efek basis rendah (*low-base effect*) pasca berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik yang diterapkan pemerintah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren penguatan harga emas dunia di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi dan tensi geopolitik global. Dari sisi pangan, pergeseran puncak momentum HBKN Idulfitri yang pada tahun 2026 jatuh pada Maret, lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya, mendorong percepatan peningkatan permintaan berbagai bahan pangan, terutama beras dan daging ayam ras. Tekanan permintaan tersebut juga sejalan dengan meningkatnya kebutuhan bahan pangan sumber protein dalam rangka pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di sisi lain, belum optimalnya pemulihan produksi padi di beberapa provinsi, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pasca gangguan cuaca dan bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025, turut menyebabkan tekanan inflasi beras yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di wilayah Sumatera.

Grafik 2.24. Inflasi Tahunan Kabupaten Kota di Wilayah Sumatera



Sumber: BPS, diolah

Gambar 2.1. Inflasi Wilayah Sumatera



Sumber: BPS, diolah

Sejalan dengan perkembangan tersebut, pada level kabupaten/kota, dari 41 kabupaten/kota sampel IHK di Sumatera (SBH 2022), sebanyak 21 kabupaten/kota mencatat inflasi tahunan di atas tingkat inflasi nasional sebesar 3,48% (yoy). Inflasi tertinggi tercatat di Kota Gunungsitoli sebesar 6,29% (yoy), sementara inflasi terendah tercatat di Kabupaten Lampung Timur sebesar 1,04% (yoy), yang mencerminkan masih relatif besarnya disparitas inflasi antarwilayah di Sumatera. Lebih lanjut, seluruh kabupaten/kota sampel IHK di Provinsi Lampung mencatat inflasi tahunan di bawah tingkat inflasi nasional dan berada dalam kelompok 10 kabupaten/kota dengan inflasi terendah di Sumatera. Lebih lanjut, di samping Kabupaten Lampung Timur, Kota Bandar Lampung mencatat inflasi sebesar 1,13% (yoy), Kabupaten Mesuji sebesar 1,50% (yoy), dan Kota Metro sebesar 1,62% (yoy). Perkembangan ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di wilayah Lampung pada triwulan I 2026 relatif lebih terjaga dibandingkan sebagian daerah lain di Sumatera (Grafik 2.24).

2.4. Arah Perkembangan Inflasi Triwulan I 2026

Inflasi Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy), meskipun dengan kecenderungan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh berakhirnya puncak produksi sejumlah komoditas pangan strategis, termasuk padi, jagung,

dan berbagai komoditas hortikultura, yang berpotensi mendorong kenaikan harga beras, komoditas pangan hewani, serta komoditas bumbu dan sayuran. Selain itu, tingginya curah hujan yang berlangsung hingga akhir Maret berpotensi memengaruhi kinerja produksi pangan pada Triwulan II 2026. Kondisi tersebut antara lain tercermin pada tertundanya masa tanam padi di beberapa daerah serta meningkatnya risiko serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) pada komoditas hortikultura, yang dapat menahan peningkatan pasokan pada periode mendatang. Dari sisi permintaan, tekanan inflasi juga berpotensi meningkat seiring masuknya periode libur sekolah yang umumnya diikuti oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas rekreasi. Sementara itu, risiko inflasi dari sisi eksternal masih perlu dicermati seiring ketidakpastian global dan tensi geopolitik yang belum mereda. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan komoditas global yang dapat meningkatkan tekanan *imported inflation* serta memberikan dampak lanjutan terhadap harga domestik.

Sejalan dengan berbagai faktor risiko tersebut, ekspektasi inflasi pelaku usaha pada Triwulan I 2026 juga menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia mencatat rata-rata Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) dalam tiga bulan dan enam bulan mendatang masing-masing sebesar 154,90 dan 156,21, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Triwulan IV 2025 yang sebesar 135,08 dan 130,50 (Grafik 2.25). Peningkatan ekspektasi tersebut mengindikasikan bahwa pelaku usaha memperkirakan tekanan harga masih akan berlanjut pada Triwulan II 2026, seiring normalisasi pasokan pasca berakhirnya periode panen raya beberapa komoditas pangan strategis, meningkatnya risiko gangguan produksi akibat faktor cuaca, serta masih adanya ketidakpastian perkembangan harga komoditas global.

Meskipun demikian, inflasi pada Triwulan II 2026 diprakirakan tetap terkendali. Dari sisi permintaan, normalisasi konsumsi pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri diperkirakan akan mengurangi tekanan harga pada sejumlah komoditas strategis. Dari sisi penawaran, beberapa sentra industri gula di Lampung mulai memasuki musim giling seiring berlangsungnya panen tebu, sehingga berpotensi memperkuat pasokan dan menjaga stabilitas harga gula. Selain itu, produksi kopi robusta Lampung diprakirakan meningkat dan memasuki puncak panen pada akhir Triwulan II 2026, yang berpotensi menahan tekanan harga pada komoditas olahan kopi. Lebih lanjut, penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) turut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Melalui *High Level Meeting* Pengendalian Inflasi pada April 2026, TPID Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi strategi pengendalian inflasi melalui perluasan Kerja Sama Antar

Daerah (KAD) untuk komoditas berisiko defisit, khususnya bawang merah dan aneka cabai; penguatan operasi pasar pada komoditas strategis; serta melanjutkan berbagai program peningkatan produktivitas pangan melalui replikasi praktik budidaya unggul, penguatan hilirisasi, dan pengembangan kelembagaan petani.

2.5. Pengendalian Inflasi

Dalam rangka stabilitas inflasi Provinsi Lampung di tahun 2026, beberapa upaya pengendalian inflasi telah ditempuh tim TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota Lampung selama I 2026. Upaya-upaya dimaksud meliputi:

- a. **Monitoring perkembangan harga-harga dan kecukupan pasokan kebutuhan pokok di pasar, distributor, dan gudang oleh TPID baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.** Upaya ini turut dilakukan dalam rangka memastikan barang pokok layak untuk dikonsumsi dan berkualitas baik, di antaranya:
 1. Pemantauan harga harian melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang secara aktif disosialisasikan dalam setiap rapat dan *platform* komunikasi koordinasi TPID. Selain itu, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung turut melakukan pemantauan harga secara berkala di lapangan.
 2. Penyampaian analisis harian perkembangan harga komoditas bahan pokok oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung berdasarkan data PIHPS, yang didiseminasi melalui *platform* komunikasi bersama TPID Lampung dan Satgas Pangan Lampung sebagai bagian dari *early warning system*.
- b. **Penguatan Implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS)**
Sebagai tindak lanjut implementasi GPIPS, TPID Provinsi Lampung terus memperkuat upaya peningkatan produktivitas dan stabilitas harga pangan secara *end-to-end*, mulai dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari program strategis TPID Lampung, yang meliputi:
 1. Hilirisasi produk pertanian sebagai upaya peningkatan nilai tambah melalui fasilitasi sarana dan prasarana produksi, antara lain bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pengembangan demplot budidaya, pembangunan rumah produksi, serta pendampingan teknis pada tahapan pra dan pasca panen.
 2. Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), baik intra-provinsi maupun antar-provinsi untuk komoditas pangan strategis berisiko defisit, serta pengembangan aneka produk UMKM, guna memperkuat kesinambungan pasokan dan mengurangi risiko defisit antarwilayah.

3. Peningkatan konsumsi produk olahan dan diversifikasi pangan melalui sosialisasi dan penyelenggaraan *regional event*, dengan fokus pada pengembangan komoditas bernilai tambah seperti beras medium, olahan komoditas hortikultura, dan tepung singkong dalam rangka memperluas substitusi dan mengurangi tekanan pada komoditas segar.
4. Peningkatan kapasitas petani *champion* binaan untuk mendukung implementasi hilirisasi pangan melalui transisi menuju praktik pertanian organik, penguatan mekanisasi, serta pemanfaatan teknologi berbasis *Internet of Things* (IoT) guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi.

c. Rekomendasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung

Menghadapi risiko inflasi pada triwulan II 2026, beberapa langkah dilakukan oleh TPID Provinsi Lampung dalam rangka menjaga laju inflasi agar berada dalam rentang target $2,5\% \pm 1\%$, antara lain sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga
 - Optimalisasi pelaksanaan Gerakan Pasar Murah melalui pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) secara terukur guna menjaga stabilitas harga pasca berakhirnya panen raya tanaman pangan.
 - Penguatan *monitoring* harga dan pasokan secara intensif, khususnya pada komoditas strategis dengan andil inflasi tinggi seperti bawang merah, aneka cabai, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, dan beras.
2. Ketersediaan Pasokan
 - Optimalisasi realisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) eksisting sebagai respons dini terhadap indikasi kenaikan harga atau peningkatan permintaan pada komoditas pangan defisit.
 - Penguatan koordinasi antar-OPD untuk mendukung intensifikasi pertanian, memastikan kesiapan dan kecukupan alsintan, optimalisasi irigasi dan sumber air alternatif (sumur bor); serta penguatan sarana pengolahan pasca panen dan distribusi pangan untuk menjaga produksi, pasokan, dan stabilitas harga dalam rangka menghadapi risiko *El Nino*.
 - Menjaga keberlanjutan implementasi toko pengendalian inflasi di seluruh wilayah IHK dan non-IHK sebagai instrumen stabilisasi harga di tingkat konsumen.
3. Kelancaran Distribusi
 - Penguatan efektivitas Subsidi Ongkos Angkut (SOA) melalui optimalisasi peran BUMD pangan sebagai operator distribusi, termasuk penyaluran komoditas strategis dari sentra produksi ke kabupaten/kota sampel IHK.

- Peningkatan kesiapan sarana dan prasarana distribusi melalui pemanfaatan Mobil Transportasi Operasi Pasar (TOP), serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memprioritaskan perbaikan jalur distribusi kabupaten/kota dan pedesaan yang dilalui angkutan pangan.
 - Koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk peningkatan frekuensi penerbangan Jakarta–Lampung dan rute lainnya guna menjaga kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
4. Komunikasi efektif
 - Penguatan koordinasi dan *awareness* TPID melalui rapat koordinasi rutin Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik formal maupun informal, untuk memantau dinamika harga dan pasokan terkini.
 - Penguatan sistem informasi harga dan pasokan melalui integrasi data hasil koordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait guna mendukung pengambilan kebijakan yang tepat dan berbasis data.
 - Optimalisasi diseminasi informasi inflasi serta kampanye belanja bijak dan diversifikasi pangan melalui media sosial dan media digital luar ruang untuk menjaga ekspektasi inflasi dan meminimalkan risiko *panic buying*.
 - Pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) TPID Provinsi Lampung dalam rangka konsolidasi kebijakan dan penguatan komitmen pengendalian inflasi menghadapi Ramadan dan Idulfitri, termasuk penetapan langkah antisipatif pada komoditas berisiko tinggi.

d. Quick Wins Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung

Diperlukan upaya untuk menahan laju inflasi saat ini dan ke depan, berbagai langkah melalui pengambilan kebijakan yang bersifat *quick win* dan perbaikan faktor struktural, diantaranya:

1. Intensifikasi pelaksanaan operasi pasar/Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan fokus pada komoditas pangan strategis berisiko inflasi seperti beras, bawang merah, aneka cabai, telur dan daging ayam ras, serta minyak goreng, yang dilaksanakan berbasis hasil monitoring harga harian guna memastikan intervensi tepat waktu dan tepat lokasi.
2. Optimalisasi pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) serta penyaluran beras SPHP Bulog secara terukur untuk menjaga stabilitas harga pada periode peningkatan permintaan.
3. Aktivasi dan percepatan realisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) intra dan antarprovinsi sebagai respons dini terhadap indikasi kenaikan harga maupun potensi defisit pasokan komoditas hortikultura dan pangan pokok.

4. Penguatan *monitoring* harga dan ketersediaan pasokan melalui *early warning system* berbasis PIHPS dan SP2KP guna mendeteksi deviasi harga dari pola historis serta memastikan respons kebijakan yang cepat dan terarah.
5. Penguatan kelancaran distribusi komoditas strategis melalui optimalisasi Subsidi Ongkos Angkut (SOA), dan koordinasi lintas instansi untuk menjaga distribusi dari sentra produksi ke wilayah konsumsi.
6. Percepatan realisasi pupuk bersubsidi dan dukungan sarana produksi pertanian guna memastikan optimalisasi panen hortikultura di sentra produksi lokal.
7. Penguatan koordinasi dengan Dinas Pertanian, BMKG, dan pengelola irigasi dalam memetakan jadwal tanam dan panen serta mengantisipasi risiko cuaca, sehingga kesinambungan pasokan tetap terjaga sepanjang triwulan II 2026.

BOKS 3

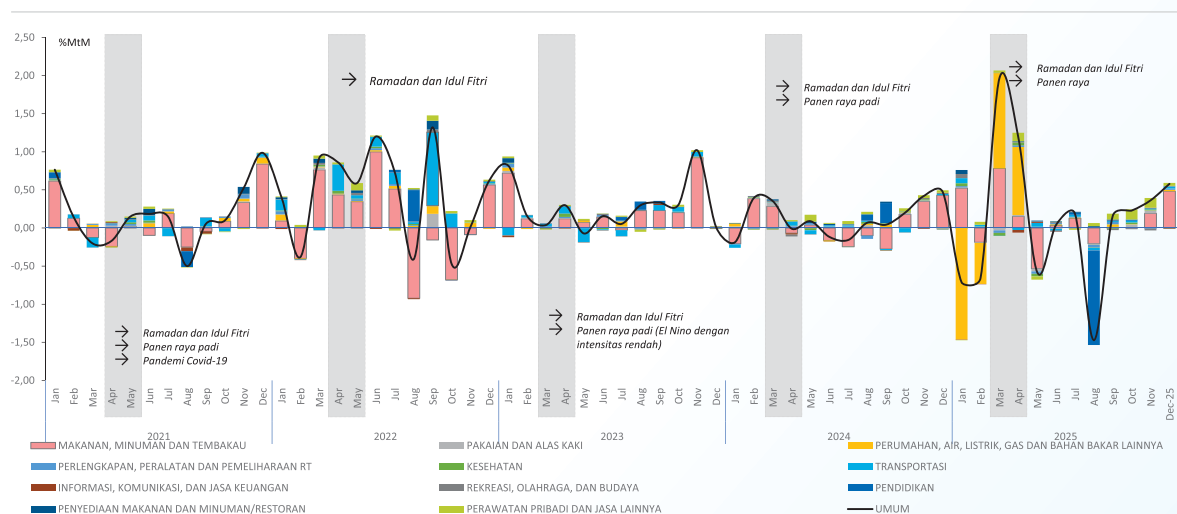
Sinergi TPID Lampung Menjaga Stabilitas Harga Pangan Selama Ramadan dan Idulfitri 1447 H

Periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri merupakan salah satu periode dengan risiko inflasi yang relatif tinggi di Provinsi Lampung. Peningkatan konsumsi rumah tangga, mobilitas masyarakat, serta potensi gangguan pasokan akibat faktor cuaca menjadikan periode tersebut sebagai momentum yang memerlukan penguatan koordinasi dan langkah antisipatif dari seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan pola historis perkembangan inflasi selama periode Ramadan dan Idulfitri tahun 2021–2025, tekanan inflasi di Provinsi Lampung terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau (Grafik B2.1). Komoditas bawang putih, telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, dan minyak goreng tercatat sebagai komoditas yang paling sering masuk dalam lima besar penyumbang inflasi selama periode tersebut. Selain itu, aneka cabai dan kelompok transportasi juga relatif sering menjadi kontributor inflasi musiman, mencerminkan tingginya sensitivitas harga pangan dan biaya transportasi terhadap peningkatan permintaan masyarakat selama HBKN.

Besarnya sumbangan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada periode HBKN tercermin pada komoditas-komoditas yang paling sering menjadi penyumbang inflasi utama (Gambar B2.1). Bawang putih, telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, dan minyak goreng tercatat sebagai komoditas yang paling

sering masuk dalam lima besar penyumbang inflasi selama periode Ramadan dan Idulfitri tahun 2021–2025. Selain itu, aneka cabai dan kelompok transportasi juga relatif sering menjadi kontributor inflasi musiman, mencerminkan tingginya sensitivitas harga pangan dan biaya transportasi terhadap peningkatan permintaan masyarakat selama HBKN. Berdasarkan karakteristik komoditas penyumbang inflasi tersebut, risiko inflasi di Provinsi Lampung bersumber baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Di satu sisi, peningkatan konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri mendorong kenaikan permintaan berbagai komoditas pangan strategis. Di sisi lain, komoditas hortikultura yang dominan sebagai penyumbang inflasi, seperti cabai dan bawang merah, memiliki tingkat volatilitas yang tinggi akibat pengaruh cuaca. Sementara itu, komoditas pangan hewani serta minyak goreng rentan mengalami tekanan harga seiring meningkatnya konsumsi rumah tangga selama HBKN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga selama Ramadan dan Idulfitri tidak hanya ditentukan oleh pengelolaan permintaan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi pangan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi pada periode HBKN memerlukan langkah yang komprehensif melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal, pelaku usaha, dan seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Grafik B3.1. Perkembangan Inflasi MtM Menurut Andil Kelompok Barang/Jasa di Provinsi Lampung 2021-2025



Sumber: BPS, diolah

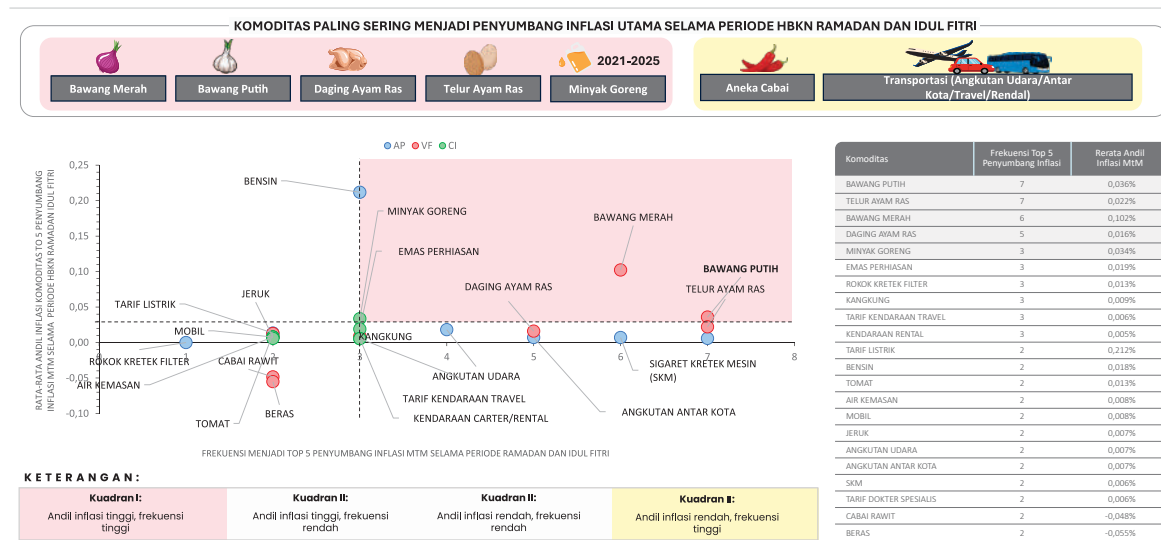
Sebagai respons terhadap berbagai risiko tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dan seluruh anggota TPID menyelenggarakan *High Level Meeting* (HLM) TPID Provinsi Lampung dalam rangka menghadapi HBKN Ramadan dan Idulfitri 1447 H pada Selasa, 10 Februari 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mirzani Djausal, dan dihadiri oleh seluruh anggota TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Lampung. Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa “lonjakan permintaan bahan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan merupakan siklus tahunan yang harus diantisipasi melalui kerja nyata dan langkah konkret, bukan sekadar perencanaan di atas kertas.” Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya implementasi program pengendalian inflasi yang terukur dan berorientasi pada hasil guna memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau selama Ramadan dan Idulfitri.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bapak Bimo Epyanto, menyampaikan bahwa tekanan inflasi menjelang HBKN perlu diantisipasi secara lebih dini mengingat sejumlah faktor risiko masih membayangi perkembangan harga pangan pada tahun 2026. Evaluasi historis menunjukkan bahwa komoditas pangan strategis seperti bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak

goreng, serta aneka cabai merupakan komoditas yang paling sering menjadi penyumbang inflasi selama periode Ramadan dan Idulfitri. Selain itu, tingginya curah hujan dan potensi cuaca ekstrem pada Triwulan I 2026 berpotensi mengganggu produksi hortikultura, sementara peningkatan daya beli masyarakat seiring kenaikan UMP sebesar 5,35% dan meningkatnya aktivitas konsumsi selama Ramadan dapat memperbesar tekanan harga apabila tidak diimbangi dengan kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi. Risiko inflasi juga perlu diwaspadai dari kemungkinan peningkatan harga komoditas pangan global dan energi yang dapat memengaruhi biaya produksi maupun distribusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan langkah pengendalian inflasi yang lebih terintegrasi melalui implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Sebagai tindak lanjut atas kesepakatan dalam *High Level Meeting* (HLM) TPID Provinsi Lampung, berbagai program pengendalian inflasi diperkuat dan diintensifkan selama periode Februari–Maret 2026 melalui implementasi strategi 4K. Pada aspek keterjangkauan harga, TPID Provinsi Lampung mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta penyaluran beras SPHP di seluruh kabupaten/kota guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri. Sepanjang periode menjelang HBKN, tercatat sekitar 130 kali pelaksanaan operasi pasar dan GPM yang

Grafik B3.2. Pemetaan Risiko Inflasi Komoditas Pangan dan Transportasi pada Periode HBKN Ramadan dan Idulfitri Tahun 2021–2025



Sumber: BPS, diolah

difokuskan pada komoditas pangan strategis, seperti beras, minyak goreng, bawang merah, aneka cabai, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Intensifikasi kegiatan tersebut menjadi instrumen utama dalam meredam tekanan harga akibat meningkatnya permintaan masyarakat sekaligus memastikan keterjangkauan pangan selama periode HBKN. Pada aspek ketersediaan pasokan, TPID memperkuat sistem pemantauan stok harian (*early warning system*) untuk berbagai komoditas pangan strategis guna mendeteksi secara dini potensi gangguan pasokan. Selain itu, dilakukan optimalisasi pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), realisasi kerja sama pasokan cabai merah dari Kabupaten Kulon Progo, pelaksanaan Gerakan Tanam Serentak Cabai di Kabupaten Mesuji, serta pengembangan demplot bawang merah di Kabupaten Pesawaran sebagai bagian dari upaya penguatan pasokan pangan lokal yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya pada aspek kelancaran distribusi, TPID memperkuat implementasi Subsidi Ongkos Angkut (SOA), mengoptimalkan peran BUMD pangan sebagai operator distribusi komoditas strategis, memanfaatkan Mobil Transportasi Operasi Pasar (TOP), serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana distribusi menjelang puncak arus mudik dan Idulfitri. Berbagai langkah tersebut bertujuan untuk meminimalkan hambatan distribusi yang berpotensi memicu kenaikan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, pada aspek komunikasi efektif, TPID secara aktif melakukan edukasi diversifikasi pangan, kampanye belanja bijak, penguatan kapasitas TPID Kabupaten/Kota,

serta penyampaian informasi perkembangan harga dan pasokan kepada masyarakat guna menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.

Berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan secara terkoordinasi tersebut turut mendukung terjaganya stabilitas harga pangan selama Triwulan I 2026. Inflasi Provinsi Lampung pada Maret 2026 tercatat sebesar 1,16% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi akhir tahun 2025 yang sebesar 1,25% (yoy). Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau menurun signifikan dari 4,06% (yoy) pada Triwulan IV 2025 menjadi 1,12% (yoy) pada Maret 2026. Penurunan tersebut terutama didorong oleh meredanya tekanan harga sejumlah komoditas pangan strategis seiring masuknya masa panen padi dan aneka cabai pada awal tahun, yang turut memperkuat pasokan domestik. Di sisi lain, berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan TPID melalui kerangka 4K mendukung terjaganya ekspektasi masyarakat, memperkuat kecukupan pasokan, serta memastikan distribusi pangan tetap berjalan lancar selama Ramadan dan Idulfitri. Dengan demikian, sinergi TPID Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan berbagai langkah pengendalian inflasi secara konsisten dan terukur turut mendukung terjaganya inflasi daerah dalam kisaran sasaran inflasi nasional di tengah tingginya risiko musiman pada periode HBKN.





Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan, serta UMKM

- Penyaluran kredit di Provinsi Lampung berdasarkan lokasi proyek tumbuh dan dalam risiko terjaga. Pada triwulan I 2026, penyaluran kredit tercatat tumbuh sebesar 4,82% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,57% (yoy).
- Pada triwulan I 2025, kredit konsumsi rumah tangga tumbuh dengan realisasi sebesar Rp30,18 triliun atau tumbuh sebesar 10,43% (yoy). Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 9,83% (yoy). Konsumsi rumah tangga memiliki peran besar dalam perekonomian Lampung. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Lampung menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 4,94 % (yoy). Pertumbuhan kredit rumah tangga didukung baik oleh peningkatan pada Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan kinerja positif Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang masing-masing tumbuh sebesar 34,25% (yoy), 10,73% (yoy) dan 10,56% (yoy).
- Kinerja kredit rumah tangga yang baik sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga pada triwulan I 2026 di Provinsi Lampung yang mencapai Rp49,06 Triliun atau 79,30% dari total DPK. Pertumbuhan DPK rumah tangga pada triwulan laporan tercatat sebesar 4,32% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,95% (yoy). Komposisi DPK rumah tangga pada triwulan I 2026 didominasi oleh tabungan (pangsa 79,30%), deposito (pangsa 19,10%), dan giro (pangsa 1,60%).
- Kinerja penyaluran kredit perbankan kepada sektor korporasi pada triwulan I 2026 meningkat. Kredit perbankan Provinsi Lampung untuk korporasi pada triwulan I 2026 tercatat mencapai Rp69,46 Triliun atau tumbuh sebesar 2,55% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,51% (yoy).
- Kredit UMKM tumbuh positif pada triwulan I 2026. Kredit yang disalurkan pada periode laporan tercatat sebesar Rp32,748 Triliun atau tumbuh 1,87% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,43% (yoy).

3.1. Pembiayaan Daerah

Penyaluran kredit di Provinsi Lampung berdasarkan lokasi proyek tumbuh dan dalam risiko terjaga. Pada triwulan I 2026, penyaluran kredit tercatat tumbuh sebesar 4,82% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,57% (yoy). Pertumbuhan kredit tersebut masih diiringi dengan kualitas risiko yang terkendali, tercermin dari rasio *Non-Performing Loan* (NPL) sebesar 2,57%, masih berada di bawah ambang batas risiko kredit ($\leq 5\%$) (Grafik 3.1).

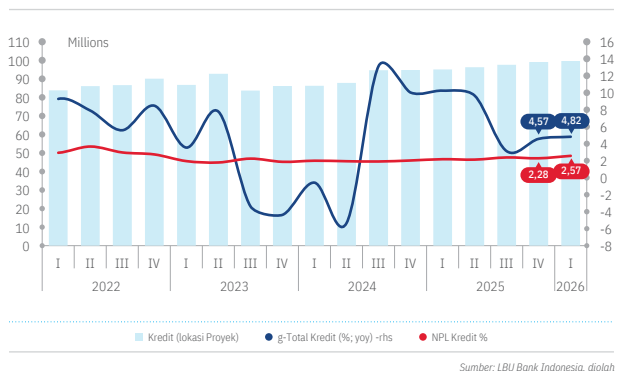
Kredit yang tumbuh tinggi pada periode laporan, utamanya didorong oleh jenis kredit konsumsi yang tumbuh tinggi sebesar 10,43% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 9,83% (yoy) (Grafik 3.2). Selain itu, kredit modal kerja juga masih mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 1,13%, walaupun melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,56% (yoy). Sejalan dengan itu, kinerja penyaluran kredit investasi juga tumbuh positif pada triwulan I 2026 sebesar 6,98% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,34% (yoy) (Grafik 3.3).

Berdasarkan jenis usahanya, penyaluran kredit konvensional dan pembiayaan syariah masing-masing tumbuh sebesar 4,92% (yoy) dan 17,82% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 3.4). Pertumbuhan kredit baik konvensional maupun syariah terpantau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh masing-masing sebesar 3,75% (yoy) dan 17,63% (yoy).

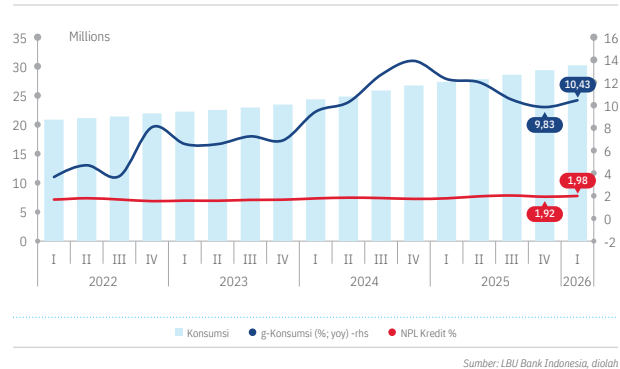
Secara spasial, kredit Rumah Tangga Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan positif didukung dengan beberapa pelanggaran kebijakan makroprudensial yang berlanjut, seperti insentif berupa kelonggaran uang muka (*down payment*) nol persen, insentif pada penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR), dan insentif kredit kendaraan bermotor (KKB).

Kinerja perbankan dalam penyaluran kredit pada sektor UMKM pada periode laporan juga masih tercatat tumbuh pada triwulan I 2026. Pertumbuhan kredit UMKM terpantau sebesar

Grafik 3.1. Perkembangan Kredit dan NPL Prov. Lampung



Grafik 3.2. Kredit Konsumsi Prov. Lampung

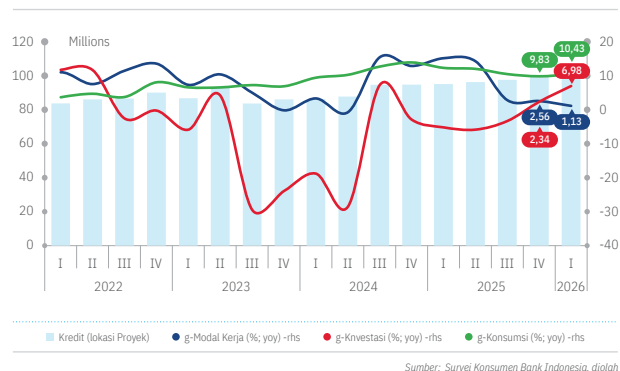


1,87% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,43% (yoy) (Grafik 3.5). Sinergi pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait untuk mengembangkan UMKM menjadi salah satu push factor yang mendorong terjadinya peningkatan kredit pada sektor ini. Pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan laporan utamanya didorong oleh UMKM sektor kecil.

Bank Indonesia juga mendukung instrumen makroprudensial yang akomodatif, termasuk penguatan KLM, mempertahankan rasio Loan to Value (LTV) dan *Financing to Value* (FTV) properti hingga 100%, serta kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) yang tetap berada pada kisaran target 84–94%, diharapkan dapat memperkuat fungsi intermediasi perbankan dan meningkatkan akses pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk UMKM. Dengan dukungan likuiditas yang memadai dan transmisi suku bunga yang lebih efektif, sektor usaha diharapkan memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas untuk mendukung aktivitas produksi, investasi, dan ekspansi usaha secara berkelanjutan.

Sejak 1 Desember 2025, Bank Indonesia memperkuat KLM melalui skema berbasis kinerja (*performance-based*) dan berorientasi ke depan (*forward-looking*), sehingga insentif tidak lagi hanya didasarkan pada realisasi penyaluran kredit, tetapi juga mempertimbangkan komitmen pertumbuhan kredit dan efektivitas transmisi suku bunga perbankan. KLM diberikan melalui dua jalur, yaitu *lending channel* yang ditujukan

Grafik 3.3. Kredit Prov. Lampung berdasarkan Jenis Penggunaan



untuk mendorong penyaluran kredit kepada sektor prioritas meliputi sektor pertanian, industri dan hilirisasi; sektor jasa termasuk ekonomi kreatif; sektor konstruksi, real estat dan perumahan; serta sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan. Selain itu, KLM juga diberikan melalui interest rate channel yang mendorong percepatan transmisi kebijakan moneter melalui penyesuaian suku bunga kredit perbankan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Sejak 16 Desember 2025, besaran KLM ditetapkan paling tinggi sebesar 4,5% dari DPK melalui lending channel dan paling tinggi sebesar 1% dari DPK melalui interest rate channel.

Hingga minggu pertama Maret 2026, insentif KLM yang telah disalurkan dalam skala nasional mencapai Rp427,1 triliun, terdiri dari Rp357,6 triliun melalui *lending channel* dan Rp69,5 triliun melalui *interest rate channel*. Kebijakan tersebut diharapkan semakin memperkuat fungsi intermediasi perbankan, meningkatkan akses pembiayaan bagi dunia usaha termasuk UMKM, serta mendukung pertumbuhan kredit nasional yang pada tahun 2026 diperkirakan tetap berada pada kisaran 8–12% guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

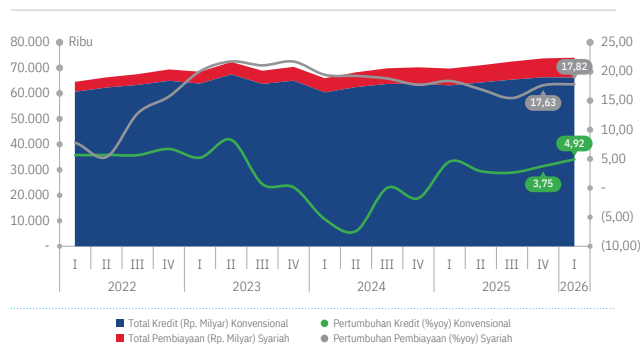
Dukungan berkelanjutan juga dilakukan oleh Bank Indonesia melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang diarahkan untuk menjaga stabilitas

perekonomian sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia tanggal 16–17 Maret 2026, BI-Rate dipertahankan pada level 4,75%, dengan suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,75% dan *Lending Facility* sebesar 5,50%. Keputusan tersebut ditempuh untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah serta memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2026–2027. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter, termasuk intervensi di pasar valas dan pengelolaan likuiditas, guna menjaga ketahanan eksternal dan stabilitas perekonomian nasional.

3.1.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga

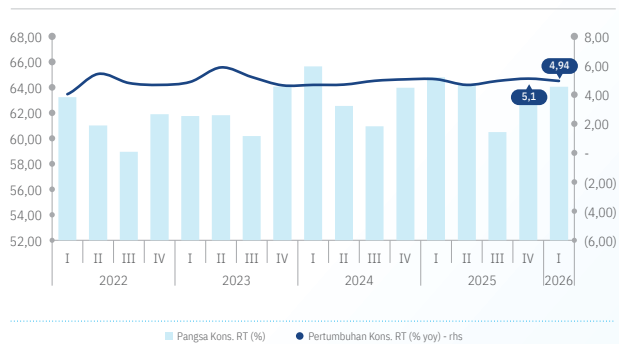
Konsumsi rumah tangga (RT) memiliki peran besar dalam perekonomian Lampung. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Lampung menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 4,94 % (yoy) (Grafik 3.6), meskipun sedikit termoderasi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,10% (yoy). Pertumbuhan ini tidak lepas dari peran sektor rumah tangga yang memiliki andil terbesar sebagai penopang utama perekonomian Lampung yaitu 64,05% dari PDRB, meningkat dari andil triwulan sebelumnya sebesar 63,08%.

Grafik 3.4. Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Usaha (Konvensional dan Syariah)



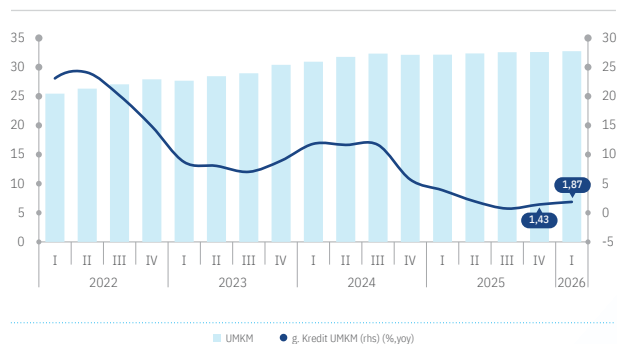
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.6. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga



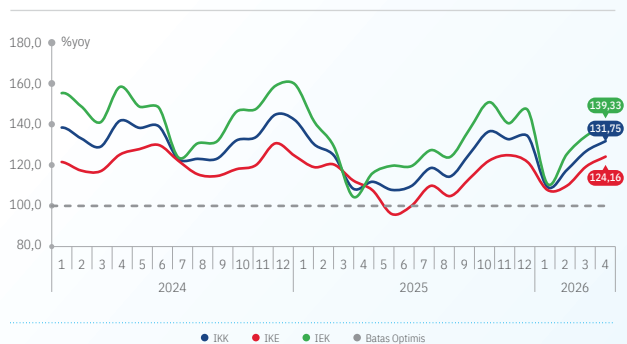
Sumber: BPS Prov. Lampung, diolah

Grafik 3.5. Perkembangan Kredit UMKM Provinsi Lampung



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.7. Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Survei Konsumen BI, diolah

Dukungan dari sektor konsumsi rumah tangga tercermin dari hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia dengan capaian Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang secara rata-rata pada triwulan I 2026 meningkat dan berada di atas batas optimis indeks, atau senilai 129,29, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berada pada nilai 120,33. Positifnya IKK didorong oleh pertumbuhan positif rata-rata triwulanan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumsi (IEK), yang masing-masing senilai 113,00 dan 127,67 (Grafik 3.7).

Pada triwulan I 2025, kredit konsumsi rumah tangga tumbuh dengan realisasi sebesar Rp30,18 triliun atau tumbuh sebesar 10,43% (yoy) (Grafik 3.8). Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 9,83% (yoy).

Pertumbuhan yang tetap positif pada kredit sektor rumah tangga didukung baik oleh peningkatan pada Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan kinerja positif Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang masing-masing tumbuh sebesar 34,25% (yoy), 10,73% (yoy) dan 10,56% (yoy).

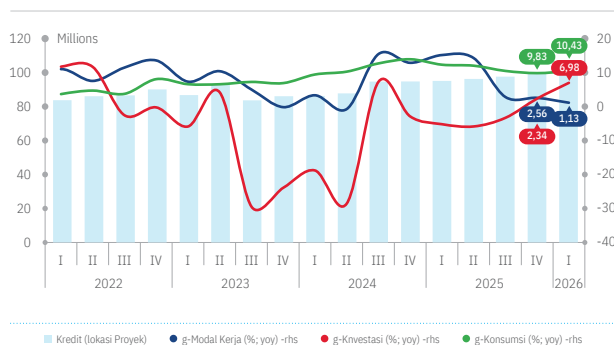
Selain itu, **KPR tumbuh positif sebesar 10,73% (yoy) pada triwulan berjalan**, walaupun sedikit termoderasi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 11,79% (yoy). Berlanjutnya insentif berupa pelonggaran rasio *Loan to Value* (LTV) / *Financing to Value* (FTV) untuk kredit / pembiayaan

properti serta insentif fiskal berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti terutama menyasar segmen menengah. Selain itu, insentif PPN DTP juga diberikan untuk pembelian rumah komersial dengan nilai di bawah Rp 5 miliar yang mendorong pertumbuhan kredit Rumah Toko atau Rumah Kantor. Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya mendukung program satu juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat turut berupaya memberikan subsidi bunga dan program perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan penyaluran KPR di Provinsi Lampung.

Kualitas kredit Rumah Tangga juga terjaga baik ditengah peningkatan kinerja kredit yang tercermin dari besaran *Non-Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah yang berada di bawah ambang batasnya 5%. NPL kredit RT pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 1,98% (Grafik 3.9).

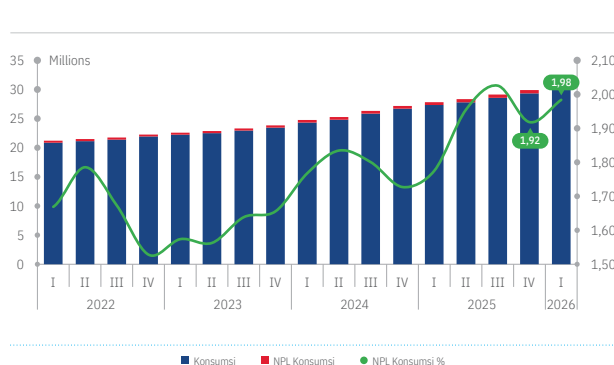
Kinerja kredit yang baik sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga pada triwulan I 2026 di Provinsi Lampung yang mencapai Rp49,06 Triliun atau 79,30% dari total DPK. Pertumbuhan DPK rumah tangga pada triwulan laporan tercatat sebesar 4,32% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,95% (yoy). Komposisi DPK rumah tangga pada triwulan I 2026 didominasi oleh tabungan (pangsa 79,30%), deposito (pangsa 19,10%), dan giro (pangsa 1,60%) (Grafik 3.10).

Grafik 3.8. Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga



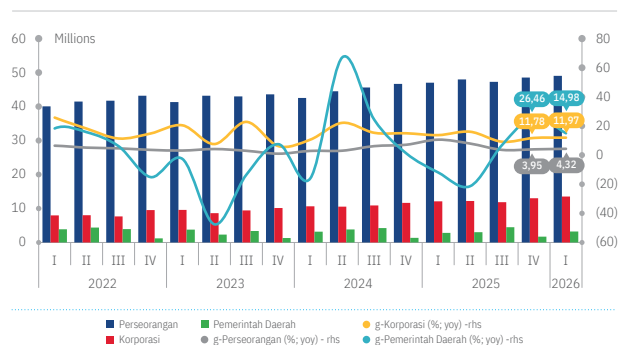
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.9. NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga



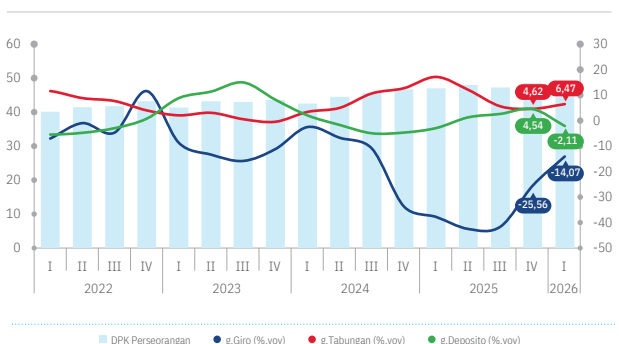
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.10. DPK Berdasarkan Jenis Nasabah



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.11. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Berdasarkan Jenis Penggunaan



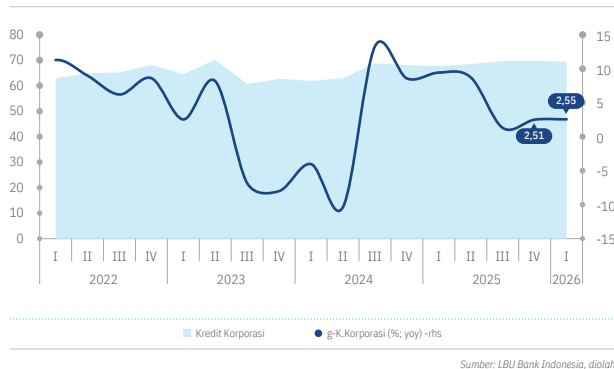
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Pertumbuhan DPK rumah tangga pada triwulan laporan terjadi karena didukung utamanya oleh perkembangan DPK tabungan sebesar 6,47% (yoy), meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,62% (yoy). Kinerja DPK pada instrumen giro juga mencatatkan peningkatan, dari sebelumnya terkontraksi sebesar 25,56% pada triwulan IV 2025, menjadi terkontraksi sebesar 14,07% pada triwulan berjalan. Di sisi lain pertumbuhan DPK rumah tangga masih tertahan oleh kinerja instrumen deposito yang mengalami kontraksi sebesar 2,11% (yoy), setelah bertumbuh positif pada triwulan sebelumnya sebesar 4,54% (Grafik 3.11).

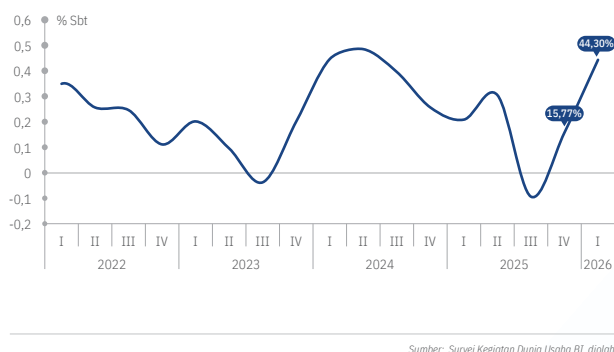
3.1.2 Asesmen Sektor Korporasi

Kinerja penyaluran kredit perbankan kepada sektor korporasi pada triwulan I 2026 meningkat. Kredit perbankan Provinsi Lampung untuk korporasi pada triwulan I 2026 tercatat mencapai Rp69,46 Triliun atau tumbuh sebesar 2,55% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,51% (yoy) (Grafik 3.12). Pertumbuhan kredit di sektor korporasi ini turut mendorong kinerja kredit Provinsi Lampung secara menyeluruh karena memiliki pangsa yang dominan, yaitu sebesar 69,72% dari total kredit yang disalurkan. Kinerja kredit korporasi yang meningkat sejalan dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Kegiatan Usaha yang tercatat sebesar 44,30%, meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 15,77% (Grafik 3.13).

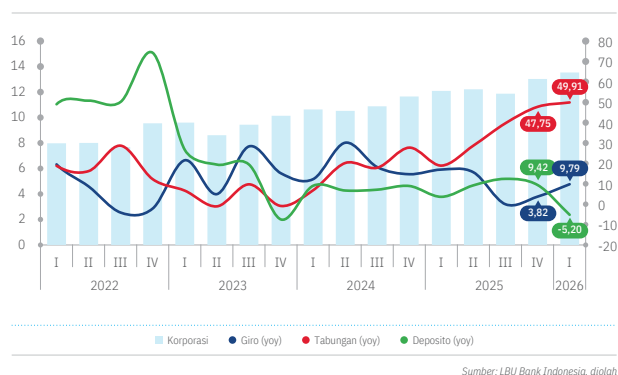
Grafik 3.12. Pertumbuhan Kredit Korporasi



Grafik 3.13. SBT Perkembangan Kegiatan Usaha



Grafik 3.14. DPK Kredit Korporasi



Sementara itu, pertumbuhan DPK korporasi di Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 13,71% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 11,71% (yoy). Pertumbuhan DPK korporasi utamanya didukung oleh pertumbuhan instrumen tabungan yang tercatat sebesar 49,91% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 47,75% (yoy). Komponen giro juga mengalami pertumbuhan sebesar 9,79% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,71% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan DPK korporasi tertahan pada instrumen deposito, yang mengalami kontraksi sebesar 5,20% (yoy) pada triwulan berjalan, setelah bertumbuh pada triwulan sebelumnya sebesar 9,42% (yoy) (Grafik 3.14).

3.2 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kredit UMKM tumbuh positif pada triwulan I 2026. Kredit yang disalurkan pada periode laporan tercatat sebesar Rp32,748 Triliun atau tumbuh 1,87% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,43% (yoy). Pertumbuhan tersebut didukung oleh pertumbuhan UMKM Mikro dan Menengah dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 1,80% (yoy) dan -4,56% (yoy), setelah sempat terkontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 3,77% (yoy) dan 9,82% (yoy). Sementara itu, kredit UMKM Kecil juga masih bertumbuh sebesar 5,05% (yoy) pada triwulan berjalan, walaupun nilai tersebut melandai dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 16,19% (yoy) (Grafik 3.15).

Lebih lanjut, berdasarkan pangsaanya, kredit UMKM mikro masih mendominasi dengan pangsa sebesar 52,63%, diikuti dengan UMKM kecil sebesar 33,03% dan UMKM menengah dengan pangsa 14,34% (Grafik 3.16).

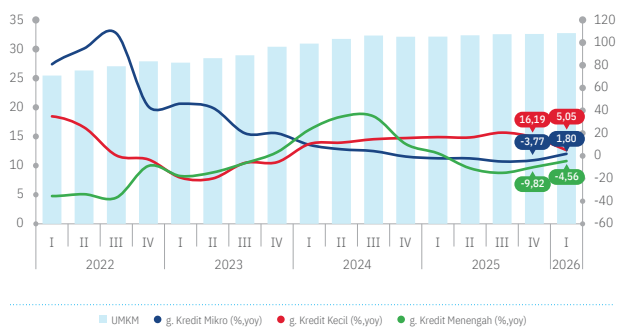
Lebih lanjut, ditinjau berdasarkan penggunaannya, kredit UMKM masih didominasi oleh kredit modal kerja dengan pangsa sekitar 80% dari total kredit UMKM (Grafik 3.17). Perkembangan pada triwulan berjalan mengindikasikan adanya perbaikan kinerja pembiayaan UMKM. Kredit modal kerja tumbuh sebesar 0,08%,

berbalik dari kontraksi 17,83% pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, kredit investasi masih mengalami kontraksi sebesar 0,04%, namun meningkat signifikan jika dibandingkan kontraksi sebesar 21,93% pada triwulan sebelumnya (Grafik 3.18). Kondisi tersebut mengindikasikan mulai pulihnya kebutuhan pembiayaan UMKM, baik untuk mendukung aktivitas operasional maupun ekspansi usaha.

Secara umum kinerja kredit UMKM tetap kuat dan mencerminkan kondisi pasar UMKM yang stabil sekaligus prospektif. Kinerja positif ini mencerminkan tingginya kepercayaan sektor perbankan untuk terus memberikan dukungan pembiayaan kepada para pelaku UMKM di Provinsi Lampung.

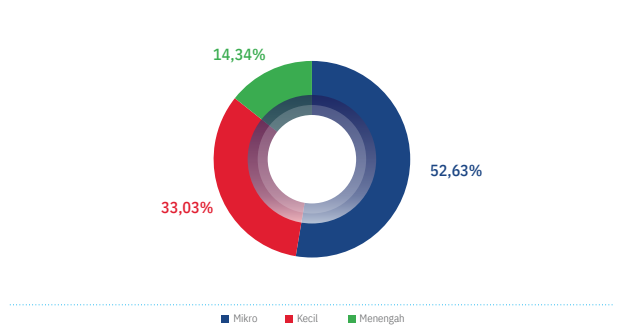
Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, diperlukan dukungan stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan yang kokoh. Untuk mendukung upaya tersebut salah satunya diperlukan pemberdayaan sektor riil khususnya pengembangan UMKM yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam rangka optimalisasi kontribusi UMKM, salah satunya dilakukan melalui pemasaran produk UMKM secara global. Peningkatan akses dan jangkauan akses UMKM terhadap jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan tersebut. Sehingga pengembangan UMKM tidak luput dari kontribusi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan.

Grafik 3.15. Pertumbuhan Kredit UMKM



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.16. Pangsa Kredit UMKM

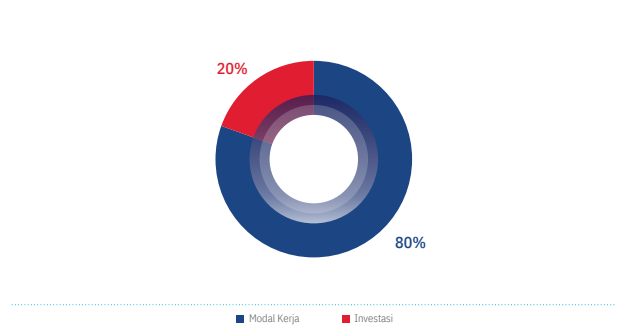


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Dalam upaya mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan dari sisi supply melalui berbagai instrumen makprudensial. Pertama, Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makprudensial (RPIM) yang diatur dalam PBI No.23/13/PBI/2021 dan disempurnakan melalui PBI No.24/3/PBI/2022. RPIM merupakan rasio yang menggambarkan porsi pembiayaan inklusif bank dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, korporasi UMKM, dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR), sehingga dapat memperkuat inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

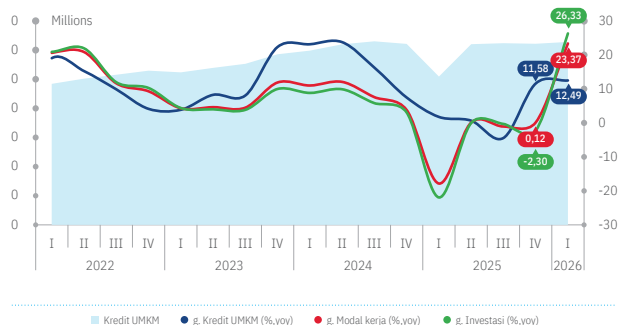
Bank Indonesia terus mendorong peningkatan akses keuangan UMKM yang dilakukan melalui kebijakan baik dari sisi demand maupun sisi supply. Dari sisi *demand*, UMKM diarahkan untuk meningkatkan kapabilitasnya sehingga mampu masuk ke dalam kategori bankable, melalui berbagai bentuk program bantuan teknis berlandaskan 3 pilar, yaitu (1) Korporatisasi, melalui penguatan kelembagaan dan perluasan mitra, (2) Peningkatan kapasitas secara *end-to-end*, melalui penguatan kewirausahaan dan perluasan pasar dan (3) Pembiayaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan perluasan digitalisasi keuangan. Khususnya dalam pilar pembiayaan, Bank Indonesia mendorong percepatan akses pembiayaan UMKM melalui penyediaan data & informasi UMKM yang potensial mendapat pembiayaan (BISAID), penyediaan

Grafik 3.17. Kredit UMKM berdasarkan Jenis



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.18. Kredit UMKM berdasarkan Penggunaan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

dan pendampingan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan secara digital (SIAPIK), serta fasilitasi pelaksanaan *business matching* pembiayaan bersama perbankan.

Sebagai wujud dukungan di tingkat regional, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung turut mengembangkan UMKM agar lebih kuat dan berdaya saing antara lain melalui (1) Program Unggulan, meliputi pemberian pelatihan, pendampingan, penyediaan informasi, serta fasilitasi akses keuangan dan pasar dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku usaha, memperkuat kelembagaan, serta mendorong hilirisasi produk

agar lebih berdaya saing; dan (2) Pemberdayaan Usaha Syariah, meliputi kegiatan pengembangan kemandirian ekonomi pesantren berbasis pendekatan manajemen ekonomi dan bisnis modern, yang memiliki peran penting dalam membangun pondasi ekonomi nasional yang kuat, serta diharapkan dapat mendorong pesantren sebagai penggerak utama dalam ekosistem rantai nilai halal yang fokus pada bahan baku, teknologi pengolahan, sertifikasi halal, dan pemisahan produk halal dari kontaminasi, melalui serangkaian program pendampingan dan bimbingan teknis.



Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tercatat mengalami *net inflow* sebesar Rp1,11 triliun. Kondisi ini sejalan dengan kinerja ekonomi yang membaik. Sementara itu, kondisi aliran uang kartal outflow mengalami kenaikan sebesar negatif 4,29% (yoy) yang tumbuh dari triwulan sebelumnya dengan *outflow* sebesar negatif 22,31% (yoy).



Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (RTGS) tumbuh negatif jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp31,37 miliar menjadi sebesar Rp29,20 miliar. Transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) juga mengalami kontraksi sebesar 18,86% (yoy). Secara nominal, transaksi kartu ATM/Debit mengalami penurunan sebesar 4,46% (yoy), kontras dengan triwulan sebelumnya yang mengalami peningkatan sebesar 25,85% (yoy).



Sampai dengan Maret 2026, *merchant* QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 857.433 *merchant*. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan *merchant* QRIS di wilayah Sumatra. Sementara, jumlah pengguna QRIS di Provinsi Lampung adalah sebesar 1.475.273. Jumlah ini mengalami pertumbuhan 3,33% (qtq) dari triwulan sebelumnya.

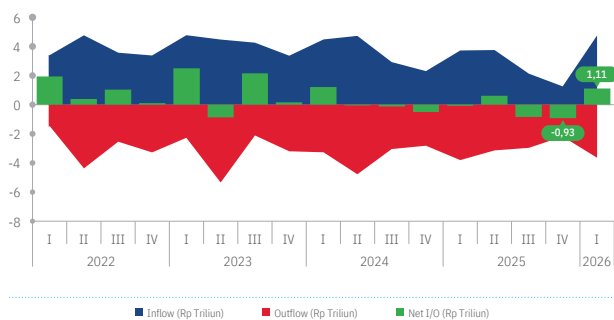
4.1. Perkembangan Transaksi Sistem Pembayaran Tunai

Perkembangan transaksi sistem pembayaran tunai dilihat dari beberapa indikator, antara lain jumlah aliran uang masuk dari Perbankan ke Bank Indonesia (*inflow*), jumlah aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke Perbankan (*outflow*), termasuk dukungan penyediaan Uang Layak Edar (ULE) kepada masyarakat luas melalui berbagai kegiatan, seperti penukaran uang melalui Bank Indonesia, Kas Keliling, dan Kas Titipan.

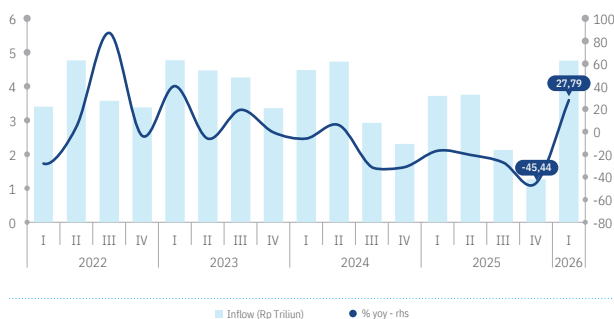
4.1.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal

Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tercatat mengalami *net inflow* sebesar Rp1,11 triliun. Kondisi ini berbeda dengan triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan *net outflow* sebesar Rp0,93 triliun. Kondisi *net inflow* pada triwulan I 2026, di tengah kinerja ekonomi yang cenderung membaik. (Grafik 4.1). Secara lebih rinci, dapat dilihat bahwa aliran uang kartal inflow tercatat meningkat sebesar 27,79% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 4.2), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat menurun sebesar 45,44% (yoy). Selanjutnya, aliran uang kartal *outflow* menurun sebesar 4,29% (yoy) (Grafik 4.3), tumbuh dari triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 22,31% (yoy).

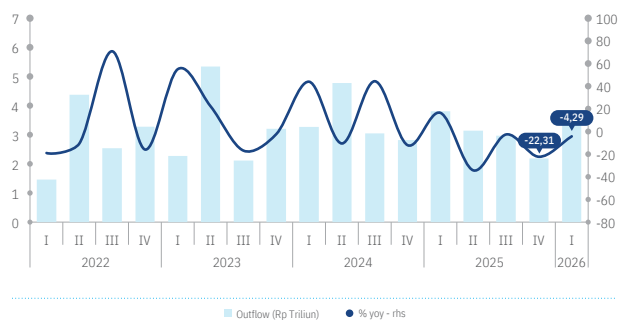
Grafik 4.1. Perkembangan Aliran Uang Kartal Triwulanan



Grafik 4.2. Aliran Uang Kartal Inflow



Grafik 4.3. Aliran Uang Kartal Outflow

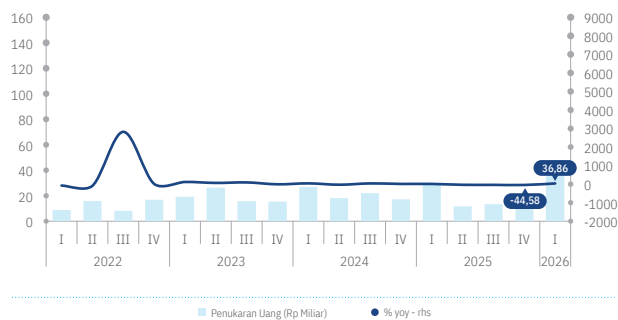


4.1.2 Penyediaan Uang Layak Edar

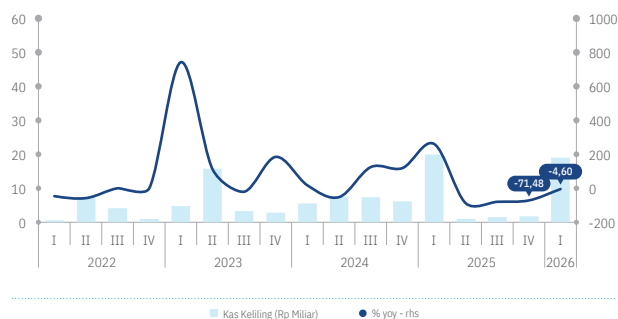
Dalam pelaksanaan tugas pada bidang Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia melakukan pengedaran uang ke berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yakni tersedia dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan tentunya dalam kondisi yang layak edar.

Sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan uang kartal yang layak edar (*clean money policy*) tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung secara berkala melaksanakan

Grafik 4.4. Penukaran Uang Melalui BI



Grafik 4.5. Kas Keliling



layanan penukaran Uang Tidak Layak Edar (UTLE) baik secara langsung melalui loket penukaran kantor Bank Indonesia dan kas keliling, serta bersinergi dengan Perbankan untuk turut menerima penukaran uang. Selain itu, untuk terus meningkatkan kualitasnya (*soil level*), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung juga secara berkala melakukan kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE).

Pada triwulan I 2026 penukaran uang melalui Bank Indonesia tercatat sebesar Rp41,12 miliar, meningkat signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat hanya sebesar Rp9,55 miliar (Grafik 4.4). Secara lebih rinci pada triwulan I 2026, penukaran melalui kas keliling tercatat sebesar Rp18,99 miliar meningkat jika dibandingkan dengan Rp1,74 miliar pada triwulan sebelumnya (Grafik 4.5). Hal tersebut didorong oleh permintaan masyarakat terhadap kebutuhan uang menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026.

Selanjutnya, KPwBI Provinsi Lampung tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan Uang Layak Edar (ULE) khususnya di daerah terpencil melalui kegiatan kas titipan dan kas keliling 3T (Terdepan, Terluar dan Terpencil). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung saat ini memiliki 1 (satu) Kas Titipan yang berada di Liwa, Kabupaten Lampung Barat dengan Bank Pengelola PT BRI KC Liwa. Kas Titipan Liwa memiliki 4 (empat) Bank Peserta yang terdiri dari BNI, Bank Mandiri, BSI, dan BPD Lampung. Adapun selama triwulan I 2026, transaksi keluar kas

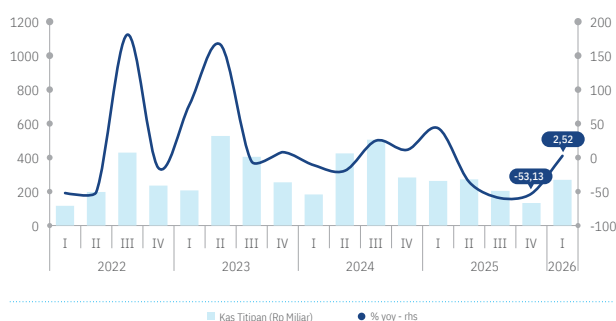
titipan Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp269,11 miliar (Grafik 4.6), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp132,63 miliar.

Pada periode laporan, UTLE yang dimusnahkan tercatat sebesar Rp513,19 miliar. Dibandingkan dengan nominal inflow, persentase pemusnahan tersebut tercatat sebesar 10,79%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 68,74% (Grafik 5.7).

4.1.3 Perkembangan Temuan Uang Palsu

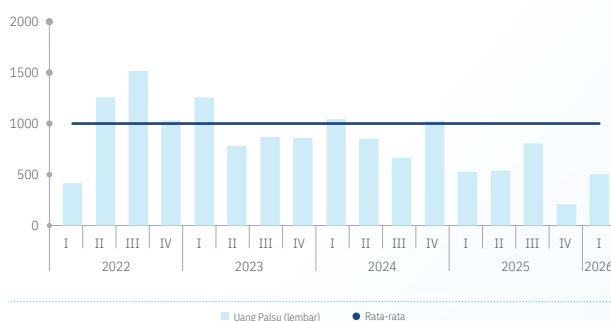
Pada triwulan I 2026, terdapat temuan uang palsu sebanyak 504 lembar di Provinsi Lampung (Grafik 4.8). Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan temuan uang palsu pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 210 lembar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah uang palsu yang ditemukan mengalami penurunan sebesar 4,18% (yoy). Berdasarkan komposisinya, temuan uang palsu pada triwulan I 2026 didominasi oleh Uang Pecahan Besar (UPB) (Grafik 4.9), dengan pecahan terbanyak Rp100.000. Sementara itu, untuk Uang Pecahan Kecil (UPK) tercatat ditemukan dalam lembar pecahan Rp20.000. Upaya pencegahan dan penanganan uang palsu tetap terus dilakukan oleh KPwBI Provinsi Lampung melalui sosialisasi dan edukasi program Cinta Bangsa Pahami Rupiah yang mencakup materi ciri-ciri keaslian uang rupiah (CIKUR) kepada masyarakat secara berkelanjutan dan melalui berbagai *platform*. Selain itu, sinergi

Grafik 4.6. Kas Titipan



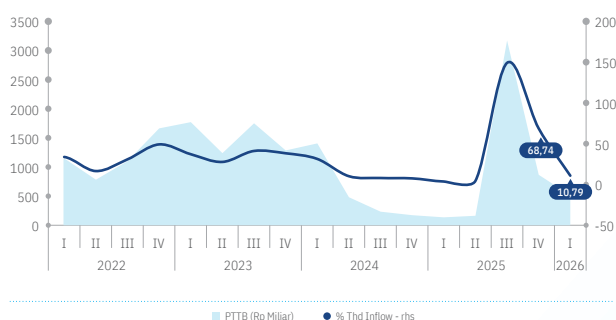
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.8. Temuan Uang Palsu



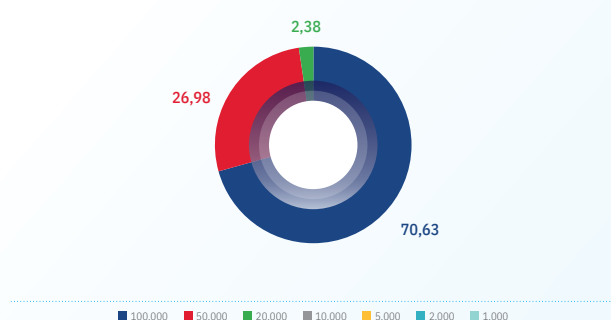
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.7. Perkembangan Pemusnahan UTLE



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.9. Pecahan Uang Palsu Tw I 2026



Sumber : Bank Indonesia

dengan perbankan dan pihak aparaturnya hukum juga dilakukan sebagai upaya untuk terus menurunkan tindak kejahatan peredaran uang palsu di Provinsi Lampung.

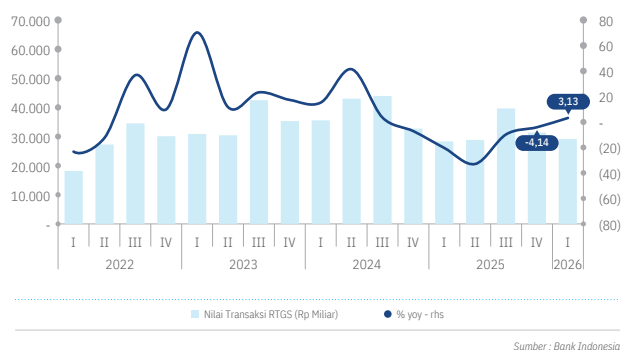
4.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia, *Real Time Gross Settlement* (RTGS) tercatat mengalami pelambatan pada triwulan I 2026. Hal serupa juga terjadi pada transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang tercatat masih mengalami pertumbuhan negatif.

Transaksi pembayaran melalui SKNBI tercatat terkontraksi sebesar 18,86% (yoy), kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi sebesar 9,31% (yoy) (Grafik 4.10). Berdasarkan jenisnya, fenomena melambatnya penurunan transaksi kliring tersebut didorong oleh pertumbuhan kliring debit yang tercatat terkontraksi sebesar 3,74% dibandingkan triwulan sebelumnya yang meningkat sebesar 18,17%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, nominal transaksi kliring debit tercatat terkontraksi sebesar 46,24% (yoy). Hal tersebut berbeda dengan nominal transaksi *kliring* kredit juga mengalami kenaikan sebesar 12,62% (yoy).

Selanjutnya, sejalan dengan SKNBI, nilai transaksi pembayaran melalui RTGS tercatat tumbuh negatif jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yang meningkat dari sebesar Rp31,37 miliar menjadi sebesar Rp29,20 miliar, namun jika dibandingkan pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (yoy) transaksi RTGS meningkat sebesar 3,13% (yoy) (Grafik 4.11). Adapun dinamika pertumbuhan transaksi RTGS tersebut merupakan salah satu indikator atas membaiknya aktivitas perekonomian di Provinsi Lampung. Hal ini juga menjadi

Grafik 4.11. Perkembangan Transaksi RTGS



indikasi perubahan *landscape* penggunaan sistem pembayaran di Provinsi Lampung seiring peningkatan akseptasi sistem pembayaran non tunai.

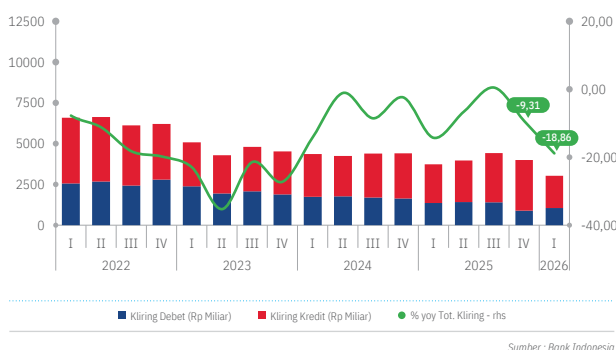
Lebih lanjut, untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan transfer dana yang lebih efisien, cepat (*real-time*), serta tersedia setiap saat (24/7), Bank Indonesia telah mengembangkan BI-FAST sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang dapat mengakomodasi kebutuhan dimaksud. Dengan kehadiran BI-FAST, diharapkan dapat memperkuat ketahanan sistem pembayaran ritel nasional melalui penyediaan alternatif terhadap infrastruktur sistem pembayaran nasional eksisting yang terbatas pada jam operasional tertentu.

Fitur BI-FAST antara lain mencakup operasional setiap saat (24/7), dana diterima secara *real-time* oleh nasabah dan bank, melayani transfer kredit (*push*) dan debit (*pull*), dapat menggunakan *proxy address* (antara lain nomor *handphone* dan *email*) sebagai pengganti nomor rekening, notifikasi kepada nasabah secara otomatis, *fraud detection system* dan *Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism* (AML/CFT). BI-FAST telah diimplementasikan mulai Desember 2021 melalui kanal *mobile/internet* maupun *counter*, yang kemudian akan dikembangkan melalui kanal lainnya, a.l. QRIS, ATM, dan EDC.

4.3. Perkembangan Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

Sejalan dengan peningkatan akseptasi pembayaran non tunai, preferensi metode pembayaran masyarakat mulai bergeser dan menuntut pembayaran serba *mobile*, cepat, serta aman melalui berbagai *platform*. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran memiliki tugas untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar. Perkembangan sistem pembayaran harus selalu berada pada koridor ketentuan yang berlaku demi kelancaran dan keamanan berjalannya kegiatan sistem pembayaran nasional.

Grafik 4.10. Perkembangan Transaksi Kliring



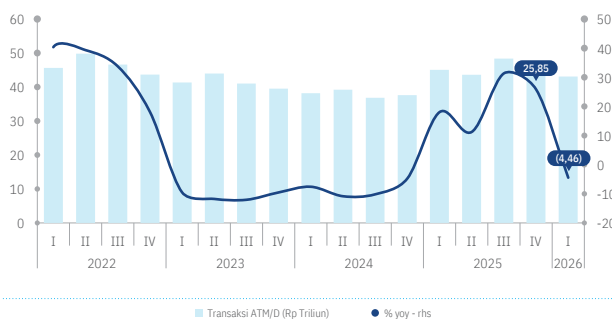
4.3.1. Perkembangan Transaksi APMK

Pada periode laporan, nominal transaksi kartu ATM/Debit tercatat menurun sebesar 4,46% (yoy), berbeda dengan triwulan sebelumnya yang mengalami peningkatan sebesar 25,85% (yoy) (Grafik 4.12). Penurunan transaksi kartu ATM/Debit tersebut terpantau juga sejalan dengan hasil Survei Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, dimana indeks pengeluaran konsumsi untuk barang tahan lama masih menunjukkan angka yang optimis (>100) pada periode triwulan I 2026 tetapi memiliki nilai rata-rata sebesar 111,17 yang menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 116,67 (Grafik 4.13).

Berbeda dengan perkembangan kartu ATM/Debit, transaksi pembayaran melalui kartu kredit pada triwulan I 2026 terpantau naik sebesar 26,13% (yoy) (Grafik 4.14), melanjutkan tren peningkatan pada triwulan sebelumnya sebesar 21,98% (yoy).

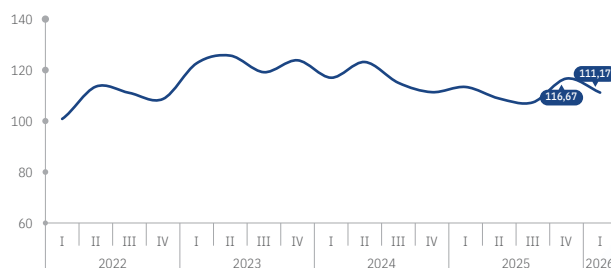
Secara lebih rinci, berdasarkan jenis transaksinya terlihat bahwa pertumbuhan transaksi kartu kredit yang lebih tinggi disebabkan oleh ekspansi transaksi belanja yang tercatat mengalami kenaikan sebesar 27,35% (yoy), melanjutkan tren peningkatan di triwulan sebelumnya yakni sebesar 21,87% (yoy). Kontras dengan transaksi belanja, transaksi tunai tercatat terkontraksi sebesar 25,26%, berbeda dengan triwulan sebelumnya yang mengalami ekspansi signifikan sebesar 11,78% (Grafik 4.15).

Grafik 4.12. Perkembangan Transaksi Kartu ATM/D



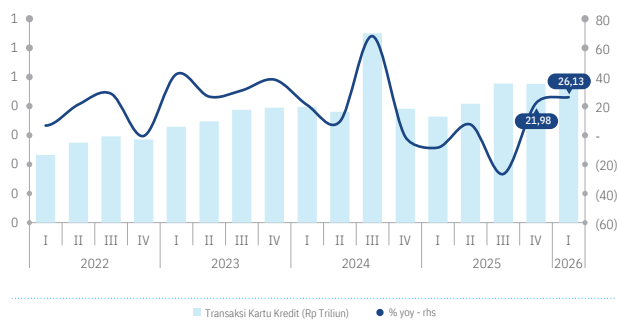
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.13. Indeks Pengeluaran Konsumsi Barang Tahan Lama



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.14. Perkembangan Transaksi Kartu Kredit



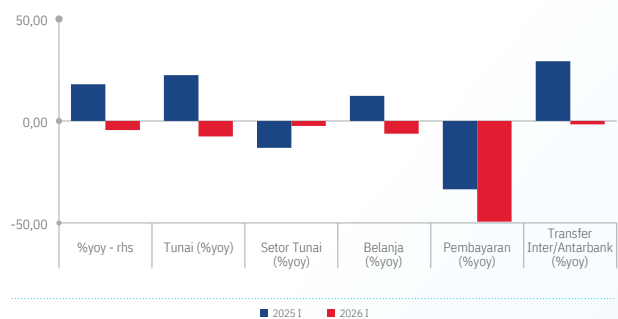
Sumber : Bank Indonesia

Namun, hasil Survei Konsumen yang dilakukan oleh KPwBI Provinsi Lampung mengindikasikan bahwa pangsa penghasilan untuk pembayaran cicilan terpantau mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya meskipun transaksi belanja tinggi. (Grafik 4.16).

4.3.2. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik

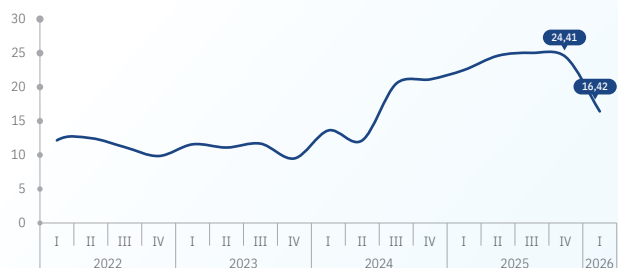
Pada triwulan I 2026, dana *float* atau nilai uang elektronik yang merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna tercatat sebesar Rp255,33 miliar (Grafik 4.17), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp227,15 miliar. Berdasarkan jenis transaksinya, perkembangan uang elektronik pada triwulan I 2026 mengalami ekspansi pada transaksi belanja sebesar 27,68% (yoy) meningkat jika dibandingkan pada

Grafik 4.15. Pertumbuhan Kartu Kredit Per Jenis Transaksi (% yoy)



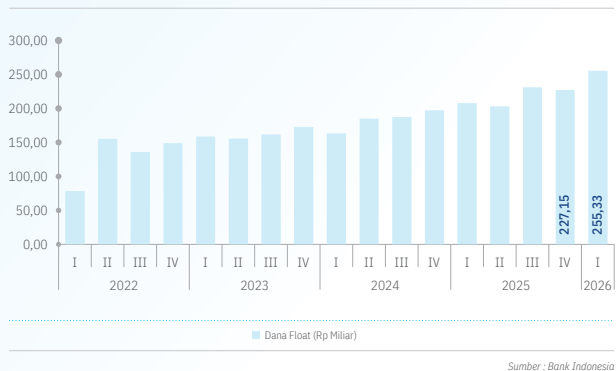
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.16. Pangsa Penghasilan untuk Pembayaran Cicilan



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.17. Perkembangan Dana Float UE

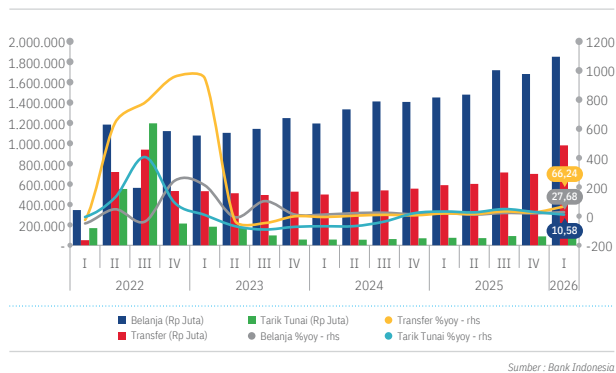


triwulan sebelumnya yang sebesar 19,53% (yoy). Hal ini sejalan dengan transaksi transfer yang juga meningkat signifikan menjadi sebesar 66,24% (yoy), sedangkan transaksi tarik tunai melanjutkan tren penurunan triwulan sebelumnya sebesar 10,58% (yoy) (Grafik 4.18).

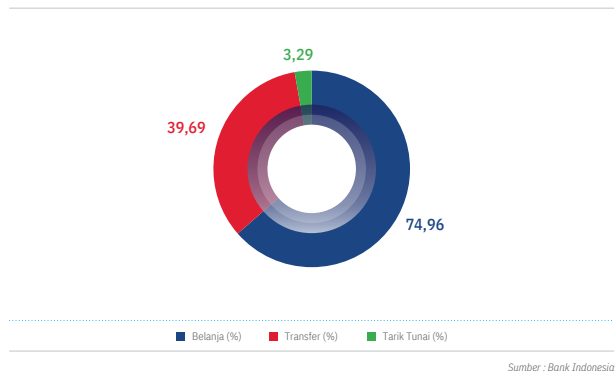
Berdasarkan pangsaannya, transaksi uang elektronik pada periode laporan sebagian besar berasal dari transaksi belanja dengan pangsa mencapai 74,96% (Grafik 4.19). Sementara itu, pada kedua jenis transaksi lainnya, yaitu transfer dan tarik tunai pangsaannya masing-masing sebesar 39,69% dan 3,29%.

Secara umum, tren peningkatan penggunaan digitalisasi pembayaran di Provinsi Lampung juga tergambar dari terus membaiknya Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), yakni dari 5,63 di tahun 2022 menjadi sebesar 5,77 di tahun 2023 (Grafik 4.20).

Grafik 4.18. Perkembangan Transaksi UE Per Jenis Transaksi



Grafik 4.19. Pangsa Transaksi UE Triwulanan



4.4. Perkembangan Merchant & Pengguna QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

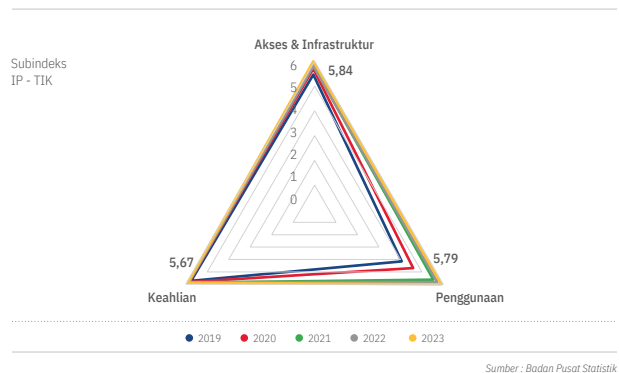
Sampai dengan Maret 2026, *merchant* QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 857.433 *merchant*. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan *merchant* QRIS di wilayah Sumatera (Grafik 4.21).

Secara triwulanan, pertumbuhan tertinggi *merchant* QRIS se-Sumatera pada triwulan I 2026 dicapai oleh Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Lampung dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 164,96%, 50,20%, dan 7,26% (qtq) (Grafik 4.22). Sementara itu berdasarkan pangsaannya, *merchant* QRIS di Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-4 (11,68%) setelah Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Riau (Grafik 4.23). Sampai dengan Maret 2026, jumlah pengguna QRIS di Provinsi Lampung adalah sebesar 1.475.273 (Grafik 4.24). Jumlah ini mengalami pertumbuhan 3,33% (qtq) dari triwulan sebelumnya.

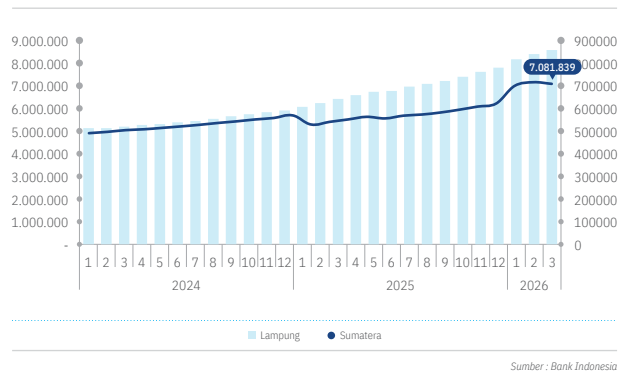
Berbagai strategi program perluasan QRIS telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dalam rangka perluasan QRIS pada triwulan I tahun 2026, antara lain:

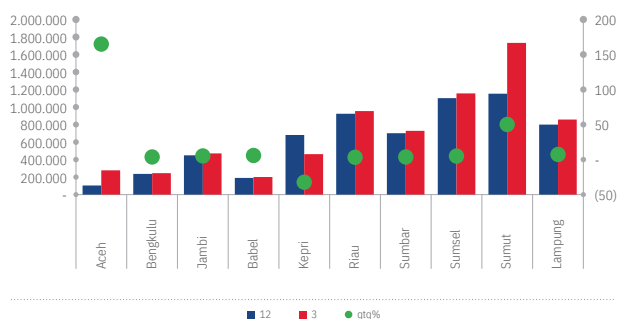
- Edukasi dan sosialisasi kepada siswa/i Sekolah Menengah Atas dan komunitas di Provinsi Lampung dalam program SIGMA QRIS (SInergi Generasi eMAS pakai QRIS).
- Operasi Pasar Murah yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung di 10 titik dalam rangka sosialisasi edukasi pembayaran digital dan tebus murah QRIS WAKAF.

Grafik 4.20. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi & Komunikasi



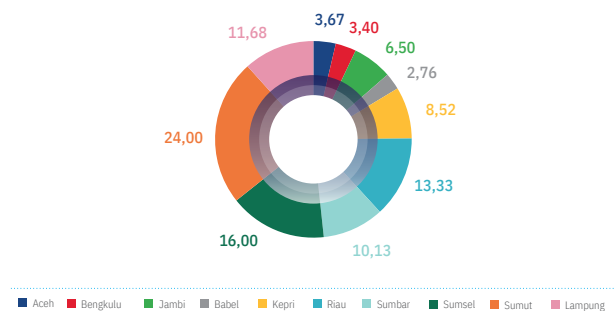
Grafik 4.21. Perkembangan Jumlah Merchant QRIS



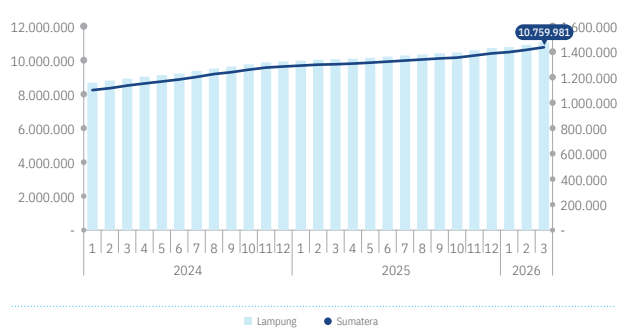
Grafik 4.22. Pertumbuhan Merchant QRIS Triwulanan


Sumber : Bank Indonesia

- Sinergi dan kolaborasi dengan komunitas seperti Kuliner Lampung Festival untuk mendorong penggunaan QRIS dalam bertransaksi, dan memberikan *reward* kepada tenant dengan jumlah transaksi dan nominal terbanyak menggunakan QRIS.
- Penyelenggaraan *capacity building* kepada TP2DD dari masing-masing pemerintah daerah di Provinsi Lampung untuk mendorong elektronifikasi pajak dan retribusi daerah.
- Peningkatan jumlah pengguna melalui QRIS *Experience* kepada ASN di wilayah Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan literasi masyarakat pemerintah daerah.

Grafik 4.23. Pangsa Merchant QRIS di Sumatera


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.24. Perkembangan Pengguna QRIS


Sumber : Bank Indonesia



Ketenagakerjaan & Kesejahteraan

- Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 membaik yang tecermin dari peningkatan jumlah penduduk yang bekerja menjadi 4,91 juta jiwa, atau bertambah 34,53 ribu jiwa (tumbuh 0,71%) dibandingkan Triwulan I 2025.
- Berdasarkan status pekerjaan utama pada Triwulan I 2026, penduduk yang bekerja di sektor informal tercatat sebanyak 3.385,8 ribu orang (68,91%), sedangkan di sektor formal sebanyak 1.527,8 ribu orang (31,09%). Persentase pekerja formal meningkat 1,69% jika dibandingkan dengan periode Triwulan I 2025.
- Berdasarkan hasil Sakernas Triwulan I 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 3,95%, yang berarti sekitar empat orang dari setiap seratus angkatan kerja berada dalam kondisi menganggur. Dibandingkan Triwulan I 2025, TPT menurun sebesar 2,95% (yoy).
- Rata-rata NTP Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 126,63, meningkat secara tahunan meski tertahan secara triwulanan. Rata-rata NTP triwulanan pada triwulan I 2025 sebesar 133,28 sementara pada triwulan IV 2025 sebesar 129,07.
- Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 terpantau mengalami penurunan sebesar 8,43% (yoy), menjadi 860,13 ribu jiwa dari sebelumnya mencapai 939,31 ribu jiwa pada Triwulan I 2025. Dari sisi komposisinya, penduduk miskin di Provinsi Lampung utamanya berada di daerah pedesaan di mana sebagian besar berprofesi sebagai petani.

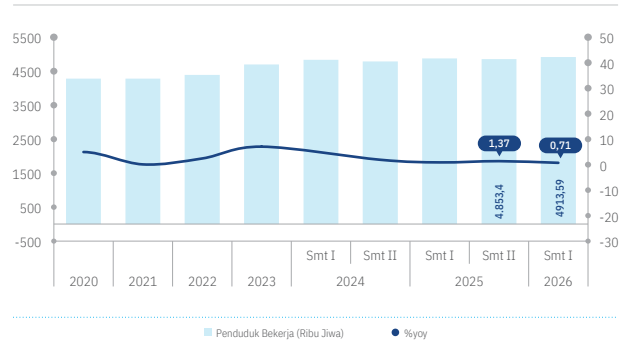
5.1. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 tercatat membaik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut tecermin dari peningkatan jumlah penduduk yang bekerja menjadi 4,91 juta jiwa, atau bertambah 34,53 ribu jiwa atau tumbuh 0,71% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Grafik 5.1). Sejalan dengan hal tersebut, jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Lampung menurun 2,17% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya dari 206,8 ribu jiwa menjadi 202,32 ribu jiwa.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menunjukkan perbaikan. Pada Triwulan I 2026, TPAK tercatat sebesar 70,65%, naik 0,21% poin jika dibandingkan dengan periode Agustus 2025 meskipun mengalami penurunan 0,72% poin (yoy) dibandingkan Triwulan I 2025 (Grafik 5.3). Kondisi ini mencerminkan tetap tingginya partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi di Provinsi Lampung.

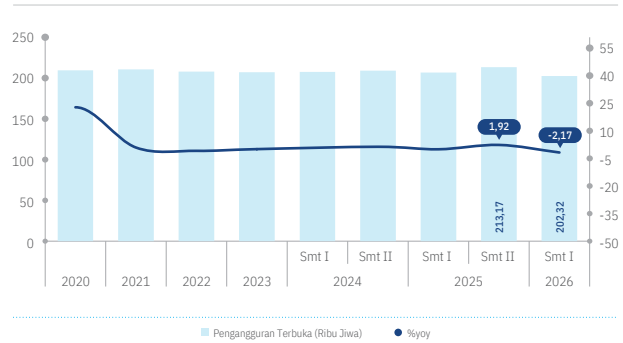
Pada Triwulan I 2026, struktur ketenagakerjaan Provinsi Lampung didominasi oleh sektor tradisional, sebagaimana terlihat dari komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha utama (Grafik 5.4). Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, tiga sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,16 juta orang atau 44,03% dari total penduduk bekerja; diikuti perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 16,73%; serta industri pengolahan sebesar 8,30% (Tabel 5.1).

Grafik 5.1. Jumlah Penduduk Bekerja di Provinsi Lampung



Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.2. Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung



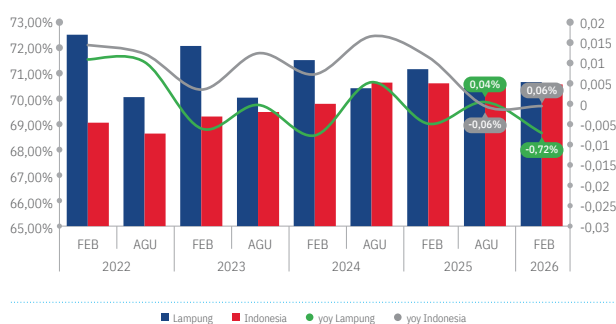
Sumber: BPS, diolah

Aspek lain yang berkaitan dengan TPAK adalah disparitas gender di pasar tenaga kerja. Pada Triwulan I 2026, TPAK laki-laki di Provinsi Lampung tercatat sebesar 87,11% lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan sebesar 53,55% (Grafik 5.5).

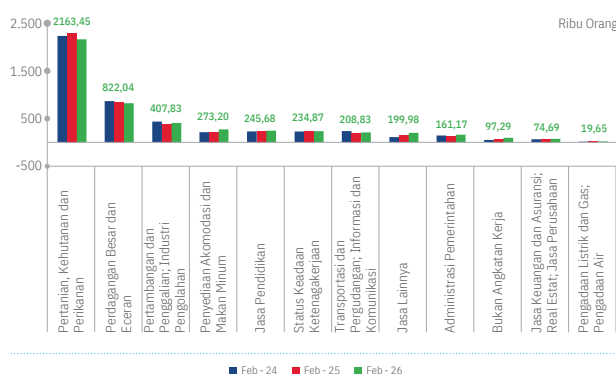
Tabel 5.1. Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung

Lapangan Pekerjaan Utama	2025				2026		Yoy (%)
	Feb	Porsi	Agst	Porsi	Feb	Porsi	
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, & Perikanan; dan Penggalian	2.291,2	46,96	1.998,32	41,17	2.163,5	44,03	-5,58
Pertambangan dan Industri Pengolahan	392,3	8,04	468,18	9,65	407,8	8,30	3,96
Pengadaan Listrik, Gas, & Air Minum, Pengelolaan Sampah	24,9	0,51	18,18	0,37	19,7	0,40	-21,01
Konstruksi	232,7	4,77	261,97	5,40	234,9	4,78	0,92
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	854,8	17,52	940,53	19,38	822,0	16,73	-3,83
Transportasi, Pergudangan, & Komunikasi	198,6	4,07	190,95	3,93	208,8	4,25	5,16
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	214,7	4,40	259,87	5,35	273,2	5,56	27,26
Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate; Jasa Perusahaan	71,2	1,46	109,83	2,26	74,7	1,52	4,85
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	134,7	2,76	149,31	3,08	161,2	3,28	19,68
Jasa Pendidikan	242,0	4,96	227,54	4,69	245,7	5,00	1,52
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,1	1,56	55,73	1,15	97,3	1,98	27,82
Jasa Lainnya	145,4	2,98	172,97	3,56	201,5	4,10	38,56
	4879,1	100	4853,4	100	4913,6	100	

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.3. TPAK Provinsi Lampung


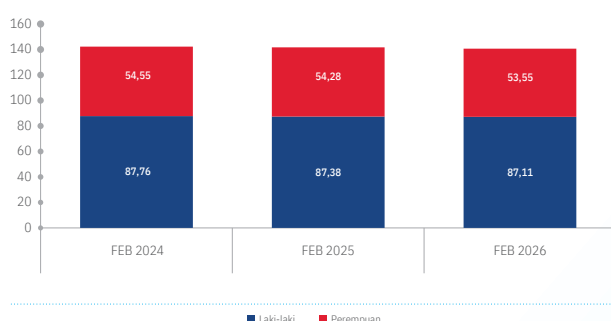
Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.4. Share Tenaga Kerja Provinsi Lampung


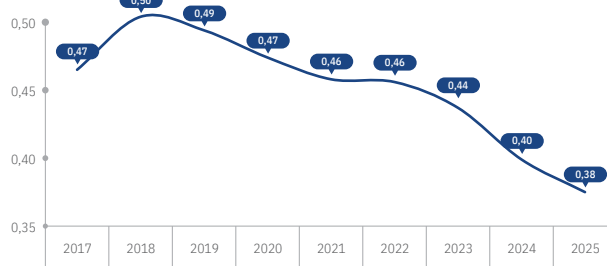
Sumber: BPS, diolah

Perkembangan tersebut juga berkaitan dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Lampung yang menunjukkan perbaikan signifikan. Data tahun 2025 mencatat penurunan IKG yang terus berlanjut menjadi 0,38 atau turun 0,02 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,40 (Grafik 5.6). Penurunan ini mengindikasikan perbaikan kesetaraan gender di Provinsi Lampung, didorong oleh peningkatan pada dimensi kesehatan reproduksi dan pasar tenaga kerja.

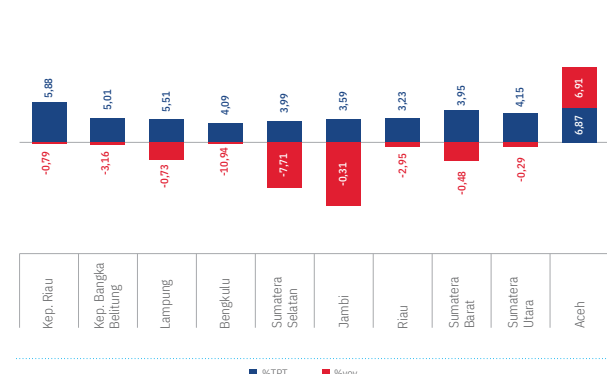
Berdasarkan hasil Sakernas Triwulan I 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 3,95%, yang berarti sekitar empat orang dari setiap seratus angkatan kerja berada dalam kondisi menganggur. Dibandingkan Triwulan I

Grafik 5.5. TPAK Provinsi Lampung Berdasarkan Gender


Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.6. IKG Provinsi Lampung


Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 5.7. TPT Sumatera


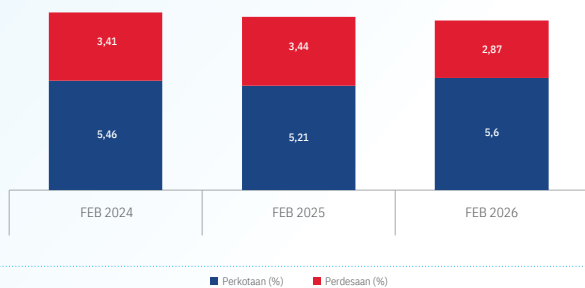
Sumber: BPS, diolah

2025, TPT menurun sebesar 2,95% (yoy). Secara regional, Provinsi Lampung menempati posisi TPT terendah ketiga di Sumatera (Grafik 5.7).

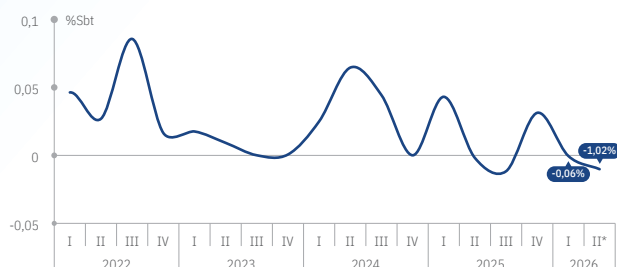
Secara spasial, TPT perkotaan pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,60%, lebih tinggi dibandingkan TPT perdesaan sebesar 2,87%. TPT perkotaan naik 0,39% poin, sementara TPT perdesaan turun 0,57% poin jika dibandingkan triwulan I 2025 (Grafik 5.8). Kondisi ini sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang mengindikasikan potensi penurunan penggunaan tenaga kerja pada triwulan II 2026 (Grafik 5.9).

Selain dari sisi penawaran tenaga kerja, kondisi pasar tenaga kerja juga tecermin dari perkembangan upah. Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2026 meningkat 5,35%, dari Rp2.893.069 pada tahun 2025 menjadi Rp3.047.734 (Grafik 5.10). Pada tingkat kabupaten/kota, UMK Kota Bandar Lampung meningkat 5,64%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan tingkat provinsi. Namun demikian, kenaikan tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 6,50% baik di Kota Bandar Lampung maupun tingkat provinsi (Grafik 5.10).

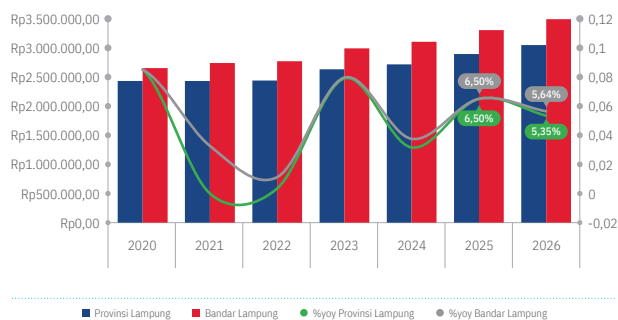
Berdasarkan status pekerjaan utama pada triwulan I 2026, penduduk yang bekerja di sektor informal tercatat sebanyak 3.385,8 ribu orang (68,91%), sedangkan di sektor formal

Grafik 5.8. TPT Provinsi Lampung berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal

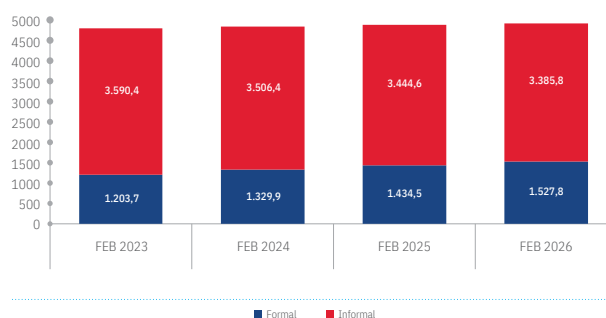
Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.9. Penggunaan Tenaga Kerja dan Perkembangan Investasi pada Dunia Usaha di Provinsi Lampung

Sumber: SKDU KPwBI Provinsi Lampung, diolah

Grafik 5.10. Perkembangan Upah Minimum Provinsi Lampung

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.11. Proporsi Pekerja Formal dan Informal di Provinsi Lampung

Sumber: BPS, diolah

Tabel 5.2. Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Lampung

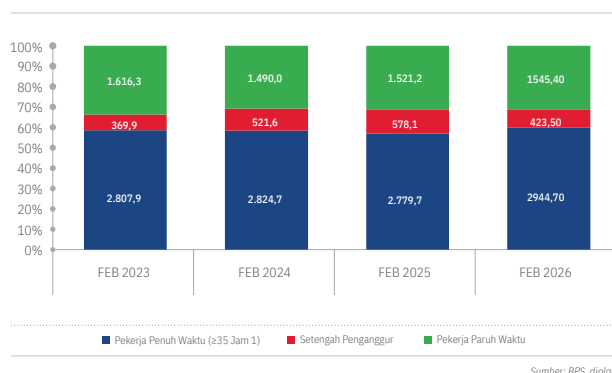
Indikator	2024		2025		2026	△ Yoy	△ Qtq
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb		
Penduduk Usia Kerja (15+) (ribu)	7.053,58	7.096,22	7.147,00	7.192,54	7.241,03	1,32%	0,67%
Angkatan Kerja (ribu)	5.044,04	4.996,75	5.085,87	5.066,55	5.115,90	0,59%	0,97%
Bekerja	4.836,33	4.787,59	4.876,06	4.853,38	4.913,59	0,77%	1,24%
Pengangguran	207,70	209,16	206,80	213,17	202,32	-2,17%	-5,09%
Bukan Angkatan Kerja (ribu)	2.009,54	2.099,47	2.061,13	2.125,99	2.125,12	3,10%	-0,04%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	71,51	70,41	71,16	70,44	70,65	(0,51)	0,21
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	4,12	4,19	4,07	4,21	3,95	(0,12)	(0,26)
Pekerja Tidak Penuh (1-34 jam) (ribu)	2.011,60	1.890,89	2.099,30	2.019,40	1.968,90	-6,21%	-2,50%
Setengah Penganggur	521,60	461,02	578,10	548,05	423,50	-26,74%	-22,73%
Pekerja Paruh Waktu	1.490,00	1.429,88	1.521,20	1.471,35	1.545,40	1,59%	5,03%
Pekerja Penuh (= 35 jam*) (ribu)	2.824,70	2.896,70	2.779,70	2.833,98	2.944,70	5,94%	3,91%

Sumber: BPS, diolah

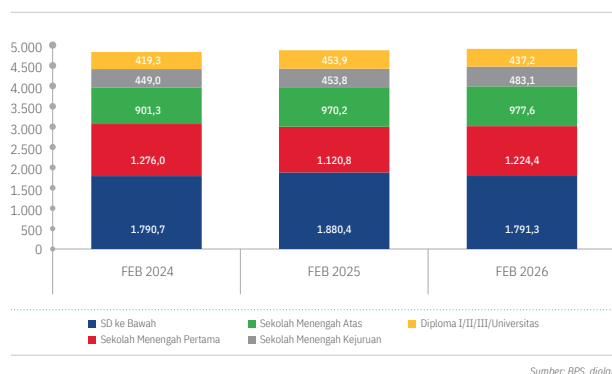
sebanyak 1.527,8 ribu orang (31,09%). Persentase pekerja formal meningkat 1,69% jika dibandingkan dengan periode triwulan I 2025 (Grafik 5.11). Peningkatan proporsi pekerja formal mengindikasikan penurunan jumlah penduduk yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan/atau pekerja keluarga/tidak dibayar di Provinsi Lampung.

Persentase pekerja paruh waktu dan setengah penganggur masing-masing meningkat sebesar 2,90% poin dan 18,88% poin pada triwulan I 2026, (Grafik 5.12). Sebaliknya, persentase pekerja penuh menurun 2,17% poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian tenaga kerja di Provinsi Lampung masih menghadapi kendala dalam memperoleh pekerjaan penuh waktu.

Grafik 5.12. Pekerja di Provinsi Lampung berdasarkan Jam Kerja



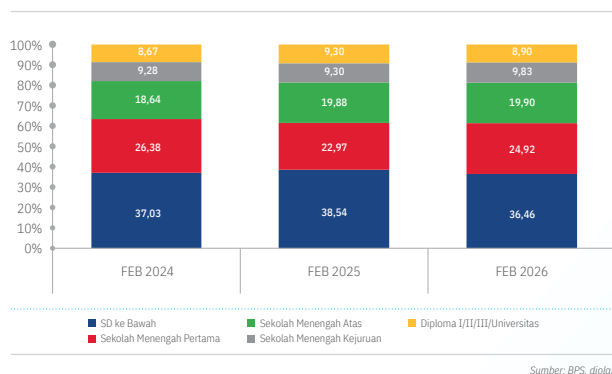
Grafik 5.13. TPAK Menurut Tingkat Pendidikan (ribu orang)



Ditinjau dari tingkat pendidikan, struktur ketenagakerjaan triwulan I 2026 yang masih didominasi pekerjaan informal juga tecermin dari mayoritas pekerja yang berpendidikan rendah. Dibandingkan triwulan I 2025, penduduk bekerja dengan pendidikan Diploma I/II/III menurun dari 453,9 ribu orang menjadi 437,2 ribu orang (Grafik 5.13). Sementara itu, pekerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta Sekolah Menengah Kejuruan mengalami peningkatan persentase, dengan kenaikan terbesar pada SMA sebesar 1,95% poin. Di sisi lain, untuk tamat Sekolah Dasar ke bawah mengalami penurunan sebesar 2,08% poin (Grafik 5.14).

Sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Kartu Prakerja, khususnya untuk

Grafik 5.14. TPAK Menurut Tingkat Pendidikan (%)



mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Program ini ditujukan bagi pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, serta pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi dalam pengembangan usaha skala mikro dan kecil. Hingga saat ini, pendaftaran Kartu Prakerja belum kembali dibuka sejak terakhir dilaksanakan pada 2024, dengan total 1.419.298 peserta aktif dari gelombang 63 hingga gelombang 71.

5.2 Nilai Tukar Petani

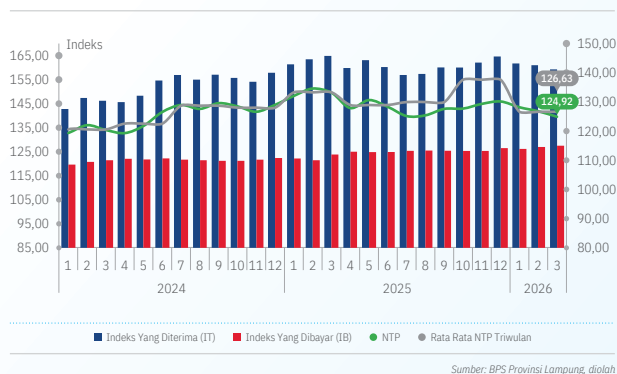
Rata-rata NTP Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 126,63, meningkat secara tahunan meski tertahan secara triwulanan. Rata-rata NTP triwulanan pada triwulan I 2025 sebesar 133,28 sementara pada triwulan IV 2025 sebesar 129,07 (Grafik 5.15). Hal ini tecermin dari peningkatan pada indeks yang diterima petani (It) terutama pada subsektor Hortikultura sebesar 12,10% (yoy).

Kemudian secara sektoral, rata-rata NTP beberapa sektor tercatat mengalami pertumbuhan, yaitu NTP hortikultura yang tumbuh sebesar 8,25% (yoy) dan perikanan tangkap yang meningkat sebesar 3,15% (yoy). Di sisi lain, rata-rata NTP tertinggi di Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 masih merupakan NTP perkebunan rakyat dan Hortikultura yang masing-masing sebesar 161,02 dan 123,52. Meskipun secara rata-rata, NTP sektor perkebunan rakyat tercatat mengalami kontraksi sebesar 10,22% (yoy) dibandingkan dengan rata-rata triwulan I 2025 (Grafik 5.16).

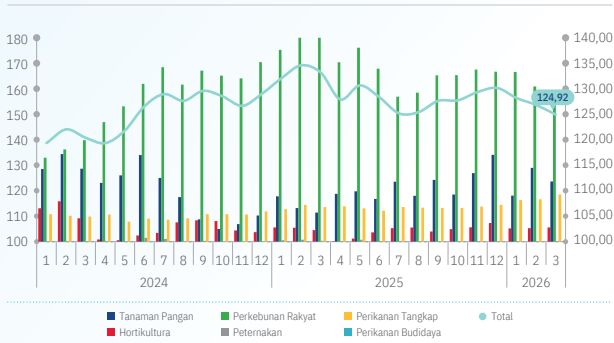
Secara lebih rinci, rata-rata indeks yang diterima petani (It) di Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 tercatat menurun sebesar 1,58% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan I 2025 dan sebesar 0,99% (qtq) jika dibandingkan periode triwulan sebelumnya (Grafik 5.17). Sementara itu, rata-rata indeks harga yang dibayarkan petani (Ib) di Provinsi Lampung tercatat meningkat sebesar 3,58% (yoy) pada Triwulan I 2026 jika dibandingkan rata-rata Triwulan I 2025 dan 0,93% (qtq) jika dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya (Grafik 5.18).

Hal ini mencerminkan adanya penurunan harga yang diterima oleh petani untuk berbagai produk pertanian ini di tengah

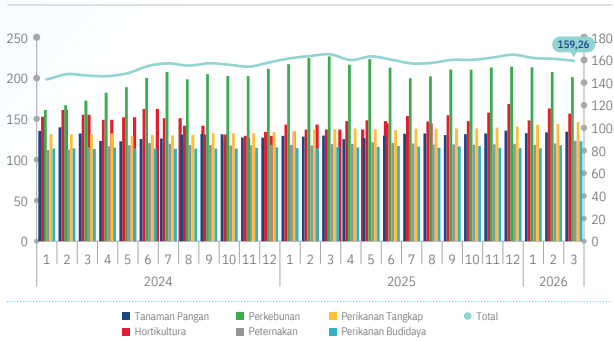
Grafik 5.15. NTP Provinsi Lampung dan Komponen Penyusunnya



Grafik 5.16. NTP Per Sub Sektor



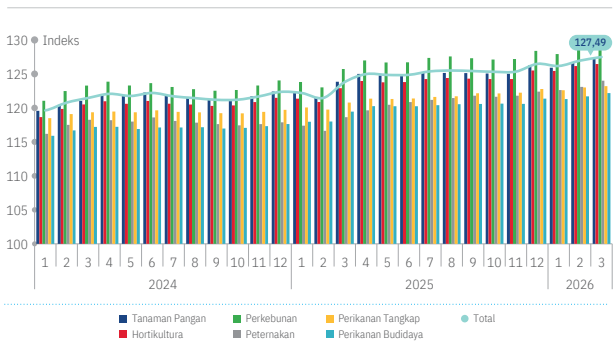
Grafik 5.17. Indeks yang Diterima per Sub Sektor



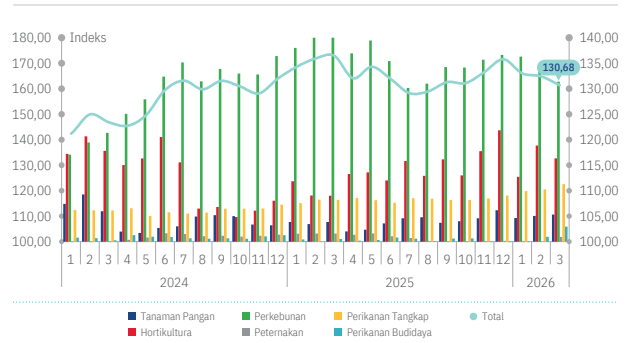
kenaikan biaya produksi serta peningkatan konsumsi rumah tangga petani. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan harga bahan baku dan bahan pendukung produksi seperti pupuk serta bahan bakar mesin yang dipengaruhi oleh lonjakan harga akibat ketidakpastian global. Lebih lanjut, lb yang lebih tinggi dibandingkan lt mengindikasikan adanya peningkatan biaya produksi dan konsumsi rumah tangga petani dibandingkan harga produk petani melemah, sehingga daya beli petani melemah.

Hal ini turut didukung oleh Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP), yang mencerminkan pengeluaran riil petani untuk usaha taninya. Pada triwulan I 2026, rata-rata NTUP Provinsi Lampung tercatat mengalami penurunan dari 135,56 menjadi 132,04 atau turun sebesar 2,59% (yoy) dibandingkan dengan rata-rata NTUP

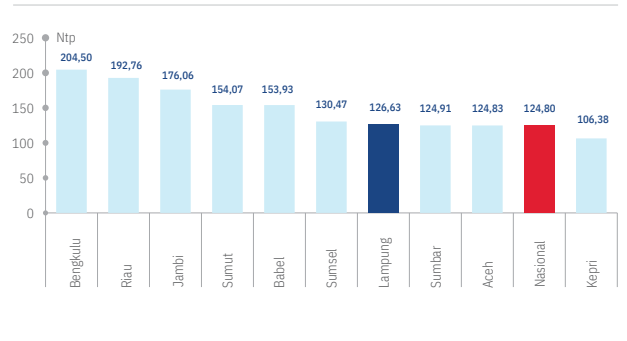
Grafik 5.18. Indeks yang Dibayar per Sub Sektor



Grafik 5.19. Pertumbuhan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) per Subsektor



Grafik 5.20. NTP Provinsi-Provinsi di Sumatera

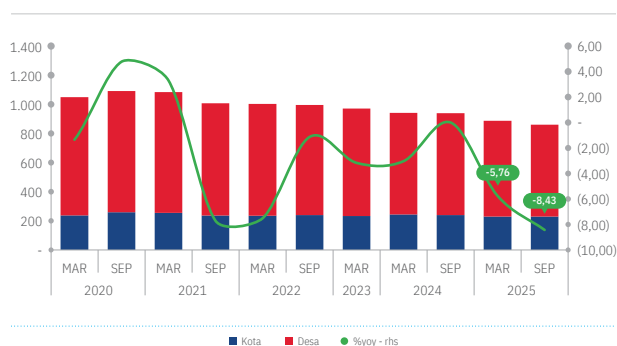


Triwulan I 2025 (Grafik 5.19). Di sisi lain, rata-rata NTP Lampung pada akhir Triwulan I 2026 yang sebesar 126,63 tercatat lebih tinggi dari rata-rata NTP Nasional triwulan I 2026 yang sebesar 124,80 (Grafik 5.20).

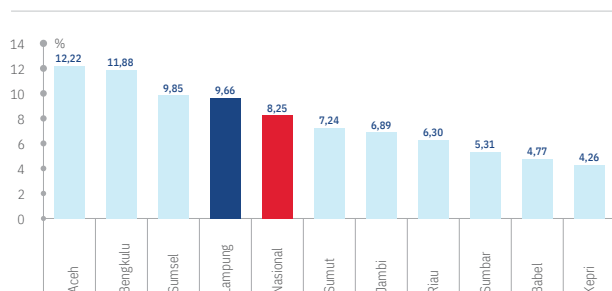
5.3 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 terpantau mengalami penurunan sebesar 8,43% (yoy), menjadi 860,13 ribu jiwa dari sebelumnya mencapai 939,31 ribu jiwa pada Triwulan I 2025. Dari sisi komposisinya, penduduk miskin di Provinsi Lampung utamanya berada di daerah pedesaan di mana sebagian besar berprofesi sebagai petani. Penduduk miskin yang terkonsentrasi di wilayah pedesaan tercatat sebesar 73,37%, sedangkan sebanyak 26,63% lainnya berada di daerah perkotaan (Grafik 5.21). Adapun persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung sebesar 9,66% pada Triwulan I 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Nasional yang sebesar 8,25% (Grafik 5.22). Lebih lanjut, Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi ke-4 jika dibandingkan dengan 9 (sembilan) provinsi lainnya di Sumatera, setelah Provinsi Aceh (12,22%), Provinsi Bengkulu (11,88%), dan Sumatera Selatan (9,85%).

Triwulan I 2025 yang tercatat sebanyak 239,51 ribu jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan Provinsi Lampung tercatat mencapai 631,04 ribu jiwa, walaupun

Grafik 5.21. Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Lampung

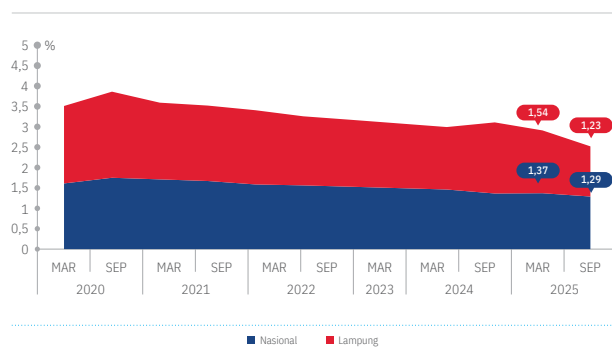
Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.22. Persentase Penduduk Miskin di Sumatera dibandingkan Nasional

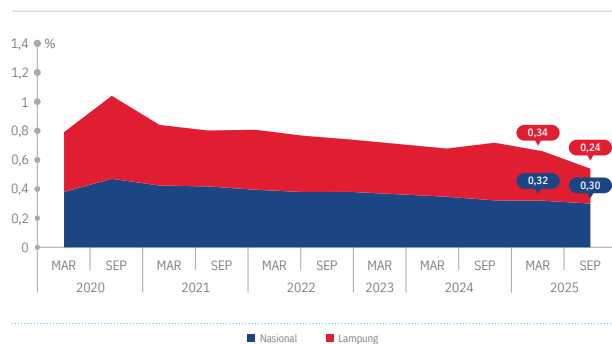
Sumber: BPS, diolah

masih memiliki porsi yang besar, angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 699,80 ribu jiwa, dengan penurunan sebesar 9,83% (yoy).

Lebih lanjut, dilihat dari pergerakan Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Lampung pada tahun berjalan (dengan data terbaru pada bulan September 2025), nilai GK tercatat sebesar Rp634.062 per kapita per bulan. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 3,82% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, serta meningkat 3,52% (qto) jika dibandingkan dengan Triwulan I 2026. GK merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kemiskinan selain faktor pendapatan, yaitu sebagai batas minimum pengeluaran yang mencakup kebutuhan makanan dan nonmakanan agar seseorang tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dengan demikian, penduduk dinyatakan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis tersebut. Nilai GK dipengaruhi oleh komponen penyusunnya, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Perkembangan harga pada kelompok makanan sebagai komponen utama GKM turut memengaruhi pergerakan GK dengan komoditas beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras sebagai komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap GK baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan yang

Grafik 5.23. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.24. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Sumber: BPS, diolah

ada di Provinsi Lampung. Dengan demikian, kenaikan harga bahan makanan menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan garis kemiskinan di Provinsi Lampung.

Di Provinsi Lampung, wilayah perdesaan menyumbang GKM terhadap GK lebih tinggi hingga mencapai 75,65%, sedangkan di perkotaan sebesar 74,42%. Adapun sumbangan GKBM terhadap GK tercatat sebesar 25,58% di perkotaan dan 24,35% di perdesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan komoditas bukan makanan pada Triwulan I 2026.

Komoditas makanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap GK pada umumnya sama antara perkotaan dan perdesaan, dengan beras tetap menjadi penyumbang utama, yaitu sebesar 19,50% di perkotaan dan 23,05% di perdesaan. Kedua, rokok kretek filter memberikan sumbangan sebesar 15,67% di perkotaan dan 8,32% di perdesaan. Komoditas penting lainnya meliputi telur ayam ras, daging ayam ras, kopi bubuk dan kopi instan, mie instan, kue basah, bawang merah, tempe, tahu, gula pasir, dan lainnya. Di sisi lain, komoditas bukan makanan yang paling besar kontribusinya terhadap GK adalah perumahan, yakni 7,17% di perkotaan dan 7,77% di perdesaan, diikuti bensin, listrik, dan pendidikan. Selanjutnya, kontribusi juga berasal dari kebutuhan perlengkapan mandi, produk perawatan pribadi, sabun cuci, pakaian jadi, serta keperluan kesehatan (Tabel 5.3).

Tabel 5.3. Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya

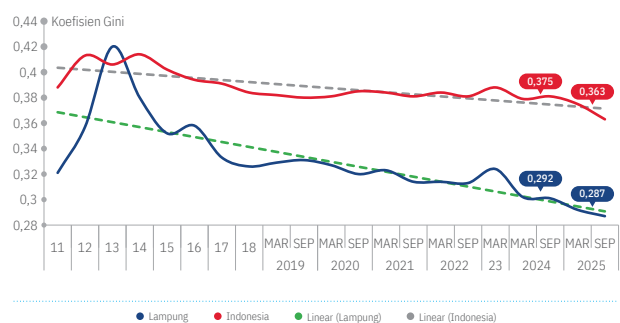
Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
Makanan	73,81	Makanan	76,11
Beras	21,1	Beras	24,62
Rokok kretek filter	10,41	Rokok kretek filter	9,11
Telur ayam ras	4,48	Telur ayam ras	3,71
Daging ayam ras	4,35	Daging ayam ras	3,42
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,39	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,38
Mie instan	2,35	Gula pasir	2,34
Kue basah	2,2	Bawang merah	2,13
Roti	2,02	Mie instan	2,04
Bawang merah	1,92	Kue basah	1,99
Tempe	1,78	Roti	1,84
Tahu	1,76	Tongkol/tuna/cakalang	1,76
Gula pasir	1,68	Tempe	1,62
lainnya	17,37	lainnya	19,15
Bukan Makanan	26,19	Bukan Makanan	23,89
Perumahan	9,00	Perumahan	9,08
Bensin	2,88	Bensin	2,90
Listrik	2,65	Listrik	1,64
Pendidikan	2,02	Pendidikan	1,25
Perlengkapan mandi	1,25	Perlengkapan mandi	1,11
Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,78	Sabun cuci	0,75
Pakaian jadi perempuan dewasa	0,73	Kesehatan	0,68
lainnya	6,88	lainnya	6,48

Sumber: BPS

Selanjutnya, sampai dengan Triwulan I 2026, terlihat perbaikan dari sisi kedalaman dan keparahan kemiskinan, di mana nilai P1 melambat dari 1,54 menjadi 1,23, dan nilai P2 menurun dari 0,34 menjadi 0,24 (Grafik 5.23 dan 5.24). Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan, sedangkan Indeks Keparahatan Kemiskinan (P2) menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Jika dilihat menurut wilayah, kondisi di pedesaan relatif lebih berat dibandingkan perkotaan. P1 di perkotaan tercatat sebesar 0,77, sementara di pedesaan tercatat lebih tinggi, yaitu 1,47. Hal yang sama terjadi pada P2, yaitu pada daerah perkotaan sebesar 0,13, sedangkan di pedesaan mencapai 0,30.

Sementara itu, Koefisien Gini tercatat menurun tercatat hingga September 2025 menjadi 0,29 dari yang sebelumnya tercatat sebesar 0,30 pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan ketimpangan pendapatan pada masyarakat Provinsi Lampung. Sejalan dengan itu, Koefisien Gini Nasional juga tercatat menurun menjadi 0,36 dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,38 (Grafik 5.25).

Pemerintah Pusat juga masih melanjutkan program dana bantuan sosial (bansos) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Lampung. Berdasarkan kebijakan dari Kementerian Sosial per Juli 2024, Himbara-BSI menyalurkan dana BSNT PKH Tahap 4 2024 di 512 Kab/Kota, sedangkan PT Pos Indonesia menyalurkan dana bansos PKH Tahap 4 2024 di 514 Kab/Kota, sehingga terdapat 2 Kab/Kota yang disalurkan secara tunai. PKH merupakan salah satu program untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi

Grafik 5.25. Koefisien Gini Provinsi Lampung

Sumber: BPS, diolah

nasional, yang diberikan kepada keluarga kurang mampu. Penyaluran dilakukan secara bertahap untuk keluarga kurang mampu, dengan besaran Rp900 ribu hingga Rp3 juta per tahun.

Pada periode Triwulan I 2026, penyaluran PKH dilakukan melalui skema non tunai oleh bank-bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri) bersama BSI di 512 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, di satu wilayah dapat terdapat dua atau lebih bank penyalur untuk memastikan keterjangkauan dan kelancaran distribusi. Penyaluran secara berkala secara non tunai tersebut dilakukan setiap tiga bulan

sekali, dengan tujuan menjaga konsistensi dan ketepatan sasaran dalam mendukung keluarga kurang mampu. Lebih lanjut, penyaluran tertinggi adalah Kabupaten Lampung Timur dengan total sebanyak 54.152 KPM senilai Rp 41.044.175.000 (Tabel 5.4).

Adapun, untuk bantuan program sembako, telah disalurkan kepada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung secara non tunai dengan kabupaten penerima bansos tertinggi adalah Kabupaten Lampung Selatan dengan total sebanyak 99.549 KPM senilai Rp 19.909.800.000 (Tabel 5.5).

Tabel 5.4. Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I 2026

Kab/ Kota	Penyalur	SP2D (Jml KPM)	SP2D (Nominal)	Penyaluran (Jml KPM)	Penyaluran (Nominal)	% Penyaluran (Jml KPM)	% Penyaluran (Nominal)	Penyerapan (Jml KPM)	% Penyerapan (Jml KPM)
KOTA BANDAR LAMPUNG	BMRI	43	Rp29.100.000	43	Rp29.100.000	100,00%	100,00%	41	95,35%
KOTA BANDAR LAMPUNG	BNI	4	Rp3.075.000	4	Rp3.075.000	100,00%	100,00%	4	100,00%
KOTA BANDAR LAMPUNG	BRI	31.969	Rp23.613.250.000	31.969	Rp23.613.250.000	100,00%	100,00%	31.738	99,28%
KOTA METRO	BMRI	18	Rp11.700.000	18	Rp11.700.000	100,00%	100,00%	18	100,00%
KOTA METRO	BNI	1	Rp1.800.000	1	Rp1.800.000	100,00%	100,00%	1	100,00%
KOTA METRO	BRI	5.506	Rp4.100.150.000	5.506	Rp4.100.150.000	100,00%	100,00%	5.476	99,46%
LAMPUNG BARAT	BMRI	13.821	Rp10.007.675.000	13.821	Rp10.007.675.000	100,00%	100,00%	13.672	98,92%
LAMPUNG BARAT	BNI	4	Rp2.325.000	4	Rp2.325.000	100,00%	100,00%	3	75,00%
LAMPUNG BARAT	BRI	18	Rp11.175.000	18	Rp11.175.000	100,00%	100,00%	16	88,89%
LAMPUNG SELATAN	BMRI	62	Rp45.525.000	62	Rp45.525.000	100,00%	100,00%	60	96,77%
LAMPUNG SELATAN	BNI	8	Rp4.775.000	8	Rp4.775.000	100,00%	100,00%	8	100,00%
LAMPUNG SELATAN	BRI	52.013	Rp37.808.350.000	52.013	Rp37.808.350.000	100,00%	100,00%	51.657	99,32%
LAMPUNG TENGAH	BMRI	81	Rp56.175.000	81	Rp56.175.000	100,00%	100,00%	72	88,89%
LAMPUNG TENGAH	BNI	12	Rp8.800.000	12	Rp8.800.000	100,00%	100,00%	11	91,67%
LAMPUNG TENGAH	BRI	51.291	Rp38.117.925.000	51.291	Rp38.117.925.000	100,00%	100,00%	50.836	99,11%
LAMPUNG TIMUR	BMRI	54.086	Rp40.998.150.000	54.086	Rp40.998.150.000	100,00%	100,00%	53.431	98,79%
LAMPUNG TIMUR	BNI	11	Rp7.775.000	11	Rp7.775.000	100,00%	100,00%	8	72,73%
LAMPUNG TIMUR	BRI	55	Rp38.250.000	55	Rp38.250.000	100,00%	100,00%	52	94,55%
LAMPUNG UTARA	BMRI	40.214	Rp29.735.350.000	40.214	Rp29.735.350.000	100,00%	100,00%	39.890	99,19%
LAMPUNG UTARA	BNI	2	Rp1.575.000	2	Rp1.575.000	100,00%	100,00%	2	100,00%
LAMPUNG UTARA	BRI	38	Rp26.225.000	38	Rp26.225.000	100,00%	100,00%	34	89,47%
MESUJI	BMRI	7.795	Rp5.852.550.000	7.795	Rp5.852.550.000	100,00%	100,00%	7.684	98,58%
MESUJI	BNI	2	Rp1.200.000	2	Rp1.200.000	100,00%	100,00%	2	100,00%
MESUJI	BRI	15	Rp11.925.000	15	Rp11.925.000	100,00%	100,00%	14	93,33%
PESAWARAN	BMRI	21.895	Rp16.475.050.000	21.895	Rp16.475.050.000	100,00%	100,00%	21.697	99,10%
PESAWARAN	BNI	2	Rp1.100.000	2	Rp1.100.000	100,00%	100,00%	2	100,00%
PESAWARAN	BRI	37	Rp25.675.000	37	Rp25.675.000	100,00%	100,00%	35	94,59%
PESISIR BARAT	BMRI	13	Rp9.000.000	13	Rp9.000.000	100,00%	100,00%	13	100,00%
PESISIR BARAT	BNI	5	Rp3.300.000	5	Rp3.300.000	100,00%	100,00%	5	100,00%
PESISIR BARAT	BRI	8.000	Rp6.170.875.000	8.000	Rp6.170.875.000	100,00%	100,00%	7.930	99,13%
PESISIR BARAT	POS	760	Rp619.625.000	-	Rp-	0,00%	0,00%	-	0,00%
PRINGSEWU	BMRI	20	Rp14.600.000	20	Rp14.600.000	100,00%	100,00%	18	90,00%
PRINGSEWU	BNI	5	Rp2.075.000	5	Rp2.075.000	100,00%	100,00%	5	100,00%
PRINGSEWU	BRI	16.445	Rp12.227.925.000	16.445	Rp12.227.925.000	100,00%	100,00%	16.318	99,23%

Sumber: HIMBARA

Kab/ Kota	Penyalur	SP2D (Jml KPM)	SP2D (Nominal)	Penyaluran (Jml KPM)	Penyaluran (Nominal)	% Penyaluran (Jml KPM)	% Penyaluran (Nominal)	Penyerapan (Jml KPM)	% Penyerapan (Jml KPM)
TANGGAMUS	BMRI	32.817	Rp24.241.350.000	32.817	Rp24.241.350.000	100,00%	100,00%	32.620	99,40%
TANGGAMUS	BNI	7	Rp4.025.000	7	Rp4.025.000	100,00%	100,00%	6	85,71%
TANGGAMUS	BRI	34	Rp25.725.000	34	Rp25.725.000	100,00%	100,00%	33	97,06%
TULANG BAWANG	BMRI	14.254	Rp10.369.050.000	14.254	Rp10.369.050.000	100,00%	100,00%	14.020	98,36%
TULANG BAWANG	BNI	2	Rp2.100.000	2	Rp2.100.000	100,00%	100,00%	2	100,00%
TULANG BAWANG	BRI	31	Rp20.500.000	31	Rp20.500.000	100,00%	100,00%	29	93,55%
TULANG BAWANG BARAT	BMRI	10.645	Rp8.072.000.000	10.645	Rp8.072.000.000	100,00%	100,00%	10.474	98,39%
TULANG BAWANG BARAT	BNI	7	Rp4.200.000	7	Rp4.200.000	100,00%	100,00%	6	85,71%
TULANG BAWANG BARAT	BRI	13	Rp8.525.000	13	Rp8.525.000	100,00%	100,00%	10	76,92%
WAY KANAN	BMRI	21.089	Rp15.730.250.000	21.089	Rp15.730.250.000	100,00%	100,00%	20.862	98,92%
WAY KANAN	BNI	2	Rp975.000	2	Rp975.000	100,00%	100,00%	1	50,00%
WAY KANAN	BRI	26	Rp17.775.000	26	Rp17.775.000	100,00%	100,00%	26	100,00%

Sumber: HIMBARA

Tabel 5.5. Penyaluran Program Sembako Posisi Triwulan I 2026

Kab/ Kota	Mekanisme Penyaluran	Penyalur	SP2D KEMENSOS					
			Tahap Januari		Tahap Februari		Tahap Maret	
			Jumlah KPM	Nominal Rp	Jumlah KPM	Nominal Rp	Jumlah KPM	Nominal Rp
KOTA BANDAR LAMPUNG	NON TUNAI	BMRI	76	15.200.000	76	15.200.000	76	15.200.000
KOTA BANDAR LAMPUNG	NON TUNAI	BNI	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000
KOTA BANDAR LAMPUNG	NON TUNAI	BRI	50.115	10.023.000.000	50.115	10.023.000.000	50.115	10.023.000.000
KOTA METRO	NON TUNAI	BMRI	30	6.000.000	30	6.000.000	30	6.000.000
KOTA METRO	NON TUNAI	BNI	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000
KOTA METRO	NON TUNAI	BRI	8.471	1.694.200.000	8.471	1.694.200.000	8.471	1.694.200.000
LAMPUNG BARAT	NON TUNAI	BMRI	27.305	5.461.000.000	27.305	5.461.000.000	27.305	5.461.000.000
LAMPUNG BARAT	NON TUNAI	BNI	9	1.800.000	9	1.800.000	9	1.800.000
LAMPUNG BARAT	NON TUNAI	BRI	32	6.400.000	32	6.400.000	32	6.400.000
LAMPUNG SELATAN	NON TUNAI	BMRI	135	27.000.000	135	27.000.000	135	27.000.000
LAMPUNG SELATAN	NON TUNAI	BNI	36	7.200.000	36	7.200.000	36	7.200.000
LAMPUNG SELATAN	NON TUNAI	BRI	99.378	19.875.600.000	99.378	19.875.600.000	99.378	19.875.600.000
LAMPUNG TENGAH	NON TUNAI	BMRI	225	45.000.000	225	45.000.000	225	45.000.000
LAMPUNG TENGAH	NON TUNAI	BNI	30	6.000.000	30	6.000.000	30	6.000.000
LAMPUNG TENGAH	NON TUNAI	BRI	89.598	17.919.600.000	89.598	17.919.600.000	89.598	17.919.600.000
LAMPUNG TIMUR	NON TUNAI	BMRI	94.795	18.959.000.000	94.795	18.959.000.000	94.795	18.959.000.000
LAMPUNG TIMUR	NON TUNAI	BNI	33	6.600.000	33	6.600.000	33	6.600.000
LAMPUNG TIMUR	NON TUNAI	BRI	107	21.400.000	107	21.400.000	107	21.400.000
LAMPUNG UTARA	NON TUNAI	BMRI	74.212	14.842.400.000	74.212	14.842.400.000	74.212	14.842.400.000
LAMPUNG UTARA	NON TUNAI	BNI	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000
LAMPUNG UTARA	NON TUNAI	BRI	69	13.800.000	69	13.800.000	69	13.800.000
MESUJI	NON TUNAI	BMRI	14.048	2.809.600.000	14.048	2.809.600.000	14.048	2.809.600.000
MESUJI	NON TUNAI	BNI	6	1.200.000	6	1.200.000	6	1.200.000
MESUJI	NON TUNAI	BRI	24	4.800.000	24	4.800.000	24	4.800.000
PESAWARAN	NON TUNAI	BMRI	40.844	8.168.800.000	40.844	8.168.800.000	40.844	8.168.800.000
PESAWARAN	NON TUNAI	BNI	13	2.600.000	13	2.600.000	13	2.600.000
PESAWARAN	NON TUNAI	BRI	88	17.600.000	88	17.600.000	88	17.600.000

Kab/ Kota	Mekanisme Penyaluran	Penyalur	SP2D KEMENSOS					
			Tahap Januari		Tahap Februari		Tahap Maret	
			Jumlah KPM	Nominal Rp	Jumlah KPM	Nominal Rp	Jumlah KPM	Nominal Rp
PESISIR BARAT	NON TUNAI	BMRI	30	6.000.000	30	6.000.000	30	6.000.000
PESISIR BARAT	NON TUNAI	BNI	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000
PESISIR BARAT	NON TUNAI	BRI	12.702	2.540.400.000	12.702	2.540.400.000	12.702	2.540.400.000
PRINGSEWU	NON TUNAI	BMRI	59	11.800.000	59	11.800.000	59	11.800.000
PRINGSEWU	NON TUNAI	BNI	11	2.200.000	11	2.200.000	11	2.200.000
PRINGSEWU	NON TUNAI	BRI	31.288	6.257.600.000	31.288	6.257.600.000	31.288	6.257.600.000
TANGGAMUS	NON TUNAI	BMRI	61.560	12.312.000.000	61.560	12.312.000.000	61.560	12.312.000.000
TANGGAMUS	NON TUNAI	BNI	17	3.400.000	17	3.400.000	17	3.400.000
TANGGAMUS	NON TUNAI	BRI	69	13.800.000	69	13.800.000	69	13.800.000
TULANG BAWANG	NON TUNAI	BMRI	25.345	5.069.000.000	25.345	5.069.000.000	25.345	5.069.000.000
TULANG BAWANG	NON TUNAI	BNI	6	1.200.000	6	1.200.000	6	1.200.000
TULANG BAWANG	NON TUNAI	BRI	52	10.400.000	52	10.400.000	52	10.400.000
TULANG BAWANG BARAT	NON TUNAI	BMRI	18.220	3.644.000.000	18.220	3.644.000.000	18.220	3.644.000.000
TULANG BAWANG BARAT	NON TUNAI	BNI	14	2.800.000	14	2.800.000	14	2.800.000
TULANG BAWANG BARAT	NON TUNAI	BRI	26	5.200.000	26	5.200.000	26	5.200.000
WAY KANAN	NON TUNAI	BMRI	42.424	8.484.800.000	42.424	8.484.800.000	42.424	8.484.800.000
WAY KANAN	NON TUNAI	BNI	7	1.400.000	7	1.400.000	7	1.400.000
WAY KANAN	NON TUNAI	BRI	49	9.800.000	49	9.800.000	49	9.800.000

Kab/ Kota	PENYALURAN											
	Tahap Januari				Tahap Februari				Tahap Maret			
	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%
KOTA BANDAR LAMPUNG	76	100,00%	15.200.000	100,00%	76	100,00%	15.200.000	100,00%	76	100,00%	15.200.000	100,00%
KOTA BANDAR LAMPUNG	10	100,00%	2.000.000	100,00%	10	100,00%	2.000.000	100,00%	10	100,00%	2.000.000	100,00%
KOTA BANDAR LAMPUNG	50.115	100,00%	10.023.000.000	100,00%	50.115	100,00%	10.023.000.000	100,00%	50.115	100,00%	10.023.000.000	100,00%
KOTA METRO	30	100,00%	6.000.000	100,00%	30	100,00%	6.000.000	100,00%	30	100,00%	6.000.000	100,00%
KOTA METRO	5	100,00%	1.000.000	100,00%	5	100,00%	1.000.000	100,00%	5	100,00%	1.000.000	100,00%
KOTA METRO	8.471	100,00%	1.694.200.000	100,00%	8.471	100,00%	1.694.200.000	100,00%	8.471	100,00%	1.694.200.000	100,00%
LAMPUNG BARAT	27.305	100,00%	5.461.000.000	100,00%	27.305	100,00%	5.461.000.000	100,00%	27.305	100,00%	5.461.000.000	100,00%
LAMPUNG BARAT	9	100,00%	1.800.000	100,00%	9	100,00%	1.800.000	100,00%	9	100,00%	1.800.000	100,00%
LAMPUNG BARAT	32	100,00%	6.400.000	100,00%	32	100,00%	6.400.000	100,00%	32	100,00%	6.400.000	100,00%
LAMPUNG SELATAN	135	100,00%	27.000.000	100,00%	135	100,00%	27.000.000	100,00%	135	100,00%	27.000.000	100,00%
LAMPUNG SELATAN	36	100,00%	7.200.000	100,00%	36	100,00%	7.200.000	100,00%	36	100,00%	7.200.000	100,00%
LAMPUNG SELATAN	99.378	100,00%	19.875.600.000	100,00%	99.378	100,00%	19.875.600.000	100,00%	99.378	100,00%	19.875.600.000	100,00%
LAMPUNG TENGAH	225	100,00%	45.000.000	100,00%	225	100,00%	45.000.000	100,00%	225	100,00%	45.000.000	100,00%
LAMPUNG TENGAH	30	100,00%	6.000.000	100,00%	30	100,00%	6.000.000	100,00%	30	100,00%	6.000.000	100,00%
LAMPUNG TENGAH	89.598	100,00%	17.919.600.000	100,00%	89.598	100,00%	17.919.600.000	100,00%	89.598	100,00%	17.919.600.000	100,00%
LAMPUNG TIMUR	94.795	100,00%	18.959.000.000	100,00%	94.795	100,00%	18.959.000.000	100,00%	94.795	100,00%	18.959.000.000	100,00%
LAMPUNG TIMUR	33	100,00%	6.600.000	100,00%	33	100,00%	6.600.000	100,00%	33	100,00%	6.600.000	100,00%
LAMPUNG TIMUR	107	100,00%	21.400.000	100,00%	107	100,00%	21.400.000	100,00%	107	100,00%	21.400.000	100,00%
LAMPUNG UTARA	74.212	100,00%	14.842.400.000	100,00%	74.212	100,00%	14.842.400.000	100,00%	74.212	100,00%	14.842.400.000	100,00%
LAMPUNG UTARA	10	100,00%	2.000.000	100,00%	10	100,00%	2.000.000	100,00%	10	100,00%	2.000.000	100,00%

Kab/ Kota	PENYALURAN											
	Tahap Januari				Tahap Februari				Tahap Maret			
	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%
LAMPUNG UTARA	69	100,00%	13.800.000	100,00%	69	100,00%	13.800.000	100,00%	69	100,00%	13.800.000	100,00%
MESUJI	14.048	100,00%	2.809.600.000	100,00%	14.048	100,00%	2.809.600.000	100,00%	14.048	100,00%	2.809.600.000	100,00%
MESUJI	6	100,00%	1.200.000	100,00%	6	100,00%	1.200.000	100,00%	6	100,00%	1.200.000	100,00%
MESUJI	24	100,00%	4.800.000	100,00%	24	100,00%	4.800.000	100,00%	24	100,00%	4.800.000	100,00%
PESAWARAN	40.844	100,00%	8.168.800.000	100,00%	40.844	100,00%	8.168.800.000	100,00%	40.844	100,00%	8.168.800.000	100,00%
PESAWARAN	13	100,00%	2.600.000	100,00%	13	100,00%	2.600.000	100,00%	13	100,00%	2.600.000	100,00%
PESAWARAN	88	100,00%	17.600.000	100,00%	88	100,00%	17.600.000	100,00%	88	100,00%	17.600.000	100,00%
PESISIR BARAT	30	100,00%	6.000.000	100,00%	30	100,00%	6.000.000	100,00%	30	100,00%	6.000.000	100,00%
PESISIR BARAT	5	100,00%	1.000.000	100,00%	5	100,00%	1.000.000	100,00%	5	100,00%	1.000.000	100,00%
PESISIR BARAT	12.702	100,00%	2.540.400.000	100,00%	12.702	100,00%	2.540.400.000	100,00%	12.702	100,00%	2.540.400.000	100,00%
PRINGSEWU	59	100,00%	11.800.000	100,00%	59	100,00%	11.800.000	100,00%	59	100,00%	11.800.000	100,00%
PRINGSEWU	11	100,00%	2.200.000	100,00%	11	100,00%	2.200.000	100,00%	11	100,00%	2.200.000	100,00%
PRINGSEWU	31.288	100,00%	6.257.600.000	100,00%	31.288	100,00%	6.257.600.000	100,00%	31.288	100,00%	6.257.600.000	100,00%
TANGGAMUS	61.560	100,00%	12.312.000.000	100,00%	61.560	100,00%	12.312.000.000	100,00%	61.560	100,00%	12.312.000.000	100,00%
TANGGAMUS	17	100,00%	3.400.000	100,00%	17	100,00%	3.400.000	100,00%	17	100,00%	3.400.000	100,00%
TANGGAMUS	69	100,00%	13.800.000	100,00%	69	100,00%	13.800.000	100,00%	69	100,00%	13.800.000	100,00%
TULANG BAWANG	25.345	100,00%	5.069.000.000	100,00%	25.345	100,00%	5.069.000.000	100,00%	25.345	100,00%	5.069.000.000	100,00%
TULANG BAWANG	6	100,00%	1.200.000	100,00%	6	100,00%	1.200.000	100,00%	6	100,00%	1.200.000	100,00%
TULANG BAWANG	52	100,00%	10.400.000	100,00%	52	100,00%	10.400.000	100,00%	52	100,00%	10.400.000	100,00%
TULANG BAWANG BARAT	18.220	100,00%	3.644.000.000	100,00%	18.220	100,00%	3.644.000.000	100,00%	18.220	100,00%	3.644.000.000	100,00%
TULANG BAWANG BARAT	14	100,00%	2.800.000	100,00%	14	100,00%	2.800.000	100,00%	14	100,00%	2.800.000	100,00%
TULANG BAWANG BARAT	26	100,00%	5.200.000	100,00%	26	100,00%	5.200.000	100,00%	26	100,00%	5.200.000	100,00%
WAY KANAN	42.424	100,00%	8.484.800.000	100,00%	42.424	100,00%	8.484.800.000	100,00%	42.424	100,00%	8.484.800.000	100,00%
WAY KANAN	7	100,00%	1.400.000	100,00%	7	100,00%	1.400.000	100,00%	7	100,00%	1.400.000	100,00%
WAY KANAN	49	100,00%	9.800.000	100,00%	49	100,00%	9.800.000	100,00%	49	100,00%	9.800.000	100,00%

Kab/ Kota	PENYERAPAN											
	Tahap Januari				Tahap Februari				Tahap Maret			
	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%
KOTA BANDAR LAMPUNG	69	90,79%	13.800.000	90,79%	69	90,79%	13.800.000	90,79%	69	90,79%	13.800.000	90,79%
KOTA BANDAR LAMPUNG	8	80,00%	1.600.000	80,00%	8	80,00%	1.600.000	80,00%	8	80,00%	1.600.000	80,00%
KOTA BANDAR LAMPUNG	45.785	91,36%	9.157.000.000	91,36%	45.785	91,36%	9.157.000.000	91,36%	45.785	91,36%	9.157.000.000	91,36%
KOTA METRO	28	93,33%	5.600.000	93,33%	28	93,33%	5.600.000	93,33%	28	93,33%	5.600.000	93,33%
KOTA METRO	3	60,00%	600.000	60,00%	3	60,00%	600.000	60,00%	3	60,00%	600.000	60,00%
KOTA METRO	7.936	93,68%	1.587.200.000	93,68%	7.936	93,68%	1.587.200.000	93,68%	7.936	93,68%	1.587.200.000	93,68%
LAMPUNG BARAT	25.286	92,61%	5.057.200.000	92,61%	25.286	92,61%	5.057.200.000	92,61%	25.286	92,61%	5.057.200.000	92,61%
LAMPUNG BARAT	2	22,22%	400.000	22,22%	2	22,22%	400.000	22,22%	2	22,22%	400.000	22,22%
LAMPUNG BARAT	26	81,25%	5.200.000	81,25%	26	81,25%	5.200.000	81,25%	26	81,25%	5.200.000	81,25%
LAMPUNG SELATAN	123	91,11%	24.600.000	91,11%	123	91,11%	24.600.000	91,11%	123	91,11%	24.600.000	91,11%
LAMPUNG SELATAN	25	69,44%	5.000.000	69,44%	25	69,44%	5.000.000	69,44%	25	69,44%	5.000.000	69,44%
LAMPUNG SELATAN	93.861	94,45%	18.772.200.000	94,45%	93.861	94,45%	18.772.200.000	94,45%	93.861	94,45%	18.772.200.000	94,45%
LAMPUNG TENGAH	193	85,78%	38.600.000	85,78%	193	85,78%	38.600.000	85,78%	193	85,78%	38.600.000	85,78%

Kab/ Kota	PENYERAPAN											
	Tahap Januari				Tahap Februari				Tahap Maret			
	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%
LAMPUNG TENGAH	24	80,00%	4.800.000	80,00%	24	80,00%	4.800.000	80,00%	24	80,00%	4.800.000	80,00%
LAMPUNG TENGAH	83.178	92,83%	16.635.600.000	92,83%	83.178	92,83%	16.635.600.000	92,83%	83.178	92,83%	16.635.600.000	92,83%
LAMPUNG TIMUR	86.846	91,61%	17.369.200.000	91,61%	86.846	91,61%	17.369.200.000	91,61%	86.846	91,61%	17.369.200.000	91,61%
LAMPUNG TIMUR	21	63,64%	4.200.000	63,64%	21	63,64%	4.200.000	63,64%	21	63,64%	4.200.000	63,64%
LAMPUNG TIMUR	91	85,05%	18.200.000	85,05%	91	85,05%	18.200.000	85,05%	91	85,05%	18.200.000	85,05%
LAMPUNG UTARA	70.489	94,98%	14.097.800.000	94,98%	70.489	94,98%	14.097.800.000	94,98%	70.489	94,98%	14.097.800.000	94,98%
LAMPUNG UTARA	8	80,00%	1.600.000	80,00%	8	80,00%	1.600.000	80,00%	8	80,00%	1.600.000	80,00%
LAMPUNG UTARA	58	84,06%	11.600.000	84,06%	58	84,06%	11.600.000	84,06%	58	84,06%	11.600.000	84,06%
MESUJI	12.838	91,39%	2.567.600.000	91,39%	12.838	91,39%	2.567.600.000	91,39%	12.838	91,39%	2.567.600.000	91,39%
MESUJI	5	83,33%	1.000.000	83,33%	5	83,33%	1.000.000	83,33%	5	83,33%	1.000.000	83,33%
MESUJI	19	79,17%	3.800.000	79,17%	19	79,17%	3.800.000	79,17%	19	79,17%	3.800.000	79,17%
PESAWARAN	37.515	91,85%	7.503.000.000	91,85%	37.515	91,85%	7.503.000.000	91,85%	37.515	91,85%	7.503.000.000	91,85%
PESAWARAN	6	46,15%	1.200.000	46,15%	6	46,15%	1.200.000	46,15%	6	46,15%	1.200.000	46,15%
PESAWARAN	81	92,05%	16.200.000	92,05%	81	92,05%	16.200.000	92,05%	81	92,05%	16.200.000	92,05%
PESISIR BARAT	26	86,67%	5.200.000	86,67%	26	86,67%	5.200.000	86,67%	26	86,67%	5.200.000	86,67%
PESISIR BARAT	5	100,00%	1.000.000	100,00%	5	100,00%	1.000.000	100,00%	5	100,00%	1.000.000	100,00%
PESISIR BARAT	12.297	96,81%	2.459.400.000	96,81%	12.297	96,81%	2.459.400.000	96,81%	12.297	96,81%	2.459.400.000	96,81%
PRINGSEWU	51	86,44%	10.200.000	86,44%	51	86,44%	10.200.000	86,44%	51	86,44%	10.200.000	86,44%
PRINGSEWU	5	45,45%	1.000.000	45,45%	5	45,45%	1.000.000	45,45%	5	45,45%	1.000.000	45,45%
PRINGSEWU	28.664	91,61%	5.732.800.000	91,61%	28.664	91,61%	5.732.800.000	91,61%	28.664	91,61%	5.732.800.000	91,61%
TANGGAMUS	59.163	96,11%	11.832.600.000	96,11%	59.163	96,11%	11.832.600.000	96,11%	59.163	96,11%	11.832.600.000	96,11%
TANGGAMUS	13	76,47%	2.600.000	76,47%	13	76,47%	2.600.000	76,47%	13	76,47%	2.600.000	76,47%
TANGGAMUS	60	86,96%	12.000.000	86,96%	60	86,96%	12.000.000	86,96%	60	86,96%	12.000.000	86,96%
TULANG BAWANG	21.179	83,56%	4.235.800.000	83,56%	21.179	83,56%	4.235.800.000	83,56%	21.179	83,56%	4.235.800.000	83,56%
TULANG BAWANG	3	50,00%	600.000	50,00%	3	50,00%	600.000	50,00%	3	50,00%	600.000	50,00%
TULANG BAWANG	38	73,08%	7.600.000	73,08%	38	73,08%	7.600.000	73,08%	38	73,08%	7.600.000	73,08%
TULANG BAWANG BARAT	16.077	88,24%	3.215.400.000	88,24%	16.077	88,24%	3.215.400.000	88,24%	16.077	88,24%	3.215.400.000	88,24%
TULANG BAWANG BARAT	11	78,57%	2.200.000	78,57%	11	78,57%	2.200.000	78,57%	11	78,57%	2.200.000	78,57%
TULANG BAWANG BARAT	18	69,23%	3.600.000	69,23%	18	69,23%	3.600.000	69,23%	18	69,23%	3.600.000	69,23%
WAY KANAN	38.701	91,22%	7.740.200.000	91,22%	38.701	91,22%	7.740.200.000	91,22%	38.701	91,22%	7.740.200.000	91,22%
WAY KANAN	4	57,14%	800.000	57,14%	4	57,14%	800.000	57,14%	4	57,14%	800.000	57,14%
WAY KANAN	35	71,43%	7.000.000	71,43%	35	71,43%	7.000.000	71,43%	35	71,43%	7.000.000	71,43%



Prospek Perekonomian



Prospek perekonomian dunia pada tahun 2026–2027 diperkirakan menghadapi tantangan lebih berat di tengah ketidakpastian global yang semakin tinggi. Berdasarkan perkembangan terkini, kondisi dan prospek ekonomi dunia diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan prospek awal tahun, dipicu oleh tingginya gejolak geopolitik akibat perang di Timur Tengah. Gejolak ini tidak hanya memengaruhi rantai pasok global tetapi juga memicu volatilitas harga komoditas energi, terutama minyak mentah, serta menunda normalisasi kebijakan moneter global.



Kinerja perekonomian Provinsi Lampung diperkirakan tumbuh dalam kisaran 5,0–5,6% pada tahun 2026, cenderung lebih moderat dari prakiraan sebelumnya seiring eskalasi risiko geopolitik global, namun tetap didukung prospek penguatan permintaan domestik serta kinerja lapangan usaha utama. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan tetap menjadi penopang pertumbuhan seiring terjaganya daya beli masyarakat, kenaikan upah minimum, serta berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan proyek strategis daerah. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU), sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan tetap menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, didukung keberlanjutan program swasembada pangan dan penguatan produktivitas.



Inflasi gabungan empat kabupaten kota di Provinsi Lampung pada tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga dalam sasaran 2,5+1%. Laju inflasi gabungan di Provinsi Lampung yang semakin terkendali tersebut sejalan dengan penguatan program TPIP-TPID dan implemementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) dalam kerangka 4K.

6.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Nasional

Prospek perekonomian dunia pada tahun 2026–2027 kini diperkirakan menghadapi tantangan yang lebih berat di tengah ketidakpastian global yang semakin tinggi. Berdasarkan perkembangan terkini, kondisi dan prospek ekonomi dunia diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan prospek awal tahun, dipicu oleh tingginya gejala geopolitik akibat perang di Timur Tengah. Gejala ini tidak hanya memengaruhi rantai pasok global tetapi juga memicu volatilitas harga komoditas energi, terutama minyak mentah, serta menunda normalisasi kebijakan moneter global.

Pertumbuhan ekonomi negara maju diperkirakan tetap terbatas dengan tekanan inflasi yang cenderung meningkat. Di Amerika Serikat, meskipun pertumbuhan ekonomi masih tercatat solid sebesar 2,7% pada triwulan I 2026, arah kebijakan moneter diperkirakan akan menjadi lebih ketat (*higher for longer*). Ekspektasi penurunan suku bunga kebijakan (FFR) kini bergeser ke akhir tahun 2026 seiring dengan moderasi inflasi yang berjalan lebih lambat dari perkiraan semula. Di kawasan Eropa dan Jepang, pemulihan ekonomi masih tertahan oleh lemahnya permintaan eksternal dan dampak dari ketidakpastian pasar keuangan global yang mendorong penguatan dolar AS dan aliran keluar modal dari negara berkembang.

Di sisi lain, negara berkembang masih menjadi motor utama pertumbuhan global, meskipun menghadapi risiko volatilitas nilai tukar. Tiongkok menunjukkan resiliensi dengan pertumbuhan sebesar 5,0% pada triwulan I 2026, ditopang oleh kinerja manufaktur dan stimulus kebijakan. India dan kawasan ASEAN-5 juga diperkirakan mempertahankan momentum pertumbuhan yang stabil. Namun, secara keseluruhan, risiko terhadap prospek global tetap condong ke bawah (*downside risk*), terutama terkait dengan fragmentasi perdagangan, potensi durasi perang yang lebih lama, serta pergeseran aliran modal ke *safe-haven assets*.

Sejalan dengan dinamika global tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang kuat. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,61% (yoy), meningkat dari 5,39% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di antara negara G20, mencerminkan fundamental ekonomi domestik yang tetap solid di tengah prospek perekonomian global. Kinerja positif tersebut didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat sebagai penopang utama. Konsumsi rumah tangga terjaga seiring dengan inflasi yang terkendali. Investasi juga terus tumbuh,

Tabel 6.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Wilayah/ Negara	2025	Projections		Difference from January 2026 WEO Update		Difference from October 2025 WEO	
		2026	2027	2026	2027	2026	2027
World Output	3.3	2.9	3.5	-0.3	0.3	-0.4	-
Advanced Economies	1.9	1.5	1.9	-0.4	0.2	-0.3	-
United States	2.0	2.2	2.1	0.1	0.0	0.2	-
Euro Area	1.2	1.2	1.5	-0.5	0.2	-0.6	-
Japan	0.5	1.0	0.7	-0.5	0.3	-0.1	-
United Kingdom	1.0	1.0	1.9	-0.4	0.0	-0.4	-
Other Advanced Economies	4.1	1.5	2.5	-1.3	-	-1.3	-
Emerging Market and Developing Economies	4.4	4.0	4.6	-0.3	0.4	-0.4	-
Emerging and Developing Asia	5.3	4.7	5.1	-0.3	0.3	-0.6	-
China	4.4	3.9	4.6	-0.6	0.5	-1.1	-
India	7.5	7.1	6.5	0.6	0.0	0.9	-
Emerging and Developing Europe	1.9	1.8	2.2	-0.3	-0.2	-0.5	-
Latin America and the Caribbean	2.1	2.9	2.3	0.1	-0.1	0.3	-
Middle East and Central Asia	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Saharan Africa	-	-	-	-	-	-	-
Nigeria	3.9	3.8	4.5	-0.5	-2.0	-0.5	-
South Africa	1.5	0.7	1.5	-0.5	-0.2	-0.3	-

Sumber: IMF World Economic April 2026

didorong oleh keberlanjutan Proyek Strategis Nasional dan penguatan hilirisasi sumber daya alam. Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus yang berlanjut hingga 71 bulan berturut-turut, dengan posisi cadangan devisa yang memadai sebesar 146,2 miliar USD. Ke depan, penguatan struktur ekonomi terus diupayakan melalui optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan pembiayaan pembangunan.

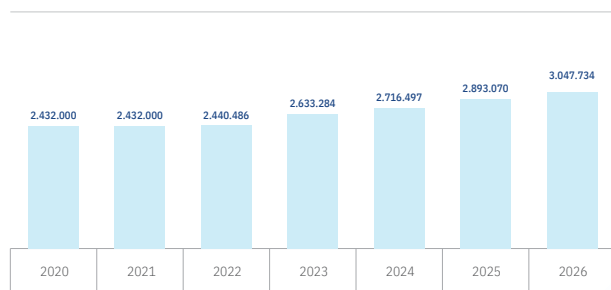
Ke depan, kewaspadaan terhadap risiko ketidakpastian geopolitik global dan gejolak pasar keuangan tetap menjadi prioritas. Namun demikian, dengan bauran kebijakan yang konsisten antara otoritas moneter dan fiskal, sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027, pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini akan tetap terjaga dalam tren yang positif dan resilien.

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung

Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh dalam kisaran 5,0–5,6%, didukung prospek penguatan permintaan domestik serta kinerja lapangan usaha utama. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan tetap menjadi penopang pertumbuhan seiring terjaganya daya beli masyarakat, kenaikan upah minimum, serta berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan proyek strategis daerah. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU), sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan tetap menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, didukung keberlanjutan program swasembada pangan dan penguatan produktivitas. Berdasarkan Proyeksi Kerangka Sampel Area (KSA) Padi oleh BPS, produksi Gabah Kering Giling (GKG) di Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 diperkirakan mencapai 921.930 ton, yang mencerminkan tetap terjaganya kapasitas produksi tanaman pangan di awal periode proyeksi.

Dari sisi permintaan domestik, kinerja konsumsi dan investasi diperkirakan terus meningkat didukung optimisme penguatan daya beli dan realisasi investasi di Provinsi Lampung. Pada

Grafik 6.1. Perkembangan Upah Minimum Provinsi Lampung 2020 s.d. 2026



Sumber: BPS

Tabel 6.2. Proyeksi Indikator Makroekonomi Provinsi Lampung

Indikator	2025	2026f	2027f
Pertumbuhan Ekonomi (% C-t-C)	5,28	5,0 – 5,6	5,1 – 5,7
Inflasi (% YoY)	1,25	2,5 ± 1	2,5 ± 1

Sumber: KPwBI Provinsi Lampung

Tabel 6.3. Harga Komoditas Ekspor dan Impor Utama Provinsi Lampung

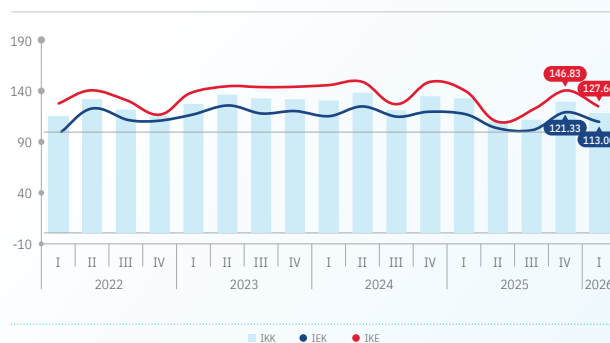
Komoditas Utama		Satuan	2025	2026f	2027f
Ekspor	Minyak Kelapa Sawit	USD/mt	1007,00	1.089,00	1.096,00
	Kopi Robusta	USD/kg	4,86	4,00	3,90
	Batubara	USD/mt	108,40	130,00	115,00
Impor	Pupuk	Indeks	138,70	181,30	152,10
	Gula	USD/kg	0,37	0,35	0,34
	Energi	Indeks	90,00	111,30	92,10

Sumber: World Bank Commodity Outlook April 2026

tahun 2026, konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat sejalan dengan terjaganya optimisme perbaikan pendapatan masyarakat, khususnya di sektor-sektor utama daerah. Hal tersebut didukung penetapan kenaikan upah minimum Provinsi Lampung pada tahun 2026 sebesar 5,35% menjadi Rp3.047.734, dari upah minimum pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.893.070 (Grafik 6.1). Selanjutnya, prakiraan peningkatan kinerja permintaan domestik juga tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Provinsi Lampung yang pada Triwulan I 2026 mencapai 120,33, tetap tinggi dan berada pada level optimis (Grafik 6.2). Prakiraan pendapatan yang lebih baik juga kemudian tercermin dari hasil *liaison* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang menunjukkan peningkatan ekspektasi pelaku usaha akan perkiraan penjualan dan juga tingkat upah (Grafik 6.3).

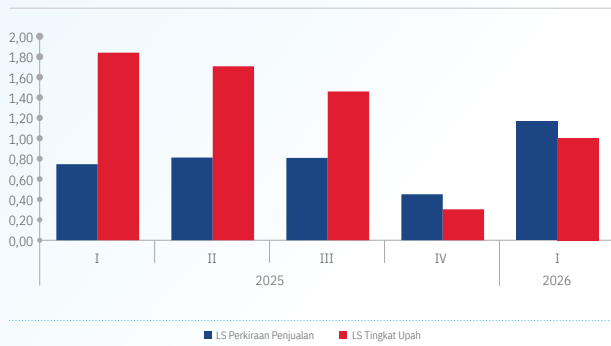
Dari sisi investasi, realisasi investasi di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun mulai menghadapi tantangan kehati-hatian penahanan laju seiring meningkatnya kehati-hatian investor global terhadap

Grafik 6.2. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Provinsi Lampung



Sumber: SK Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.3. Perkembangan Hasil Liaison BI Lampung



volatilitas pasar keuangan. Pada tahun 2025, realisasi investasi tercatat sebesar Rp15,2 triliun atau melampaui target yang ditetapkan, dengan Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-7 di wilayah Sumatra. Capaian tersebut mencerminkan tetap terjaganya minat investor terhadap Lampung, didukung posisi geografis yang strategis sebagai pintu gerbang Sumatra serta penguatan konektivitas infrastruktur. Ke depan, prospek investasi diperkirakan tetap terjaga seiring berlanjutnya pengembangan proyek strategis di sektor infrastruktur, energi baru terbarukan, dan pariwisata, yang berpotensi mendorong peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi daerah.

Konsumsi pemerintah diperkirakan tetap memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2026, meskipun ruang fiskal daerah menghadapi tantangan penyesuaian transfer dari pemerintah pusat. Struktur APBD TA 2026 Provinsi dan kabupaten/kota se-Lampung menunjukkan total pendapatan sebesar Rp28,88 triliun, dengan porsi pendapatan transfer yang masih dominan sebesar 71,53% dan PAD sebesar 27,83%. Dari sisi belanja, komposisi belanja operasi tercatat sebesar 72,63%, sementara belanja modal sebesar 12,60%. Ke depan, penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa mendorong pemerintah daerah untuk melakukan re-prioritisasi program serta meningkatkan kualitas dan efisiensi belanja. Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penguatan insentif fiskal berbasis kinerja, serta penataan porsi belanja pegawai dan infrastruktur secara bertahap menjadi langkah strategis untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah. Dengan penguatan kualitas belanja yang lebih berorientasi pada *output* dan *outcome*, konsumsi pemerintah tetap diperkirakan mampu menopang permintaan domestik, meskipun dengan ruang ekspansi yang lebih terbatas.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor Provinsi Lampung diperkirakan tetap terjaga, meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan periode sebelumnya, sejalan dengan normalisasi harga komoditas global dan perlambatan permintaan dari mitra dagang utama di tengah ketidakpastian

perdagangan dunia. Mengingat struktur ekspor Lampung yang masih didominasi oleh komoditas berbasis perkebunan dan pertanian, khususnya minyak kelapa sawit (CPO), kopi robusta, serta komoditas tambang seperti batubara, pergerakan harga komoditas global menjadi faktor utama penentu kinerja ekspor daerah. Merujuk *Commodity Markets Outlook World Bank*, harga CPO diperkirakan berada pada kisaran **USD1.089/mt pada 2026** dan meningkat terbatas menjadi sekitar **USD1.096/mt pada 2027**, masih relatif tinggi secara historis dan didukung permintaan global yang tetap kuat. Sementara itu, harga kopi robusta diperkirakan tetap berada pada level *elevated*, yakni sekitar **USD4,00/kg pada 2026 dan USD3,90/kg pada 2027**, meskipun mulai menunjukkan kecenderungan normalisasi seiring perbaikan pasokan global. Di sisi lain, harga batubara internasional (*benchmark* Australia) diperkirakan berada pada kisaran **USD130/mt pada 2026** dan melambat menjadi sekitar **USD115/mt pada 2027**.

Dengan dinamika tersebut, normalisasi harga komoditas dan risiko perlambatan ekonomi global perlu terus dicermati. Ke depan, penguatan hilirisasi dan diversifikasi pasar tujuan ekspor menjadi strategi penting dalam menjaga ketahanan sektor eksternal di Provinsi Lampung.

Prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung ke depan juga turut tercermin dari perkembangan kinerja lapangan usaha utama. Pada tahun 2026, kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan *base effect* setelah peningkatan produksi yang tinggi pada tahun-tahun sebelumnya. Prospek produksi tanaman pangan juga tetap terjaga didukung keberlanjutan program ketahanan pangan, optimalisasi lahan, penggunaan benih unggul, serta dukungan pupuk bersubsidi dan perbaikan jaringan irigasi. Berdasarkan Proyeksi Kerangka Sampel Area (KSA) Padi oleh BPS, produksi Gabah Kering Giling (GKG) Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 diperkirakan mencapai 921.930 ton, yang mencerminkan kapasitas produksi yang tetap terjaga pada awal periode. **Pada subsektor perkebunan, produksi kelapa sawit dan tebu diperkirakan relatif stabil dengan kecenderungan meningkat terbatas** seiring optimalisasi areal tanam dan penguatan hilirisasi, sementara prospek produksi kopi robusta tetap baik meskipun produktivitas berpotensi mengalami normalisasi seiring siklus tanaman.

Sejalan dengan peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur, kinerja LU Konstruksi pada 2026 diperkirakan meningkat dan berlanjut pada 2027. Penguatan tersebut didorong oleh berlanjutnya proyek infrastruktur strategis daerah, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan

kawasan industri, serta pembangunan sarana dan prasarana publik. Akselerasi belanja modal pemerintah daerah dan peningkatan realisasi investasi swasta turut menopang aktivitas konstruksi, sehingga memberikan *multiplier effect* terhadap sektor-sektor terkait.

Kinerja LU Industri Pengolahan juga diperkirakan menguat sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan prospek ketersediaan bahan baku yang lebih terjaga, khususnya pada industri pengolahan kelapa sawit dan industri makanan dan minuman. Implementasi kebijakan hilirisasi serta peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah berpotensi mendorong optimalisasi utilisasi kapasitas produksi. Meskipun demikian, risiko perlambatan permintaan global tetap perlu dicermati mengingat eksposur industri pengolahan Lampung terhadap pasar ekspor. **Selanjutnya, LU Perdagangan Besar dan Eceran diperkirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan penguatan konsumsi rumah tangga dan perbaikan distribusi barang antarwilayah.** Normalisasi produksi pangan nasional berpotensi mengurangi volatilitas perdagangan komoditas antar daerah, namun peningkatan daya beli masyarakat dan aktivitas industri tetap menjadi penopang utama kinerja sektor ini. **Sejalan dengan itu, LU Transportasi dan Pergudangan diperkirakan tumbuh positif meskipun lebih moderat,** seiring stabilisasi mobilitas masyarakat dan perkembangan volume distribusi barang, termasuk komoditas agroindustri dan pertambangan.

Secara keseluruhan, prospek kinerja lapangan usaha Provinsi Lampung ke depan menunjukkan **penguatan sektor sekunder dan tersier di tengah normalisasi sektor primer,** sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang tetap solid dan berkelanjutan.

6.2 Prospek Inflasi

Inflasi Dunia dan Nasional

Inflasi dunia diperkirakan mengalami peningkatan sementara pada 2026 sebelum kembali menurun pada 2027, seiring masih tingginya tekanan harga energi dan pangan global di tengah berlanjutnya ketidakpastian ekonomi dan tensi geopolitik. Berdasarkan *International Monetary Fund (World Economic Outlook April 2026)*, inflasi dunia diproyeksikan meningkat dari 4,1% pada 2025 menjadi 4,4% pada 2026, sebelum kembali melandai menjadi 3,7% pada 2027. Kenaikan inflasi pada 2026 terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga energi dan pangan global, sementara proses disinflasi diperkirakan kembali berlanjut pada 2027 seiring meredanya tekanan harga komoditas.

Perkembangan inflasi global masih menunjukkan divergensi antarnegara yang dipengaruhi oleh perbedaan struktur ekonomi, dinamika pasar tenaga kerja, serta besarnya

kontribusi faktor domestik terhadap inflasi, khususnya pada sektor jasa. Di Amerika Serikat, inflasi inti diperkirakan menurun secara bertahap dan kembali menuju target pada 2027 seiring meredanya tekanan harga jasa, terbatasnya transmisi kenaikan harga energi, dan tetap kuatnya produktivitas. Sementara itu, inflasi di Inggris diperkirakan meningkat sementara sebelum kembali ke sasaran pada akhir 2027, sedangkan inflasi di Jepang diproyeksikan melandai seiring meredanya tekanan harga pangan. Adapun di kawasan Uni Eropa, inflasi diperkirakan tetap berada di atas target hingga 2027, dengan inflasi inti yang menurun secara gradual. Di Asia, inflasi di Tiongkok diperkirakan meningkat secara bertahap dari level yang rendah, sementara inflasi India diperkirakan kembali mendekati sasaran setelah tekanan harga pangan mereda. Perkembangan tersebut perlu dicermati karena berpotensi meningkatkan tekanan *imported inflation* di negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui kenaikan harga energi, pangan, dan komoditas global lainnya. Risiko tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi prospek inflasi daerah ke depan, terutama melalui jalur biaya produksi dan distribusi.

Ke depan, risiko inflasi global diperkirakan masih relatif tinggi, terutama dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik, dinamika kebijakan perdagangan global, serta volatilitas harga komoditas energi dan pangan. Meskipun tekanan inflasi di berbagai negara menunjukkan tren yang lebih terkendali, proses disinflasi diperkirakan berlangsung secara gradual sehingga ruang pelonggaran kebijakan moneter di sejumlah negara maju masih relatif terbatas. Kondisi tersebut berpotensi mempertahankan volatilitas pasar keuangan global dan memengaruhi stabilitas nilai tukar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko *imported inflation* di negara berkembang. Di sisi lain, perlambatan permintaan global dan berlanjutnya normalisasi rantai pasok diperkirakan menjadi faktor yang menahan tekanan inflasi ke depan. Namun demikian, risiko kenaikan inflasi tetap perlu diwaspadai, khususnya apabila terjadi eskalasi ketegangan geopolitik, peningkatan hambatan perdagangan, atau gangguan pasokan komoditas strategis yang dapat kembali mendorong kenaikan harga global.

Meskipun ketidakpastian global masih tinggi, inflasi Indonesia pada 2026–2027 diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Kondisi tersebut didukung oleh konsistensi bauran kebijakan moneter Bank Indonesia, pengelolaan harga oleh Pemerintah, serta penguatan sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan TPIP–TPID. Bank Indonesia memprakirakan inflasi IHK secara tahunan tetap terjaga dengan inflasi inti yang stabil, sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terkendali, efektivitas transmisi kebijakan moneter, serta kapasitas perekonomian yang masih memadai dalam merespons peningkatan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, tekanan inflasi dari kelompok administered prices diperkirakan tetap

terjaga sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan harga yang diatur, sementara inflasi volatile food diperkirakan terkendali melalui penguatan pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, dan peningkatan produktivitas pangan domestik, termasuk melalui implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS).

Ke depan, dinamika inflasi Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah risiko yang bersumber dari ketidakpastian global, terutama volatilitas pasar keuangan internasional, pergerakan nilai tukar, serta potensi *imported inflation* akibat kenaikan harga energi dan komoditas global. Meski demikian, dampak risiko tersebut diperkirakan dapat diredam oleh penguatan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah, kecukupan cadangan devisa, serta terjaganya koordinasi kebijakan pengendalian inflasi. Di sisi domestik, terjaganya pasokan pangan, perbaikan distribusi antarwilayah, dan efektivitas komunikasi kebijakan diperkirakan terus memperkuat jangkar ekspektasi inflasi. Dengan bauran kebijakan yang *pre-emptive* dan *forward-looking* serta sinergi yang erat antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan TPID, inflasi Indonesia diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Inflasi Provinsi Lampung

Inflasi Provinsi Lampung pada 2026–2027 diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$, meskipun dihadapkan pada sejumlah faktor risiko yang perlu dicermati. Tekanan inflasi inti diperkirakan tetap terkendali dengan kecenderungan meningkat, terutama seiring normalisasi kelompok pengeluaran pendidikan pasca kebijakan pembebasan biaya komite sekolah pada 2025. Di sisi lain, daya beli masyarakat diperkirakan tetap kuat, didukung oleh peningkatan pendapatan seiring kenaikan UMP Lampung sebesar 5,35%, serta berlanjutnya kinerja positif lapangan usaha utama di tengah aktivitas ekonomi daerah yang tetap tumbuh solid.

Lebih lanjut, tekanan inflasi kelompok *volatile food* diperkirakan tetap terkendali sejalan dengan prospek berlanjutnya peningkatan produksi komoditas pangan strategis. Kondisi tersebut didukung oleh penguatan program intensifikasi pertanian dari pemerintah pusat melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi nasional pada 2026 sebesar 9,8 juta ton, termasuk perluasan cakupannya ke sektor perikanan budidaya. Di tingkat Provinsi Lampung, perluasan dukungan bantuan pupuk organik cair (POC) serta fasilitasi alat pengeringan (*dryer*) untuk penguatan pascapanen diperkirakan dapat mendorong peningkatan produktivitas sisi hulu tanaman pangan dan memperkuat ketahanan pasokan yang lebih berkelanjutan. Di samping itu, potensi cuaca yang relatif lebih kondusif pasca pemulihan bencana hidrometeorologi di sentra

produksi luar daerah turut menopang stabilitas produksi dan kelancaran distribusi pangan. Adapun inflasi *administered prices* diperkirakan tetap terjaga seiring kebijakan harga yang dikelola secara terukur.

Meski demikian, risiko inflasi ke depan masih perlu diwaspadai. Selain dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas global dan potensi peningkatan tekanan *imported inflation*, prospek inflasi daerah juga menghadapi risiko dari faktor iklim. Berdasarkan prakiraan BMKG, fenomena ENSO sudah menunjukkan indikasi *El Nino* lemah pada Mei 2026 dan diperkirakan meningkat dengan intensitas yang lebih kuat pada semester II 2026. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, mengurangi ketersediaan air irigasi, serta menekan produktivitas komoditas pangan strategis, khususnya tanaman pangan dan hortikultura.

Ke depan, penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui TPID Provinsi Lampung akan terus diperkuat untuk menjaga prospek inflasi tetap dalam sasaran serta memitigasi berbagai risiko yang mengemuka. Strategi 4K dalam memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif akan diperkuat melalui upaya peningkatan produktivitas komoditas pangan utama, penguatan kerja sama antar/intra daerah, optimalisasi distribusi dan pasar murah, serta pemanfaatan digitalisasi data dan sistem peringatan dini harga (*early warning system*). Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan yang akomodatif dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

6.3. Rekomendasi

Berdasarkan asesmen terkini, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang inklusif, mandiri dan inovatif, serta risiko meningkatnya tekanan inflasi akibat meningkatnya kenaikan harga minyak perlambatan ekonomi global, serta, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan:

1. Perlunya kebijakan transformasi struktural (*structural transformation*) yang bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung secara berkelanjutan serta mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengalihkan secara bertahap faktor produksi, baik tenaga kerja maupun kapital, dari sektor dengan produktivitas relatif rendah menuju sektor dengan produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi, khususnya industri pengolahan dan jasa produktif.
2. Kebijakan transformasi struktural di sektor primer diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan dan pasokan pangan

- dalam rangka menjaga stabilitas harga. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui optimalisasi lahan, intensifikasi penggunaan benih unggul, penerapan *good agricultural practices* (GAP), pemanfaatan digitalisasi pertanian, serta penguatan riset dan pengembangan untuk mendukung diversifikasi produk. Di sisi hilir, percepatan hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kopi, tebu, dan komoditas perikanan perlu diperkuat guna meningkatkan nilai tambah dan stabilitas pendapatan petani.
3. Kebijakan transformasi struktural di sektor industri dilakukan melalui peningkatan investasi baru dengan memastikan penciptaan kemudahan berusaha, ketersediaan lahan yang *clean and clear*, inovasi skema insentif dan simplifikasi perizinan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja dengan keterlibatan sektor swasta di tengah terbatasnya kebijakan fiskal pemerintah yang lebih ekspansif. Kebijakan transformasi di sektor industri juga diarahkan untuk diversifikasi komoditas dan pasar tujuan ekspor serta peningkatan standar mutu dan sertifikasi produk untuk memperkuat daya saing komoditas unggulan Lampung di tengah dinamika perdagangan global.
 4. Di tengah penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah guna memastikan setiap pengeluaran memiliki dampak optimal terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui re-prioritisasi belanja pada program yang produktif dan berdampak langsung, khususnya belanja modal infrastruktur dan sarana produksi, serta peningkatan kualitas belanja berbasis *output* dan *outcome*. Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan digitalisasi sistem perpajakan daerah perlu terus diperkuat untuk menjaga kesinambungan fiskal.
 5. Kebijakan transformasi struktural di sektor jasa diarahkan pada peningkatan peran sektor pariwisata dan jasa produktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Strategi pengembangan pariwisata dapat dilakukan melalui penguatan kolaborasi *pentahelix*, peningkatan kualitas *human capital* melalui pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, serta penguatan kapasitas kelembagaan yang melibatkan asosiasi usaha, pelaku industri, dan institusi pendidikan. Selain itu, penguatan kerangka regulasi yang mendukung daya saing (*competitiveness*) dan inklusivitas sektor pariwisata menjadi penting untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
 6. Melanjutkan sinergi pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui penguatan program TPIP-TPID dan implemementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) dalam kerangka 4K sebagai berikut:
 - Dari sisi keterjangkauan harga (K1), intervensi stabilisasi harga diarahkan agar semakin tepat sasaran melalui optimalisasi data harga yang mutakhir dan pemanfaatan *early warning system* (EWS) dalam mendeteksi potensi tekanan inflasi. Pelaksanaan gerakan pasar murah tetap menjadi instrumen penting, khususnya pada periode *high demand*, dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, serta ketepatan lokasi dan komoditas sasaran.
 - Pada aspek ketersediaan pasokan (K2), diarahkan pada penguatan produktivitas dan ketahanan pasokan pangan melalui keberlanjutan program intensifikasi pertanian, penguatan sarana produksi, serta perbaikan tata kelola pascapanen. Sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan *input* pertanian, penguatan kelembagaan petani, dan pengembangan kemitraan usaha diharapkan mampu menjaga kesinambungan pasokan sekaligus meminimalkan volatilitas harga pangan.
 - Pada aspek kelancaran distribusi (K3), penguatan kerja sama antar daerah (KAD) serta optimalisasi infrastruktur dan simpul distribusi pangan perlu terus ditingkatkan guna menekan disparitas harga antarwilayah. Peningkatan efisiensi rantai pasok, termasuk dukungan fasilitasi distribusi pada periode berisiko inflasi tinggi, diharapkan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di tingkat konsumen.
 - pada aspek komunikasi efektif (K4), penguatan transparansi serta diseminasi informasi pasokan dan harga pangan menjadi kunci dalam menjaga ekspektasi inflasi masyarakat tetap terjangkau. Koordinasi kebijakan yang erat melalui TPID, disertai penguatan komunikasi publik yang konsisten dan berbasis data, diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap dinamika pasokan dan harga, sehingga mendukung stabilitas inflasi secara berkelanjutan.

Daftar Istilah

Administered prices	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau <i>output gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat
Faktor Non Fundamental	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (<i>volatile foods</i>), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered price</i>)
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Inflasi inti	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental.
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

Migas

Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.

MTM

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Omzet

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

**Pendapatan Asli Daerah
(PAD)**

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Bimo Epyanto

Koordinator Penyusun

Achmad P Subarkah

Editor

Fiskara Indawan

Tim Penulis

Fiskara Indawan

Binar Tyas Aini

Khaira Alfatih

Nurunnadiya Savitri

Arifiandhita Salsabila Istiyanto

Sherline Vicky Aisyiyah

Aulia Fahrunnisa

Risa Aulia

Rara Gusti Rahmawati

Kontributor

Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi

Tim Implementasi KEKDA Provinsi

Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Produksi dan Distribusi

Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Sultan Hasanuddin No.38, Teluk Betung Utara,
Bandar Lampung 35211

Telp. (0721) 496355 / Fax. (0721) 481131

www.bi.go.id

